



UNIVERSITAS INDONESIA

**CYBER-FPI: KONTESTASI IDENTITAS NASIONAL DAN
IDENTITAS ISLAM**

TESIS

**ENDANG SURYANA PRIYATNA
NPM 1006741974**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SUSASTRA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**CYBER-FPI: KONTESTASI IDENTITAS NASIONAL DAN
IDENTITAS ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Humaniora**

**ENDANG SURYANA PRIYATNA
NPM 1006741974**

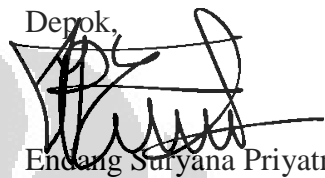
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SUSASTRA
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

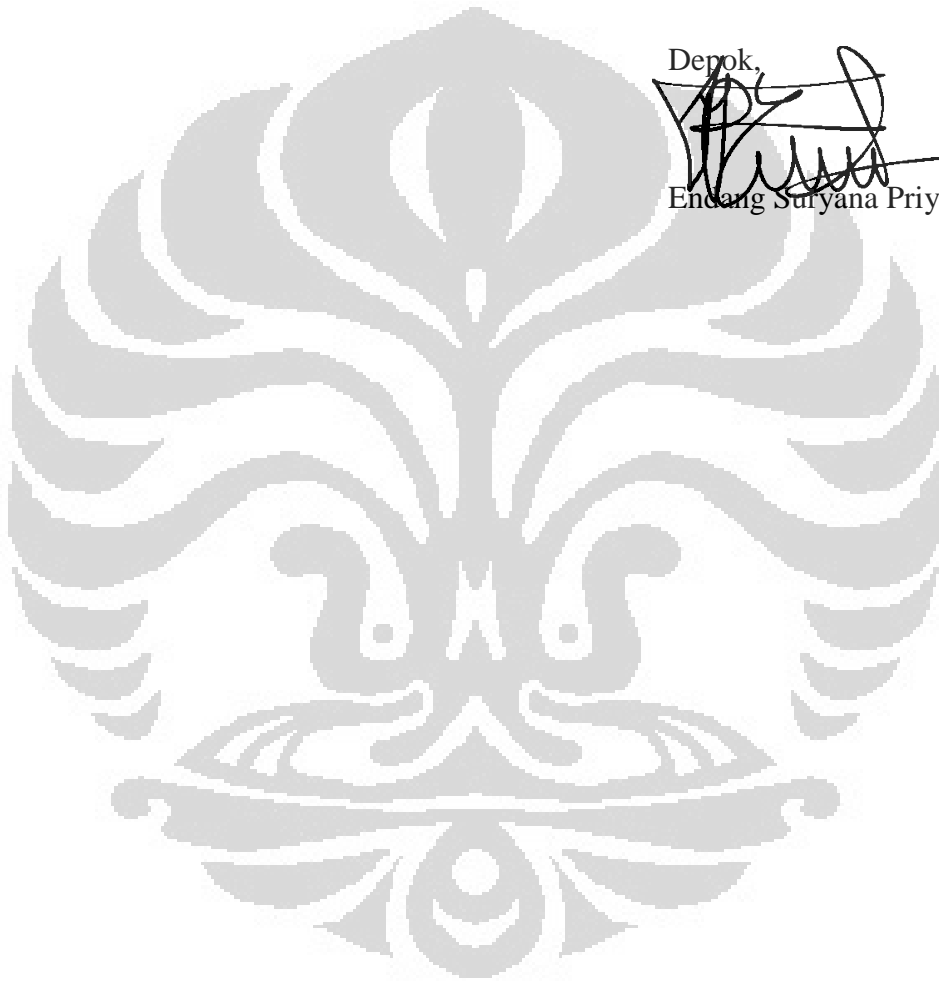
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok,

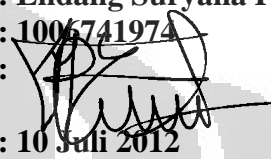


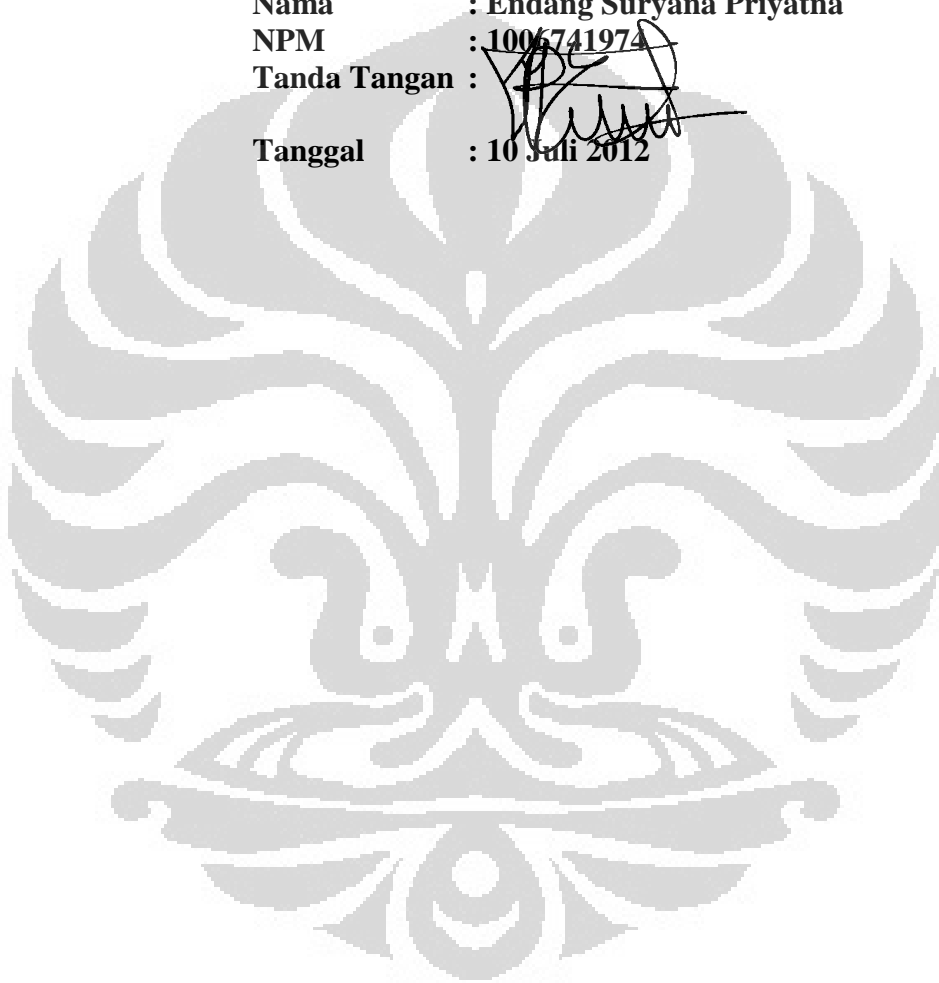
Endang Suryana Priyatna



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Endang Suryana Priyatna
NPM : ~~1006741974~~
Tanda Tangan : 
Tanggal : 10 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :
Nama : Endang Suryana Priyatna
NPM : 1006741974
Program Studi : Ilmu Susastra/*Cultural Studies*
Judul : Cyber-FPI : Kontestasi Identitas Nasional
dan Identitas Islam

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua penguji/anggota : Mina Elfira, Ph.D. (.....)

Pembimbing/anggota : Manneke Budiman, Ph.D. (.....)

Anggota/panitera : Tommy Christomy, Ph.D. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10... Juli 2012
oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 131 882 265

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah subhana wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Topik tesis ini saya pilih berawal dari kegemaran saya akan penjelajahan di ruang maya, aktifitas yang merupakan bagian dari keseharian saya. Dari aktifitas keseharian ini, penelitian dimulai. Penelusuran situs-situs, konten-konten tekstual dan visual, serta data-data mengenai Islam yang berkebaruan di ruang maya menjadi suatu pengembaraan intelektual dan spiritual bagi saya. Ruang maya memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi saya akan kompleksitas dan keragaman tafsiran terhadap Islam. Hal ini mengantarkan saya pada suatu pemahaman bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam: alam 'maya' maupun alam 'nyata'.

Terima kasih tak terhingga saya haturkan kepada semua yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya kepada saya selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

- Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Dr. Bambang Wibawarta.
- Manneke Budiman Ph.D selaku pembimbing tesis saya. Terima kasih atas arahan, inspirasi, dan kesabarannya yang tak terhingga selama saya menulis tesis ini. Bagi saya, beliau adalah “Rockstar” yang sangat budiman.
- Prof Melani Budianta, Ph.D dan Dr. Lilawati Kurnia, MA yang telah membuka cakrawala pengetahuan saya. Tidak lupa juga Tommy Christomy, Ph.D dan Mina Elfira Ph.D yang bersedia menguji tesis ini dan memberikan masukannya.
- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
- Dessy “The Flower” yang tak hentinya memberikan semangat bagi saya.

- Teman-teman *Cultural Studies* Universitas Indonesia, terutama klan #CS2010: Annisa R. Beta, Nilam Suri, dan Trisna yang telah menjadi sahabat dalam suka dan duka selama menempuh studi.
- Rekan-rekan pengajar dan mahasiswa program studi Sastra Inggris Universitas Islam “45” Bekasi.
- Pihak-pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu di sini.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah berkenan membalas segala kebaikan semua yang telah membantu saya.

Depok, 10 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Suryana Priyatna

NPM : 1006741974

Program Studi : Ilmu Susastra

Departemen : Ilmu Susastra

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

CYBER-FPI: KONTESTASI IDENTITAS NASIONAL DAN IDENTITAS ISLAM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2012
Yang Menyatakan



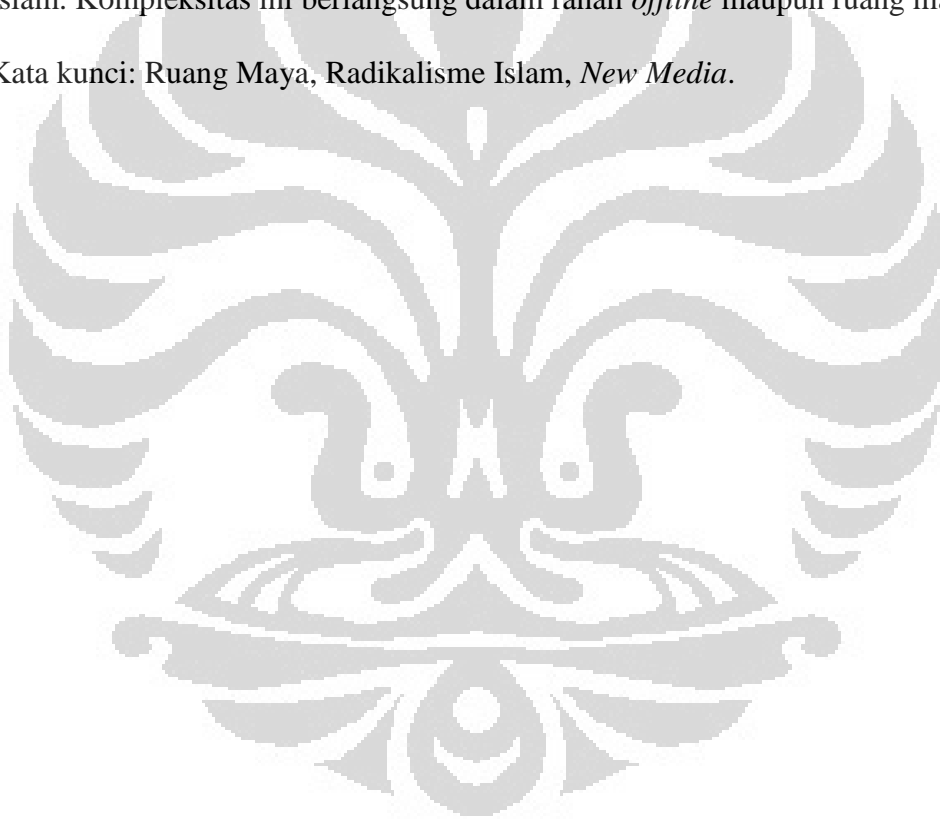
(Endang Suryana Priyatna)

ABSTRAK

Nama : Endang Suryana Priyatna
Program Studi : Ilmu Susastra/*Cultural Studies*
Judul : *Cyber-FPI: Kontestasi Identitas Nasional dan Identitas Islam*

Tesis ini membahas kontestasi pemaknaan atas FPI dalam hubungannya dengan wacana radikalisme Islam dan konstruksi identitas Islam di ruang maya. Dengan melakukan analisis pada argumentasi-argumentasi tekstual dan visual situs FPI (fpi.or.id), pemberitaan aksi FPI dan komentar pengunjung di tiga situs berita *online*: *vivanews.com*, *tempo.co*, dan *detik.com*, tesis ini menggali konstruksi identitas dan kompleksitas wacana yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana radikalisme Islam dan keberadaan FPI di ruang publik Indonesia adalah wacana yang kompleks. Kompleksitas ini tidak bisa dilepaskan dari kontestasi pemaknaan antara identitas bangsa dengan identitas Islam. Kompleksitas ini berlangsung dalam ranah *offline* maupun ruang maya.

Kata kunci: Ruang Maya, Radikalisme Islam, *New Media*.

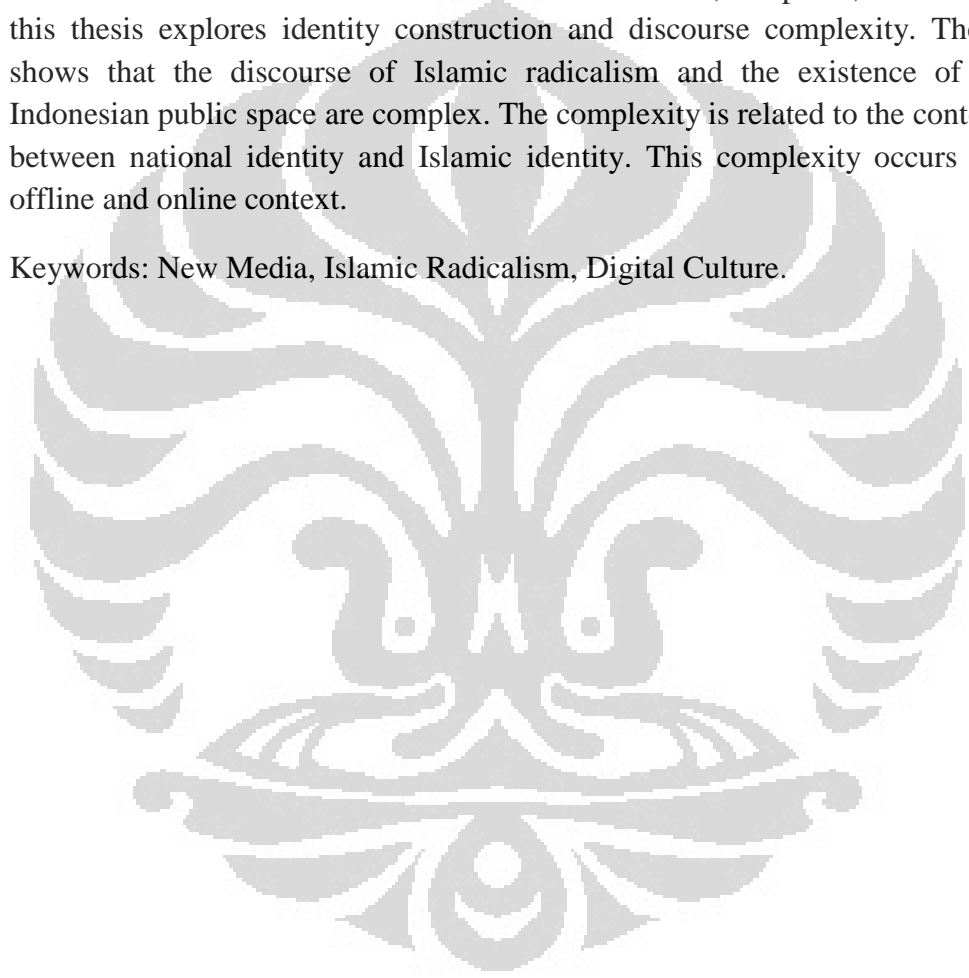


ABSTRACT

Name : Endang Suryana Priyatna
Study Program : Literature/Cultural Studies
Title : *Cyber-FPI: Contestation of National Identity and Islamic Identity*

This thesis analyses the contestation of signifying practices surrounding FPI in its relation to the discourse of Islamic radicalism and the construction of Islamic identity. Analysing the textual and visual argumentations on fpi.or.id, the articles and comments on three online media: vivanews.com, tempo.co, and detik.com, this thesis explores identity construction and discourse complexity. The result shows that the discourse of Islamic radicalism and the existence of FPI in Indonesian public space are complex. The complexity is related to the contestation between national identity and Islamic identity. This complexity occurs both in offline and online context.

Keywords: New Media, Islamic Radicalism, Digital Culture.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Penelitian Sebelumnya.....	9
1.5 Kerangka Teori	15
1.6 Metode Penelitian.....	20
1.7 Sistematika Penyajian.....	22
2. LATAR DAN KONTEKS: Masyarakat Jaringan dan Kaitannya dengan Gerakan Radikalisme Islam	23
2.1 Pengantar.....	23
2.2 Bangkitnya Masyarakat Jaringan.....	25
2.3 Masyarakat Jaringan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Kapitalisme	27
2.4 Masyarakat Jaringan, Identitas Kolektif, dan Perlawanan.....	31
2.5 Konteks Masyarakat Jaringan dalam Lanskap Ruang Publik Indonesia.....	34
2.5.1 Masyarakat Jaringan dari Bilik Warnet.....	35
2.5.2 Jaringan <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	36
2.5.2.1 Jaringan <i>Offline</i>	38
2.5.2.2 Jaringan <i>Online</i>	44
3. PEMBAHASAN: CYBER-FPI	47
3.1 Pengantar.....	47
3.2 Proyek Identitas Pasca-Rejim Orde Baru.....	47
3.2.1 <i>Civil Society</i> dan Komunalisme Umat.....	48
3.2.2 Media dan Gerakan Islam Pasca-Kejatuhan Rejim Orde Baru.....	50

3.3 FPI <i>Offline</i>	54
3.4 FPI <i>Online</i> : Hidup Mulia atau Mati Syahid.....	57
3.4.1 Dalam Bentangan Spanduk: Representasi Identitas Bangsa dan Agama.....	58
3.4.2 Dalam Tuntunan Navigasi: Representasi Identitas Perlawanan (<i>Resistance Identity</i>)	63
3.4.3 Dalam Perspektif Organisasi: Proyeksi dan Idealisasi Umat.....	67
3.4.4 Pesan dari Langit: Idealisasi Perjuangan Umat.....	70
3.4.5 Kesimpulan.....	72
3.5 FPI, Media, dan Partisipasi Publik.....	73
3.5.1 Kontestasi Ruang Interpretasi dan Ruang Publik.....	75
3.5.1.1 FPI dan Patung-patung Haram.....	76
3.5.1.2 Mojang dan Wayang: Agama, Budaya, dan Politik.....	78
3.5.2 Antara Akidah dan Kesesatan: Ruang Tanda Tanya.....	87
3.5.2.1 FPI dan Tanda Tanya	88
3.5.2.2 Akidah dalam Tanda Tanya.....	90
3.5.3 Kesimpulan.....	100
4. KESIMPULAN.....	102
5. DAFTAR REFERENSI.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	<i>Screenshot Banner Header</i> fpi.or.id.....	47
Gambar 3.2	<i>Screenshot Banner Header</i> eramuslim.com.....	48
Gambar 3.3	<i>Screenshot Banner Header</i> arrahmah.com.....	48
Gambar 3.4	<i>Screenshot Banner Header</i> voa-islam.com.....	48
Gambar 3.5	<i>Screenshot Banner Header</i> nu.or.id.....	48
Gambar 3.6	<i>Screenshot Banner Header</i> muhammadiyah.or.id.....	48
Gambar 3.7	Struktur Menu Navigasi fpi.or.id.....	52
Gambar 3.8	<i>Banner Body</i> fpi.or.id.....	54
Gambar 3.9	<i>Banner Body</i> Bingkai 1.....	59
Gambar 3.10	<i>Banner Body</i> Bingkai 2.....	59
Gambar 3.11	<i>Banner Body</i> Bingkai 3.....	60
Gambar 3.12	<i>Banner Body</i> Bingkai 4.....	60
Gambar 3.13	Poster Film “?” fpi.or.id.....	77
Gambar 3.14	“FPI melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor. (www.fpi.or.id)”.....	79
Gambar 3.15	Foto Aksi FPI.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Artikel Perspektif Organisasi FPI
- Lampiran 2 Artikel Sikap FPI terhadap Patung
- Lampiran 3 Artikel Tempo.co “Patung Mojang Dipotong-potong Besok”
- Lampiran 4 Artikel Tempo.co “Patung Mojang Menjadi Icon”
- Lampiran 5 Artikel Detiknews.com “Pasca Insiden Patung”
- Lampiran 6 Artikel FPI “STOP FILM Perusak Aqidah!”
- Lampiran 7 Artikel Vivanews.com “Tayangkan Film ‘?’, FPI Ancam”
- Lampiran 8 Artikel Detiknews.com “Digeruduk FPI, SCTV Batal Tayangkan”
- Lampiran 9 *Screenshot* Halaman Depan Situs fpi.or.id



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks budaya kontemporer, visibilitas identitas Islam terlihat memenuhi lansekap ruang publik Indonesia. Fenomena pengenaaan 'busana muslim' dengan berbagai gaya, menjamurnya jemaah tabligh akbar, serta munculnya sosok mubaligh-mubaligh populer dalam acara-acara di televisi¹ ataupun dalam baliho berukuran raksasa seakan mempertegas visibilitas identitas tersebut. Fenomena ini seakan memberikan indikasi munculnya kesadaran umat Islam Indonesia akan posisi sentral ajaran-ajaran dan syariat Islam. Namun demikian, kemunculan aksi-aksi teror, kekerasan, dan intoleransi yang mengusung identitas dan agenda Islam memberikan pula indikasi potensi negatif visibilitas identitas Islam dalam ruang publik.

Dalam hal ini, aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam radikal terlihat mempertegas ancaman dan bahaya visibilitas identitas Islam tersebut. Dari beberapa kelompok Islam yang dikategorikan sebagai radikal, Front Pembela Islam (FPI) merupakan kelompok yang sering menjadi topik perdebatan dan sorotan media karena aksi-aksinya yang dipandang radikal dan tidak toleran terhadap keberagaman. Pemberitaan mengenai keterlibatan FPI dalam beberapa aksi perusakan gereja, penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah, aksi kekerasan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di tugu Monas, perusakan patung-patung di berbagai daerah, sampai pada aksi razia tempat-tempat hiburan, terlihat mempertegas identitas FPI sebagai kelompok Islam radikal.

Dalam konteks ruang publik Indonesia, kejatuhan rejim Orde Baru pada 1998 adalah momen yang memberikan ruang artikulasi luas bagi kemunculan

¹ Baik itu dalam acara-acara siraman rohani maupun dalam ajang mencari bakat

identitas-identitas Islam, baik dalam bentuk populer maupun fundamental². Dalam hal ini, kejatuhan rejim Orde Baru juga merupakan momen bagi gerakan-gerakan Islam radikal untuk mengartikulasikan kembali pemikiran-pemikiran dan identitas-identitasnya yang mengalami represi selama rejim tersebut berkuasa (Fealy, 2004). Artikulasi ini bisa terlihat baik secara simbolik dengan pengenaan simbol-simbol keislaman, secara ideologis dengan penyebaran pemikiran-pemikiran radikal melalui ceramah dan media massa Islam, ataupun secara fisik dengan melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap hal-hal yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam³.

Fealy (2004) dalam kajiannya mengenai radikalisme Islam di Indonesia menyebutkan bahwa ciri kelompok radikal Islam ini terletak pada adanya kesamaan keyakinan akan penerapan syariat Islam dan sifat reaktif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sekularisme, materialisme, dan penyimpangan ajaran agama. Dalam penelitiannya itu, Fealy pun memasukkan FPI ke dalam kelompok Islam yang memiliki karakteristik di atas. Sementara itu, SETARA Institute⁴ dalam penelitiannya tentang Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat 2010⁵, menandai empat agenda utama kelompok-kelompok radikal: “penegakan syariat Islam, pemberantasan maksiat, aliran sesat, dan anti pemurtadan/anti kristenisasi” (p. 155), sebagai kode yang dibagi dan dipahami bersama⁶ oleh FPI dan beberapa ormas Islam lainnya⁷ dan merupakan kode yang

² Bisa dilihat dalam pembahasan Hasan dalam “The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the landscape of Indonesian Public Sphere” (2009) dan Fealy dalam “Islamic Radicalism in Indonesia : The Faltering Revival ?” (2004).

³ Pemaparan yang sama bisa dilihat dalam Fealy 104-105, Brauchler 268, dan Hasan 230.

⁴ LSM yang diketuai oleh Azyumardi Azra dan bergerak dalam promosi nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan demokrasi, sumber dari <http://setara-institute.org/en/content/profil>. LSM ini dituduh FPI sebagai kepanjangan tangan zionis Israel, sumber dari <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=308> (diakses pada 12 Maret 2012).

⁵ SETARA INSTITUTE. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat*. Jakarta: SETARA Institute. Hasil penelitian yang disebut FPI sebagai fitnah terhadap umat Islam, bisa dilihat di <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=307>.

⁶ istilah Hall: *shared code* dalam *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (1997).

⁷ FUI, GARIS, FAPB, THOLIBAN.

menyatukan ormas-ormas Islam yang berbeda tersebut dalam satu pengelompokan: radikal.

Bila dikaitkan dengan konteks identitas, ciri maupun agenda yang diusung oleh kaum Islam radikal terlihat mengarahkan pada adanya suatu upaya untuk menciptakan suatu komunitas muslim dengan identitas ideal, sesuai dengan syariat Islam (*Khairu Ummah*). Karenanya, salah satu cara untuk mewujudkan proyek identitas⁸ ini adalah dengan melakukan penyucian ajaran dan masyarakat dari hal-hal yang dapat merusak moralitas dan akidah umat. Konteks inilah yang terlihat dalam pandangan-pandangan dan aksi FPI dalam ruang publik Indonesia.

Didirikan pada 17 Agustus 1998, FPI merupakan salah satu kelompok Islam radikal yang muncul pasca-kejatuhan rejim Orde Baru. Di bawah pimpinan Habib Rizieq Syihab, FPI merupakan kelompok Islam radikal yang gencar dan aktif melancarkan aksi-aksinya di ruang publik Indonesia. Dengan berbasis massa urban, FPI menyasar aktifitas-aktifitas dan sarana-sarana dalam konteks ruang urban yang ditafsirkannya sebagai aktifitas dan sarana yang merusak akidah dan moralitas umat. Aksi-aksi FPI dalam ruang urban inilah yang menempatkan FPI dalam sorotan media massa.⁹

Di dalam situs resminya: fpi.or.id, FPI menyebutkan bahwa keberadaannya dalam ruang publik Indonesia adalah sebagai: “Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam”¹⁰. Dengan kata lain, keberadaan FPI adalah sebagai penjaga dan pelindung umat dari “ketidakadilan yang dialami umat Islam dan adanya gerakan-gerakan lokal dan global yang mengancam nilai-nilai akidah (keimanan) umat Islam”. Dari pernyataan-pernyataan FPI ini, tersirat bahwa aksi-aksi yang dilakukannya merupakan suatu resistensi terhadap dominasi dan tekanan dalam kehidupan umat Islam. Negara dipandang telah gagal dalam

⁸ Mengutip Istilah Castels: *project identity*, dalam *The Power of Identity* (2010).

⁹ Namun demikian, dengan berdirinya cabang-cabang FPI di daerah-daerah, pola aksi FPI terlihat merambah ke wilayah non-urban juga.

¹⁰ FPI. “Perspektif Organisasi”. <http://fpi.or.id/?p=tentangfpi&mid=1>.

melindungi hak-hak umat Islam. Karenanya, dari sudut pandang ini, artikulasi identitas FPI dalam ruang publik Indonesia terlihat sebagai suatu ekspresi ‘wajar’ suatu gerakan perlawanan.

Namun demikian, ketika proyek identitas yang diusung oleh FPI ini diartikulasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi benturan dengan identitas bangsa Indonesia yang majemuk. Karena itu, SETARA Institute menyarankan kepada pemerintah untuk menindak tegas kelompok Islam radikal dan melakukan suatu proyek deredikalisasi dengan memodernisasi pemikiran dan pandangan anggota organisasi tersebut (p. 169-171). Tindakan ini penting karena negara selama ini dipandang abai dan lalai menjamin kebebasan warga negara dengan membiarkan aksi-aksi radikal dan intoleran yang dilakukan oleh organisasi Islam radikal.

Dalam hal ini, baik FPI maupun SETARA Institute melihat adanya ketidakhadiran negara dalam permasalahan gerakan radikalisme Islam. Bagi FPI, negara mengabaikan dan "membuat sebagian dari ajaran-ajaran Islam tidak terakomodasi dalam perangkat hukum negara" ("Perspektif Organisasi"). Karena itu, penegakan syariah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi FPI adalah hal yang sangat penting. Sementara itu, bagi SETARA Institute, negara harus menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak warganegara lainnya. Pengakomodasian aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan Islam radikal dengan mengatasnamakan penegakan syariat Islam, dipandanginya sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (p. 166-169).

Di tengah absennya tindakan tegas pemerintah terhadap aksi-aksi FPI, reaksi terhadap aksi-aksi kekerasan FPI dan wacana radikalisme Islam justru dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti aksi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (2008), aksi Indonesia tanpa FPI pada 14 Februari 2012, dan aksi penolakan FPI di Pontianak. Selain berlangsung di ranah *offline*, perdebatan dan aksi penolakan terhadap FPI berlangsung pula di ruang maya. Munculnya *hashtag*¹¹ “#IndonesiaTanpaFPI” di

¹¹ Penanda topik atau kata kunci dalam Twitter, bisa dilihat di <https://support.twitter.com/articles/20169360-apa-itu-hashtag-simbol#>.

Twitter; *posting-posting* di blog; komentar-komentar di Facebook, forum dan kolom komentar situs berita *online*; dan video unggahan di Youtube, mewarnai wacana radikalisme Islam. Reaksi-reaksi yang munculpun tidak terbatas pada ketidaksetujuan terhadap FPI. Suara-suara dukungan terhadap aksi-aksi FPI pun meramaikan perdebatan.

Ketika salah satu berita di situs berita *online* (Vivanews.com¹²) memberitakan aksi penolakan FPI dengan *headline* “Apa Target Aksi #IndonesiaTanpaFPI: Ini ekspresi kemarahan pada negara yang melakukan pembiaran, termasuk pada premanisme”¹³, perdebatan pun terjadi di bagian *thread* komentar. Seorang pemberi komentar dengan nama layar (*screen name*) Osama bin Laden memberikan komentar dengan kalimat ancaman: “FPI SINI KAMU KE KALIMANTAN BIAR KUPENGGAL LEHERMU ITU”, yang kemudian dibalas oleh pengunjung dengan nama layar Bangnapi79 : “osamabinsetan: betul??? ntar liat anak TK aja Loe udah takut tp mulutmu yg mau jengkol terlalu sombong...”.

Di *thread* yang lain, seorang pengunjung dengan nama layar Lebay memberikan komentar : “Ketika Perda tentang peredaran Miras dicabut, ALLAH menegur melalui Insiden Xenia Maut, Ketika homoseksualitas mencoba dilegalkan, ALLAH menegur lagi melalui pembunuh berantai kaum gay..sama seperti kasus Ryan sang jagal dari Jombang...” kemudian dibalas oleh pengunjung dengan nama layar Abdiii : “Ketika FPI minta dibubarkan karena seperti preman. Eh malah preman asli keluar dari sarangnya membacok di RSAD”.

Ada beberapa hal yang menarik dari *thread* komentar-komentar di atas. Pertama, penggunaan dan pemilihan nama identitas *online* si pemberi komentar yang terkesan asal “comot” : Osama Bin Laden, Bangnapi79, Lebay, dan Abdiii. Kedua, penggunaan gaya bahasa lisan dan informal terlihat kontras dengan bahasa resmi dalam konten berita. Ketiga, isi komentar yang terkesan “asal bunyi”, tidak runut dan melebar ke hal-hal lain. Dengan memperhatikan ketiga hal ini, *thread* komentar terlihat seperti obrolan warung kopi ataupun obrolan pinggir jalan

¹² Portal berita PT Visi Media Asia Tbk milik Bakrie & Brothers yang berafiliasi dengan kelompok media TVONE dan ANTV.

¹³ <http://metro.vivanews.com/news/read/289474--indonesiatanpafpi-juga-anti-premanisme>.

dengan topik-topik keseharian. Sangat berbeda dengan situasi perdebatan dalam *Talkshow* di Televisi yang begitu teatral dan performatif. Namun, dari *thread-thread* komentar inilah rangkaian pemaknaan atas wacana kekerasan dan radikalisme Islam bisa terlihat bervariasi dan lebih luas¹⁴. Publik pun terlihat lebih ‘leluasa’ menyuarakan dan mengekspresikan pendapatnya. Dari konteks inipun bisa terlihat bahwa wacana radikalisme dan kekerasan yang diasosiasikan FPI merupakan arena kontestasi pemaknaan yang terbuka bagi interpretasi.

Kontestasi pemaknaan ini pun semakin menarik bila dikaitkan dengan hadirnya FPI di ruang maya. Di tengah dominasi pemaknaan atas identitasnya sebagai organisasi Islam radikal, ruang maya terlihat menjadi media juang dan artikulasi identitas FPI. FPI melalui situs resminya aktif memberikan penjelasan atas aksi-aksi dan keberadaannya dalam ruang publik Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari konten situs (baik tekstual maupun visual) yang berisi penjelasan-penjelasan aksi FPI dan juga sudut pandangya terhadap permasalahan umat Islam. Misalnya, ketika media massa ramai memberitakan aksi penolakan suku Dayak terhadap kedatangan ketua FPI ke Kalimantan Tengah, setidaknya ada empat artikel yang berisi bantahan FPI mengenai pemberitaan tersebut: “Terprovokasi, Warga Dayak Kepung Rumah Bupati Kapuas”, “Teras Narang BIANG KEROK Aksi Massa Anarkis”, “FPI Dihadang, Khawatir Membongkar Bobrok Pejabat”, dan “FPI & Dewan Adat Dayak Sepakat Kerjasama Membela Rakyat”.

Secara sekilas, artikel-artikel tersebut terlihat sebagai upaya pembelaan FPI terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan padanya. Namun, bila ditelisik lebih jauh, artikel-artikel tersebut menunjukkan keterkaitannya dengan isu-isu lain. FPI terlihat menggunakan isu-isu korupsi, moralitas pejabat, dan pembelaan atas hak-hak rakyat sebagai upaya pengalihan dari isu kekerasan, intoleransi, ataupun radikalisme yang ditujukan padanya. Dari konteks ini, bisa terlihat bagaimana FPI berusaha menghadirkan posisi dan identitasnya sebagai pembela umat dan sebagai golongan yang menegakkan “amar ma’ruf nahi munkar”¹⁵. Hal ini pun

¹⁴ Dari komentar-komentar tersebut terlihat adanya asosiasi dengan stereotipe-stereotipe terhadap etnis (Kalimantan), kelas (bau jengkol), ataupun kelompok minoritas (gay).

¹⁵ FPI. “Perspektif Organisasi”. <http://fpi.or.id/?p=tentangfpi&mid=1>.

mengindikasikan bahwa, selain sebagai media penyuaran dan pembelaan posisinya, situs FPI juga terlihat dipergunakan sebagai ruang proyeksi identitas. Melalui konten, struktur, dan desain situs, FPI berusaha mengonstruksi identitas muslim ideal yang dicita-citakannya. Karena itu, telaah terhadap situs FPI merupakan salah satu faktor penting dalam kajian mengenai FPI dan wacana radikalisme Islam yang membingkainya.

Faktor lain yang menarik untuk diperhatikan dalam kontestasi pemakaian mengenai FPI di ruang maya adalah gencarnya situs-situs berita *online* yang berafiliasi dengan institusi media massa konvensional (cetak maupun elektronik) dalam memberitakan aksi-aksi FPI. Pencarian indeks berita dengan kata kunci “Radikalisme Islam” dan FPI di detik.com (Trans Corp) menghasilkan sekitar 123 berita terkait. Sementara, pencarian di situs berita tempo.co (Tempo group) menghasilkan sekitar 1080 berita relevan, dan sekitar 51 berita relevan di vivanews.com (Tvone dan Antv). Temuan ini menunjukkan bahwa topik yang berhubungan dengan FPI dan radikalisme Islam di ketiga situs berita tersebut merupakan topik yang cukup mendapatkan sorotan. Senada dengan institusi media konvensional yang berafiliasi dengannya, ketiga situs berita *online* ini pun terlihat memosisikan dan mengonstruksi pemaknaan FPI sebagai ‘momok’ tindakan intoleransi, kekerasan, dan teror di ruang publik Indonesia. Namun demikian, berbeda dengan media massa konvensional, ketiga situs berita *online* ini terlihat memberikan ruang pemaknaan dan interpretasi terhadap pemberitaan yang dipublikasikannya. Melalui kolom komentar yang disediakan dalam setiap berita, ketiga situs berita *online* ini memberikan ruang bagi publik (pengunjung) untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya, sehingga ragam opini publik terhadap FPI dan wacana radikalisme Islam bisa terlihat. Dalam hal ini, ketiga situs berita *online* terkesan berusaha menunjukkan keterbukaan terhadap informasi yang diberikannya.

Dari contoh kontestasi-kontestasi pemaknaan dan reaksi terhadap aksi FPI, terlihat bahwa Internet merupakan salah satu ruang produksi dan sirkulasi pemaknaan wacana radikalisme Islam. Di tengah dominasi media massa konvensional atas akses-akses informasi mengenai FPI dan radikalisme Islam, Internet terlihat memberikan ruang pemaknaan yang lebih bervariasi dan

berimbang. Dalam hal ini, Internet terlihat juga memberikan ruang bagi berlangsungnya partisipasi publik dalam memberikan reaksi dan opininya terhadap suatu realitas sosial.

Berdasarkan ilustrasi di atas, penelitian atas kontestasi pemaknaan FPI di ruang maya menjadi relevan dalam kajian-kajian terhadap wacana radikalisme Islam dan konstruksi identitas Islam. Hal ini karena di ruang maya, elemen-elemen yang berperan dalam pengonstruksian pemaknaan terhadap wacana radikalisme Islam dan konstruksi identitas Islam, seperti FPI, publik, dan media, hadir dan memberikan versi pemaknaan masing-masing sehingga sudut pandang yang berimbang dan kompleksitas wacana yang cenderung direduksi dalam perdebatan-perdebatan di ruang publik Indonesia bisa terlihat. Karena itu, fokus penelitian akan diarahkan pada konstruksi identitas Islam di dalam situs resmi FPI: fpi.or.id dalam kaitannya dengan wacana radikalisme Islam. Di samping itu, penelitian juga akan diarahkan pada cara tiga situs berita *online*: detik.com, vivanews.com, dan tempo.co memaknai FPI, dengan memperhatikan topik-topik pemberitaan mengenai aksi-aksi FPI dan komentar-komentar pengunjung situs terhadap pemberitaan tersebut.

Dipilihnya tiga situs berita *online* di atas karena ketiganya merupakan situs berita *online* terbesar di Indonesia yang juga memiliki keterkaitan dan afiliasi dengan institusi media konvensional: detik.com berafiliasi dengan Trans Corp, vivanews.com dengan TVone dan Antv, serta tempo.co dengan Tempo group, sehingga sudut pandang dominan dan populer atas FPI dan wacana radikalisme Islam bisa terlihat. Selain itu, ketiga situs tersebut juga memberikan ruang komentar bagi publik pembaca, sehingga partisipasi publik dalam memberikan pemaknaan terhadap FPI bisa terlihat pula.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana kontestasi atas konstruksi pemaknaan FPI terjadi di situs FPI dan tiga situs berita *online*?
2. Representasi atas radikalisme Islam seperti apa yang dihasilkan oleh kontestasi pemaknaan di ruang maya itu?

Untuk menjawab dua pertanyaan dan permasalahan di atas, penelitian yang saya lakukan berfokus pada analisis representasi dan konstruksi wacana yang mengitari pemaknaan FPI. Konteks-konteks yang dipergunakan dalam analisis dibatasi pada beberapa hasil penelitian atas FPI dan gerakan Islam radikal lainnya. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Fealy (2004) dan SETARA Institute (2010) merupakan sumber utama yang saya pergunakan sebagai acuan di samping beberapa hasil penelitian lainnya seperti Bräuchler (2003 dan 2004). Karena itu, penelitian yang dilakukan bukanlah suatu penelitian etnografis, melainkan penelitian atas konstruksi wacana.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kontestasi pemaknaan atas FPI dalam hubungannya dengan wacana radikalisme Islam dan konstruksi identitas Islam sehingga kompleksitas wacana radikalisme Islam bisa terlihat di tengah reduksi dan penyederhanaan wacana tersebut dalam konteks ruang publik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ruang maya merupakan ruang yang memungkinkan terjadinya produksi dan sirkulasi pemaknaan atas wacana radikalisme Islam. Dalam hal ini, ruang maya berperan sebagai media baru (*new media*) yang memberikan ruang dan akses informasi yang lebih luas dan beranekaragam di tengah dominasi media massa konvensional (cetak dan elektronik) yang selama ini berposisi sebagai rejim kebenaran dalam produksi dan sirkulasi informasi dan akses pada pengetahuan.

1.4 Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa publikasi-publikasi dan kajian ilmiah mengenai radikalisme Islam di Indonesia dan penelitian mengenai konstruksi identitas Islam di ruang maya yang menjadi latar penelitian.

Penelitian terhadap radikalisme Islam di daerah Jabodetabek dan Jawa Barat yang dilakukan oleh SETARA Institute (2010) memberikan informasi yang cukup banyak mengenai kemunculan dan aksi-aksi gerakan radikalisme Islam. Penelitian SETARA Institute merupakan penelitian yang disebutnya sebagai penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan data yang relevan dan tepat (p. 5-7). Dalam penelitiannya tersebut, kemunculan gerakan

radikalisme Islam ditelusuri secara genealogis dengan memperhatikan asal-usul lahirnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia dari jaman pra-kemerdekaan hingga pasca-Orde Baru dengan memperhatikan konteks-konteks politik, sosial, dan ekonomi pada masing-masing periode dan wilayah di Indonesia.

FPI dalam penelitian ini dibahas secara eksplisit dan mendetil dengan memperhatikan konteks kelahiran FPI, sentralitas Habib Rizieq, konsep dan doktrin perjuangannya, rangkaian aksi FPI, sampai pada cara perekrutan anggota. Dalam penelitian ini, FPI disebutkan memiliki kesamaan agenda dengan kelompok Islam radikal lainnya yaitu: “Penegakan syariat Islam, pemberantasan maksiat, aliran sesat, dan anti pemurtadan/anti kristenisasi” (p. 155). Informasi penting lainnya yang bisa diperoleh adalah pemaparan tentang struktur FPI, yang disebutkannya memiliki empat lapisan: 1) kelas elite: habib dan ulama, 2) para intelektual: kaum terdidik, 3) laskar: mantan preman, dan 4) awam: simpatisan (p. 119-121).

Walaupun penelitian terlihat cukup detil memaparkan FPI, kelemahan mendasar dari penelitian ini adalah sudut pandangya terhadap radikalisme, yang terkesan memandang modernitas dan rasionalitas modern adalah cara untuk menghilangkan radikalisme melalui deradikalisasi. Terkesan bahwa gerakan radikal FPI adalah gerakan ‘barbar’ yang mengancam rasionalitas dan kehidupan modern. Terlebih lagi, butir rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini terlihat tidak peka terhadap isu yang dipermasalahkan oleh gerakan radikalisme Islam, dengan memberikan penekanan pada nilai-nilai demokrasi, liberalisasi ekonomi, dan pluralisme, yang sebenarnya dipermasalahkan oleh FPI¹⁶. Dalam hal ini, terlihat bahwa hasil penelitian ini tidak memperhatikan suara dan sudut pandang FPI secara utuh, dan terkesan bahwa hasil penelitian semakin memperkuat stereotipe tentang FPI sebagai organisasi yang penuh dengan aksi kekerasan. Karena itu, dalam penelitian saya, bentuk-bentuk penyuaran FPI akan menjadi salah satu fokus penelitian sehingga bisa terlihat bagaimana FPI

¹⁶ Dirujuk dari situs FPI dalam artikel “Berkedok Riset”.
<http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=307>.

mengartikulasikan identitasnya, dan kompleksitas pemaknaan atas wacana radikalisme Islam pun bisa terlihat.

Selain penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute, penelitian yang dilakukan oleh Greg Fealy tentang radikalisme Islam di Indonesia akan menjadi salah satu informasi dalam penelitian. Dalam publikasi penelitiannya, Fealy (2004), sama halnya dengan SETARA Institute, mengategorikan FPI sebagai salah satu kelompok Islam radikal. Terlihat beberapa persamaan antara penelitian Fealy dengan penelitian SETARA Institute, seperti melihat asal-usul gerakan radikal secara genealogis dan melacak sumber gerakan radikalisme Islam pada Darul Islam. Namun, penelitian Fealy memberikan informasi penting lain.

Dalam penelitiannya, Fealy menggambarkan secara mendetil keadaan Indonesia pasca-kejatuhan rejim Orde Baru. Menurutnya, representasi dominan mengenai Indonesia pada masa itu diwarnai dengan kemunculan kembali gerakan radikalisme Islam di ruang publik Indonesia, yang selama hampir tiga puluh tahun lebih berada dalam kontrol rejim Orde Baru (p. 105-106). Kemunculan ini dipandang sebagai momen yang akhirnya memberikan gambaran utuh tentang keberagaman wajah Islam di Indonesia yang selama ini hanya digambarkan sebagai sosok Muslim yang toleran.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan SETARA Institute, dalam penelitiannya Fealy menyoroti kelompok Islam radikal berdasarkan kesamaan 1) ideologi dan doktrin, 2) hubungan antara kelompok radikal, 3) karakteristik kepemimpinan dan keanggotaan, dan 4) pola aktifitas. Berdasarkan empat butir tersebut, Fealy melihat FPI cukup berbeda dibandingkan dengan organisasi Islam radikal lainnya (DI/NII, JI, MMI, FKAWJ, dan HT). Secara keanggotaan, FPI disebutkannya berasal dari golongan Islam tradisional yang berasal dari daerah Banten dan Betawi dengan latar NU (p. 114). Secara doktrin, Fealy menyebutkan bahwa FPI mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan yang beraliran *ahlus sunnah wal jamaah* dengan penafsiran salafi, yang disebut Fealy berbeda dengan penafsiran Islam tradisional yang memakai doktrin tersebut dari sudut pemahaman sunni.

Hal yang sangat membedakan FPI dari organisasi Islam radikal lainnya adalah posisi FPI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di halaman

yang sama, Fealy menyebutkan bahwa, bagi FPI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk akhir dari sistem kenegaraan di Indonesia. Karenanya, gerakan FPI terlihat lebih menekankan pada permasalahan moralitas umat Islam di Indonesia. Bila memperhatikan cara FPI merepresentasikan identitas di dalam situs resminya, pemaparan-pemaparan Fealy ini terlihat relevan. Ketika membuka halaman utama situs resmi FPI, pengunjung akan disambut dengan tampilan-tampilan visual yang mengarahkan pada representasi identitas FPI, seperti peletakan logo FPI yang berdampingan dengan bendera Merah Putih dan visualisasi sosok Habib Rizieq yang terlihat menjadi fokus tampilan halaman utama.

Penelitian yang dilakukan oleh Fealy terlihat memandang permasalahan radikalisme Islam di Indonesia dari sisi asal-usul ideologis dan doktrin yang diusung oleh tiap-tiap kelompok Islam radikal. Berbeda dari penelitian SETARA Institute yang terlihat memosisikan gerakan Islam radikal sebagai permasalahan yang harus diselesaikan dan memandang bahwa radikalisasi pemikiran adalah cara yang terbaik, bagi Fealy, permasalahan radikalisme Islam dipandang sebagai suatu fenomena yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena keberadaan radikalisme dengan tujuan menyucikan keyakinan dan mengislamkan negara dan masyarakat merupakan bagian dari sejarah Islam (p. 118).

Dalam hal ini, Fealy mengemukakan bahwa agenda-agenda yang dibawa oleh kelompok Islam radikal bisa mendapat dukungan ataupun penolakan dari umat. Penegakan syariat Islam secara komprehensif bisa saja mendapat respon luas dari umat. Namun demikian, penerapan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa serta perwujudan negara Islam dan kekhalifahan Islam merupakan agenda yang menjadi perdebatan dan penolakan umat.

Kedua penelitian di atas cukup memberikan latar informasi mengenai FPI dan gerakan radikalisme Islam, akan tetapi kedua penelitian tersebut tidak menyentuh ruang aktifitas lain dari gerakan radikalisme Islam. Keduanya tidak melakukan kajian atas aktifitas *online* FPI maupun kelompok radikalisme Islam lainnya. Karena itu, penelitian sebelumnya mengenai aktifitas *online* dari kelompok Islam radikal bisa memberikan informasi bagi penelitian saya.

Pencarian di *database* publikasi penelitian ilmiah menghasilkan dua penelitian relevan, yaitu: “Islamic Radicalism Online: The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace” (2004) dan “Cyberidentities at War: Religion, Identity, and the Internet in the Moluccan Conflict” (2003). Kedua publikasi ilmiah ini ditulis oleh Birgit Bräuchler.

Di dalam kedua artikel tersebut, Bräuchler meneliti aktifitas *online* salah satu kelompok Islam radikal FKAWJ (Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah) sehubungan dengan konflik di Maluku, yang melibatkan kelompok Islam dan kelompok Kristen. Dalam penelitiannya tersebut, Bräuchler menekankan pentingnya melakukan penelitian Internet dalam melakukan penelitian terhadap kelompok-kelompok Islam. Hal ini, menurutnya, akan memberikan informasi yang komprehensif tentang kompleksitas permasalahan identitas yang diusung oleh kelompok-kelompok Islam (2004, p. 281). Dia menekankan bahwa tujuan penelitian aktifitas *online* adalah untuk mencari persepsi-persepsi dan ideologi dalam penafsiran suatu realitas. Berdasarkan argumen itulah Bräuchler melakukan penelitian atas situs resmi yang dimiliki oleh FKAWJ sebagai representasi kelompok Islam dan milis yang dikelola oleh kelompok Kristen dan Katolik.

Dalam “Cyberidentities at War: Religion, Identity, and the Internet in the Moluccan Conflict”, Bräuchler menganalisis representasi konflik Maluku di dalam situs FKAWJ dan milis kelompok Kristen dan Katolik, serta memperhatikan bagaimana konflik yang terjadi di ranah *offline* juga terjadi di ranah *online*. Analisis atas situs-situs tersebut, difokuskan pada representasi tekstual (Bräuchler menyebutnya *Textual Argumentation*) dengan meneliti posting-posting yang berkenaan dengan konflik, dan representasi visual (*Visual Argumentation*) dengan meneliti postingan gambar-gambar dan foto yang menggambarkan korban-korban dari kedua belah pihak, serta interaksi antara tiap-tiap kelompok dalam Internet, dengan memperhatikan ejekan-ejekan antar kelompok yang berseteru. Hasil penelitian Bräuchler menunjukkan bahwa kejadian-kejadian dan kondisi yang terjadi bisa disimulasikan dan diartikulasikan di dalam ruang maya (p. 147-151). Bräuchler menunjukkan bahwa Internet mampu

menciptakan suatu *imagined community*¹⁷ yang bisa menghadirkan solidaritas dan identitas kolektif dengan menghadirkan ingatan kolektif tentang peristiwa yang terjadi dalam konflik (p. 147).

Sementara itu, dalam penelitian lain, Bräuchler (2003) memfokuskan pada cara FKAWJ merepresentasikan identitas ideal di dalam ruang virtual. Dalam penelitian ini, situs FKAWJ diteliti baik dari sisi konten, struktur, maupun desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam situsnya, identitas ideal yang diproyeksikan oleh FKAWJ adalah identitas yang dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan konteks yang terjadi di ranah *offline* (p. 277-280). Ketika terjadi konflik di Maluku, Bräuchler mencontohkan, situs FKAWJ terlihat begitu kuat merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari gerakan Islam internasional yang membela umat Islam di dunia. Namun, ketika dilancarkan wacana perang atas teror oleh Amerika, FKAWJ menyatakan dirinya bukan bagian dari jejaring teroris; tautan-tautan dan simbol-simbol yang berhubungan dengan gerakan-gerakan teroris pun dihilangkan di dalam situs.

Dua penelitian Bräuchler memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian saya, terutama cara Bräuchler menganalisis representasi identitas dan persepsi-persepsi yang muncul dalam Internet. Penelitian Bräuchler juga memberikan informasi mengenai hubungan antara aktifitas *offline* dan *online* kelompok Islam radikal. Akan tetapi, konteks penelitian yang dilakukannya sudah mengalami banyak perubahan. Misalnya, ditutupnya situs FKAWJ dan bubarnya organisasi tersebut dalam ruang publik Indonesia. Karena itu, penelitian terbaru mengenai aktifitas *online* kelompok Islam radikal di Indonesia tentunya akan menunjukkan relevansinya, terutama dengan melihat tingkat partisipasi publik Indonesia dalam ranah *online* yang semakin tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian yang dipaparkan di bagian ini memberikan informasi yang penting bagi penelitian saya. Dua penelitian sebelumnya (SETARA Institute dan Fealy) memberikan landasan bagi asal-usul gerakan radikalisme Islam, terutama FPI. Kedua penelitian tersebut juga memberikan informasi mengenai doktrin-doktrin dan sosok identitas Islam ideal

¹⁷ Istilah Benedict Anderson dalam *Imagined Communities*. 1986.

yang diartikulasikan oleh FPI dalam ranah *offline*. Sementara itu, dua penelitian yang dilakukan oleh Bräuchler memberikan informasi dan cara melihat aktifitas dan representasi FPI dalam ranah *online*. Karena itu, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ini, penelitian mengenai FPI di ruang maya saya lakukan dengan tujuan memberikan analisis baru terhadap aktifitas *online* salah satu kelompok Islam radikal di Indonesia dalam konteks budaya Indonesia kontemporer.

1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori. Untuk menelaah konstruksi identitas, konsep-konsep identitas yang dikemukakan oleh Imanuel Castells akan menjadi sumber acuan¹⁸. Dalam pemaparan-pemaparannya, Castells (2010) melihat permasalahan fundamentalisme dan radikalisme Islam sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari konteks globalisasi yang menciptakan suatu jaringan interkoneksi antara etnis, ideologi, media, teknologi, dan finansial yang melewati batas ruang dan wilayah (“Preface to the 2010 Edition”, p. xvii-xxxvi). Castells memaknai konteks jejaring dan interkoneksi ini sebagai salah satu fitur dari masyarakat global yang disebutnya sebagai “*the network society*”¹⁹. Menurut Castells, dalam sistem jejaring ini, yang mengikat bagian-bagian jaringan (*the nodes*) adalah adanya suatu kode yang dibagi dan dipahami bersama, yang bila dikaitkan dengan konteks budaya, menunjukkan suatu sistem representasi dan konstruksi pemaknaan atas identitas.

Konstruksi identitas, menurut Castells (2010), akan melibatkan suatu konteks tertentu dan suatu relasi kuasa (p. 7). Dalam hal ini, identitas dipandang sebagai hasil dari suatu kontestasi wacana dalam suatu konteks tertentu. Berdasarkan konteks dan relasi kuasa yang melatari konstruksi suatu identitas, Castells membagi proses pembentukan identitas ke dalam tiga kategori.

Pertama adalah *legitimizing identity*. *Legitimizing identity* didefinisikan olehnya sebagai suatu identitas yang diperkenalkan oleh institusi-institusi dominan dalam masyarakat untuk memperluas dan merasionalkan dominasinya

¹⁸ Dalam hal ini, konsep-konsep identitas yang dikemukakan Castells dalam *The Power of Identity* (2010) akan menjadi acuan utama.

¹⁹ Dalam buku *The Network Society: A Cross Cultural Perspective* (2004).

(8). Castells menambahkan bahwa proyeksi identitas ini akan menghasilkan suatu *civil society*. Bila dikaitkan dengan konteks dan relasi kuasa yang melatarinya, identitas ini terlihat sebagai identitas yang diproyeksikan oleh suatu kekuasaan dominan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Castells menyebutkan negara berperan dalam penciptaan identitas ini. Identitas nasional, dalam hal ini, merupakan salah satu contohnya. Melalui proyeksi identitas ini, misalnya, negara memiliki suatu legitimasi untuk menciptakan dan memaksakan identitas nasional pada seluruh warga negara, sehingga suatu bentuk *civil society* bisa tercipta dengan satu pemaraka identitas: identitas nasional.

Kedua adalah *resistance identity*. Konstruksi identitas ini dilatari oleh adanya suatu perlawanan dan resistensi terhadap dominasi, baik itu dominasi negara ataupun kelompok mayoritas. Kelompok-kelompok yang mengalami represi, misalnya, akan mengusung identitas-identitas perlawanan yang biasanya mengacu pada suatu memori kolektif atau *shared code* yang dipahami bersama untuk membentuk suatu komunitas perlawanan. Dalam hal ini, artikulasi identitas yang dilakukan oleh gerakan radikalisme atau fundamentalisme bisa dilihat sebagai suatu contoh. Dengan mengusung identitas-identitas tertentu (Islam misalnya), gerakan-gerakan radikal membentuk suatu komunitas perlawanan atau organisasi perlawanan, seperti munculnya organisasi-organisasi Islam radikal.

Ketiga adalah *project identity*: Castells mendefinisikan konstruksi identitas ini sebagai satu konstruksi identitas baru. Identitas ini diproyeksikan untuk menunjukkan keberadaannya di dalam masyarakat dan menuntut adanya pengakuan dari masyarakat. Bentuk *project identity* ini bisa dilihat misalnya pada gerakan-gerakan feminis atau pergerakan kaum gay yang menuntut pengakuan atas keberadaannya di masyarakat. Gerakan-gerakan inilah yang menurut Castells menghadirkan suatu subjektifitas baru, misalnya dalam konteks konstruksi subjektifitas perempuan.

Namun, Castells menekankan bahwa masing-masing identitas ini menuju pada suatu sekuens dan bersifat dinamis²⁰. Misalnya, suatu *resistence identity* akan juga melibatkan suatu *project identity* dan, seiring dengan waktu dan wacana

²⁰ Hall dalam "Cultural Identity and Diaspora" (1990) menyebutnya bersifat cair (*fluid*).

yang melatarinya, bisa berubah menjadi satu *legitimizing identity*. Dalam konteks penelitian saya, posisi dinamis dan sekuens inilah yang akan dipergunakan untuk menganalisis konstruksi identitas FPI. Dalam satu sisi, misalnya, hadirnya FPI bisa dilihat sebagai suatu bentuk resistensi yang juga mengusung suatu *project identity*. Namun, di sisi lain, resistensi dan proyek identitas yang diusungnya dipergunakan sebagai suatu landasan untuk melegitimasi aksi-aksinya. Fluiditas inilah yang akan saya lihat dalam penelitian atas konstruksi identitas FPI di ruang maya. Fluiditas ini juga dipergunakan untuk melihat bagaimana pemaknaan atas masing-masing bentuk identitas mengalami perubahan sesuai dengan konteks wacana yang muncul.

Selain teori identitas, penelitian ini juga akan menggunakan analisis mitos Barthes dan konsep-konsep analisis wacana Foucault. Kedua teori ini akan dipergunakan untuk membahas konteks representasi identitas dalam bentuk visual dan tekstual. Dalam konsep mitos Barthes²¹, representasi visual bisa dibaca melalui dua level proses penandaan. Pertama dilihat pada level denotasi dan kedua pada level konotasi. Dalam hal ini, Barthes mencontohkan gambar seorang kulit hitam mengenakan seragam militer Perancis sedang menghormat pada bendera Prancis. Dalam level denotasi, elemen dari gambar (penanda) dan konsep (petanda) dibaca sebagai suatu kesatuan tanda yang mengacu pada pemaknaan suatu pesan: seorang kulit hitam mengenakan seragam militer Perancis menghormat bendera Prancis. Pada level kedua; level konotasi, pesan yang dihasilkan dari pembacaan level pertama dikaitkan dengan suatu set konsep yang lebih luas dengan memperhatikan konstruksi ideologi dan budaya yang melatarinya. Dalam hal ini, pesan di level pertama dikaitkan dengan konteks kolonialisme Prancis.

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, pembacaan Barthes ini akan dipergunakan untuk membaca konten visual (foto dan gambar) dan desain situs FPI sebagai suatu konstruksi pemaknaan atas identitas ataupun sudut pandang FPI, mengingat dalam setiap konten pemberitaan maupun desain situsnya FPI selalu menyertakan gambar-gambar tertentu yang terkesan memperkuat

²¹ Barthes dalam *Mythologies* (1972).

pemaknaan terhadap berita ataupun terhadap FPI sendiri, sehingga kontestasi pemaknaan bisa dimunculkan. Sebagai contoh, FPI menempatkan bendera merah putih di pojok kiri *banner* pada bagian *header* situsnya. Bila dibaca pada level denotasi, pesan dari gambar itu adalah: bendera merah putih. Namun bila dilakukan pembacaan pada level berikutnya, bendera merah putih tersebut bisa dikaitkan dengan pemaknaan bahwa gerakan FPI bersifat nasionalis (nasionalisme) atau bila dikaitkan dengan hasil penelitian Fealy, bendera tersebut mengonstruksi pemaknaan bahwa FPI menerima dan mengakui NKRI sebagai satu bentuk negara yang sah bagi bangsa Indonesia.

Bila pemaknaan ini kemudian dikaitkan dengan logo FPI di pojok kanan *banner* pada bagian *header* situsnya, akan terbaca bahwa FPI adalah ormas Islam yang memperjuangkan ajaran dan syariat Islam di negara Indonesia. Dari sini terlihat kontradiksi pemaknaan identitas FPI. Dari satu sisi terlihat nasionalis, namun di sisi lain terlihat mengusung syariat Islam. Terkesan ada konstruksi pemaknaan bahwa syariat Islam bisa berdampingan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bila dikontraskan dengan aksi-aksinya yang diberitakan tidak toleran, tentunya pemaknaan ini akan menunjukkan suatu kontradiksi.

Konsep analisis wacana Foucault dipergunakan untuk melihat kontestasi wacana yang muncul dalam artikel yang ditulis FPI, pemberitaan dalam tiga situs berita *online*, maupun komentar pengunjung situs. Dalam hal ini, pemaknaan atas FPI dan wacana radikalisme Islam menghasilkan suatu kontestasi wacana. Karena itu, konten-konten situs maupun struktur dan desain situs FPI akan ditelaah konstruksi-konstruksi wacana yang melatarinya. Dari elemen-elemen tersebut, akan dilihat bagaimana FPI mengonfigurasi subjek, pengetahuan, dan susunan kuasa tertentu menjadi dominan, dinormalisasi, dan dilegitimasi dalam konteks penegakan syariah Islam dan moralitas umat, sementara di sisi lain men-delegitimasi, mengafirkan, dan memurtadkan segala penyimpangan terhadap kemurnian syariat Islam. Kemudian, akan dilihat pula bagaimana FPI mengatasi kontradiksi antara gagasan NKRI di satu pihak dan agenda penegakan syariat di pihak lain.

Teori terakhir yang akan dipergunakan adalah teori mengenai *new media* dan Internet seperti dikemukakan oleh Mark Poster dalam *What's the Matter with*

the Internet (2001). Teori-teori yang dikemukakannya dipergunakan untuk membahas aspek budaya dan aspek spatialitas Internet. Dalam kajiannya terhadap Internet, Mark Poster menunjukkan potensi Internet dalam memberikan konstruksi dan konfigurasi baru terhadap mediasi media atas akses pengetahuan dan interpretasi realitas sosial. Poster (2010) menekankan pada aspek budaya dan kesejarahan dari Internet. Internet dipandang sebagai suatu arena dan ruang konfigurasi dan konstruksi identitas yang di dalamnya bisa terjadi suatu relasi dan reaksi terhadap kuasa²².

Dalam hal ini, Poster menginterpretasikan Internet sebagai suatu *public sphere*. Poster menunjukkan bahwa interaktifitas, interkoneksi, dan fluiditas Internet membuka peluang bagi adanya partisipasi publik yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu *public sphere*. Sebagai *new media*, Poster menambahkan, Internet meneruskan mediasi dan pola hubungan antara manusia dengan ‘mesin’ dalam mengakses realitas atau objek di dunia ataupun manusia dengan manusia. Namun, berbeda dengan mediasi media sebelumnya baik itu media dalam bentuk cetak ataupun elektronik yang cenderung mengisolasi subjek dengan objek representasi, atau dengan kata lain menempatkan jarak antara subjek dengan objek, Internet menempatkan pola hubungan manusia dengan mesin media (*media machine*) sebagai suatu hubungan yang tak terpisahkan (Poster, 2010). Internet memberikan peluang bagi adanya partisipasi dan interaksi dalam pola hubungan yang termediasi media ini.

Bila dikaitkan dengan kontestasi pemaknaan FPI dalam ruang maya, konteks-konteks dan argumen-argumen yang disebutkan Poster menunjukkan relevansinya. Kontestasi tersebut bisa dilihat sebagai suatu bentuk partisipasi publik terhadap pemaknaan aksi-aksi FPI di ruang publik Indonesia. Walaupun aksi dan reaksi berlangsung di ruang maya, permasalahan utama adalah pada bagaimana publik memersepsikan suatu realitas yang terjadi di ruang sosialnya di tengah dominasi media massa cetak dan elektronik yang cenderung memproyeksikan sudut pandang institusi yang melatarinya. Dalam hal ini,

²² Konsep-konsep yang dikemukakan Poster pada bagian “The Culture of Underdetermination” (2001), p. 1-20.

aktifitas *online* yang dilakukan merupakan suatu bentuk penyuaran ‘personal’ terhadap suatu realitas.

1.6 Metode Penelitian

Secara keseluruhan metode penelitian akan menerepakan analisis-*analisis* terhadap elemen budaya, media, dan identitas. Model penelitian mengenai identitas dan Internet yang dilakukan oleh Fung dalam “Identity politics, resistance and new media technologies: A Foucauldian approach to the study of the Hknet” (2004) menjadi salah satu model acuan dalam penelitian ini.

Perspektif analisis Fung (2004) mengacu pada argumen-argumen Foucault, terutama pembahasan Foucault mengenai: *Truth and Power*, *Genealogy*, dan *Discursive Formation*. Selain itu, Fung juga menghubungkan analisis Internet dengan data-data etnografis. Dalam hal ini, data diambil dari arsip HK Net untuk melihat latar dan konteks sejarah kelahiran HK Net dan konteks penyerahan kekuasaan Hongkong dari Inggris ke RRT. Arsip tersebut kemudian dibagi berdasarkan tema dan rentang waktu. Data tersebut dipergunakannya untuk memunculkan konteks-konteks yang melatari wacana identitas (*the questions of meaning*) dan untuk menganalisis efek dari wacana tersebut terhadap pengguna (*textual analysis to social practices*).

Berdasarkan perspektif analisis tersebut, Fung memformulasikan metode analisis data dengan cara: 1) menginterpretasikan data secara tekstual (*as presented*), 2) data diinterpretasikan sebagai bagian dari praktik genealogis para pengguna (*acting and reacting*), dan 3) menganalisis *interplay* kekuatan-kekuatan sejarah dan konteks yang melatari artikulasi identitas. Dalam struktur analisisnya, Fung merunut tahapan analisis sebagai berikut:

Pertama: melacak genealogi HKNET, dengan memperhatikan latar belakang dan karakteristik HKNET, peran HKNET dalam pergerakan demokrasi di RRT, kemudian mengaitkan kemunculan topik di HKNET dengan isu yang ada di RRT.

Kedua: melihat posisi HKNET sebagai media artikulasi identitas dengan memperhatikan konteks situasi sejarah, budaya, dan politik di masa transfer kekuasaan Hongkong ke RRT, yang kemudian dihubungkan dengan konstruksi identitas pengguna HKNET.

Ketiga: menganalisis posting berdasarkan tema-tema yang berhubungan dengan identitas²³ dengan memperhatikan kontestasi wacana. Pada tahap ini, Fung memperhatikan interaksi dan partisipasi pengguna dalam melakukan pendekonstruksian pemaknaan dominan atas identitas mereka sebagai Cina-Hongkong.

Keempat: memaknai aktifitas *online* sebagai suatu bentuk artikulasi identitas dengan memperhatikan relasi kuasa yang berlangsung (kuasa, diskriminasi, dan normalisasi) dalam kontestasi pemaknaan identitas Cina-Hongkong.

Karena itu, model penelitian akan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Internet sebagai arsip data

Data yang dipergunakan dalam analisis adalah:

- **Dari situs FPI:** data yang diambil adalah konten, struktur, dan desain situs. Konten berupa artikel akan dilihat elemen tekstual dan visualnya, sementara dari elemen struktur dan desain situs akan dilihat tata letak, pengelompokan berita dalam kategori, dan tautan.
- **Dari situs berita *online*:** data yang diambil adalah artikel pemberitaan yang berhubungan dengan aksi FPI beserta komentar-komentar atas berita tersebut. Komentar-komentar dipandang sebagai bentuk sebaran pengetahuan dan variasi pemaknaan atas FPI.

Rentang dan pengelompokan data:

Data diambil berdasarkan rentang waktu tertentu dan memperhatikan konteks-konteks sejarah dan wacana yang muncul pada rentang waktu tersebut. Karena itu, data konten artikel di situs FPI dan pemberitaan dalam tiga situs berita *online* dibatasi dalam satu rentang waktu pemberitaan. Dalam hal ini, diambil artikel dan pemberitaan dari rentang waktu Januari 2011 sampai dengan Desember 2011. Dipilihnya rentang waktu ini adalah karena sepanjang tahun 2011 terdapat beberapa pemberitaan aksi FPI yang cukup mendapat perhatian media dan publik, seperti: perusakan patung-patung di beberapa daerah, aksi penolakan penayangan

²³ dalam konteks Fung, *ambivalence identity* Cina-Hongkong terletak di tengah kontestasi antara: identitas migran (USA), identitas nasional (Hongkong), dan identitas etnis (RRT).

film “?”, kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah, razia tempat-tempat hiburan dan penjual miras, kekerasan terhadap waria, dan beberapa aksi kekerasan lainnya²⁴.

Tahapan Analisis

Analisis akan mengikuti model penelitian Fung dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, penelitian akan menelaah konstruksi identitas FPI di dalam situs resminya, yaitu pada cara FPI direpresentasikan di dalam fpi.or.id dengan memperhatikan struktur dan desain situs.

Kedua, penelitian akan menelaah konteks wacana sekitar FPI. Pada tahap ini artikel dalam fpi.or.id, pemberitaan di tiga situs *online*, dan komentar pengunjung situs terhadap pemberitaan mengenai FPI akan dianalisis dengan memperhatikan wacana yang mengonstruksi pemaknaan atas FPI. Dalam hal ini, pencarian dan pembuktian atas kebenaran isi komentar bukan menjadi fokus analisis. Komentar-komentar tersebut dipandang sebagai konstruksi pengetahuan dan pemaknaan atas FPI.

1.7 Sistematika Penyajian

Penelitian akan disajikan dalam urutan sebagai berikut: BAB 1 membahas latar belakang masalah. Di bab ini dipaparkan latar-latar dan konteks, rumusan masalah, penelitian sebelumnya, teori, dan metode penelitian. Selanjutnya, BAB 2 membahas konteks dan latar radikalisme dalam konteks masyarakat jaringan beserta kaitannya dengan unsur budaya, media, dan identitas. BAB 3 berisi pembahasan atas konstruksi identitas FPI di ruang maya dan kaitannya dengan kontestasi wacana radikalisme Islam. BAB 4 berisi kesimpulan.

²⁴ Daftar aksi bisa ditemukan di situs berita *online* tempo.co pada halaman “Sepak Terjang FPI” <http://www.tempo.co/read/flashgrafis/2012/02/15/448/Sepak-Terjang-FPI?page=3> (diakses pada 10 Maret 2012).

BAB 2
LATAR DAN KONTEKS
Masyarakat Jaringan dan Kaitannya dengan Gerakan Radikalisme Islam

2.1 Pengantar

Dalam bab ini saya merunut konteks masyarakat jaringan (*network society*) dan hubungannya dengan gerakan radikalisme Islam di Indonesia. Pembahasan Castells mengenai konstruksi identitas dan hubungannya dengan konteks masyarakat jaringan¹ serta pembahasan Hassan mengenai hubungan antara media, identitas, dan politik² akan menjadi sumber acuan utama dalam pemaparan mengenai masyarakat jaringan dan radikalisme Islam. Sebelum melangkah ke paparan teoritis, berikut ini adalah beberapa ilustrasi yang bisa memberikan gambaran awal mengenai kaitan antara masyarakat jaringan dan gerakan radikalisme Islam.

Dalam pemberitaan dan liputan media mengenai aksi-aksi teror jaringan teroris di Indonesia maupun aksi penangkapan para pelaku teror, ada beberapa detail yang menarik untuk dicermati, misalnya pada pemberitaan penyerapan Dulmatin, anggota teroris, di Tangerang Banten. Di dalam situs berita *online* tempo.co disebutkan: “Pria asal Pematang Jaya Jawa Tengah ini dicari kepolisian berbagai negara sejak delapan tahun lalu karena terlibat dalam pengeboman di Kuta, Bali. Dia tertembak di lantai dua bilik sembilan warung internet itu, dengan menggenggam sepucuk revolver” (“Polisi Incar Dulmatin”, 2010)³. Kemudian, dalam berita penangkapan teroris di Sumedang, terlihat juga kemiripan pola pemberitaan: “Densus 88 langsung mengepung warnet yang berlokasi di pinggir jalan tersebut. Selain mengamankan seorang penjaga warnet, Densus juga mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya CPU. Penggerebekan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu kontan membuat kaget masyarakat sekitar”

¹ Castells, Manuel. (2010). *The Power of Identity*. Second. Blackwell.

² Hassan, Robert. (2003). *Media, Politics and the Network Society*. Open University Press.

³ Diambil dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/03/10/064231569/Polisi-Incar-Dulmatin-Dua-Malam-Sebelum-Penggerebekan> (diakses pada 10 Maret 2011).

(“Densus 88”, 2012)⁴ .

Bila diperhatikan, kedua berita tersebut mengambil latar peristiwa penangkapan yang sama: di warnet. Warnet yang selama ini merupakan ruang publik untuk mengakses jaringan Internet dan terhubung ke dunia maya, ternyata juga merupakan titik akitifitas jaringan teroris. Ketika isu undang-undang anti pornografi menuai pro dan kontra di masyarakat, keberadaan anggota teroris di warnet tentunya memunculkan anomali tersendiri. Warnet yang sering dituding sebagai salah satu tempat untuk mengakses konten-konten pornografi, ternyata juga salah satu tempat aktifitas jaringan teroris. Dua aktifitas yang berseberangan namun berada dalam ruang yang sama: warnet dan Internet, dengan menggunakan produk budaya yang sama: komputer dan teknologi jaringan.

Dari bilik dan sekat warnet ini bisa ditarik suatu gambaran lain dari kompleksitas aksi-aksi teror dan gerakan radikalisme Islam di ruang publik Indonesia. Ketika pintu-pintu perbatasan wilayah Indonesia terkesan dijaga dengan ketat untuk mencegah mobilitas jaringan teroris global, dengan mudahnya, dari bilik warnet, seorang teroris melintasi ruang negara-bangsa, menjalin komunikasi dengan anggota teroris lain di: Afghanistan, Pakistan, Irak, ataupun kantung-kantung teroris lainnya, untuk merencanakan aksi-aksi teror mereka terhadap titik-titik (*nodes*) jaringan kapitalisme global. Terlihat bahwa mobilitas pergerakan teroris bukan saja terjadi secara *offline* namun juga secara *online*. Kemunculan situs-situs yang berasosiasi dengan gerakan teroris dan radikalisme Islam, ataupun *videotaping* pernyataan pelaku bom bunuh diri dan perlawanan Taliban/Al-qaida melawan tentara Amerika di Afghanistan dalam Youtube mengindikasikan bahwa ruang maya merupakan salah satu ruang juang dan perlawanan bagi para teroris ataupun aktifis Islam radikal. Hal ini mengindikasikan pula bahwa akses pada jaringan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi gerakan teroris maupun radikalisme Islam.

⁴ Dalam *Koran Jakarta* edisi digital dengan judul berita “Densus 88 Tangkap Penjaga Warnet” (2012, 23 Maret) diambil dari <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/86651> (diakses pada 10 Maret 2011).

Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa jaringan dan aktifitas dalam jaringan (*online activity*) dalam pembahasan mengenai radikalisme Islam di ruang publik Indonesia kontemporer merupakan isu penting untuk dijadikan konteks pembahasan. Karena itu, dalam subbab-subbab berikut konteks-konteks yang melatari hadirnya masyarakat jaringan dan kaitannya dengan radikalisme Islam saya paparkan lebih jauh. Pertama dengan memaparkan landasan-landasan teoritis terhadap kebangkitan masyarakat jaringan beserta kaitannya dengan konteks globalisasi, kapitalisme, dan teknologi. Kemudian pemaparan dikaitkan dengan konteks yang terjadi dan berada dalam ruang lansekap Indonesia.

2.2 Bangkitnya Masyarakat Jaringan

Pada awal millennium ketiga, 2001 merupakan titik balik pemaknaan terhadap kapitalisme global dan konteks budaya pascamodern. Runtuhnya WTC pada 11 September 2001 menjadi titik balik penandaan dan pemaknaan terhadap konsep peradaban, modernitas, maupun konteks liberalisme ekonomi dalam sistem kapitalisme global. ‘Tragedi’ yang dimaknai Eagleton (2009) sebagai konteks yang mempertemukan “*Western civilization*” dengan “*Islam fundamentalism*” dalam konfrontasi langsung.

Eagleton (2009) dan Castells (2010) menekankan bahwa fundamentalisme bukan saja berlangsung di belahan dunia Islam saja. Menurut keduanya⁵, gerakan-gerakan fundamentalisme juga terjadi dan tumbuh di negara-negara yang menganut sistem sekular. Castells menunjukkan bahwa gerakan fundamentalisme dan radikalisme Kristen di Amerika Serikat merupakan gerakan yang juga mewarnai sejarah dan budaya Amerika (p. 23-29).

Baik Castells maupun Eagleton, dalam hal ini, memaknai kemunculan fundamentalisme tidak terlepas dari kegagalan proyek modernisasi yang berpusat pada satu logika rasionalitas *enlightenment* yang dimaknai sebagai nilai-nilai universal dan menjadi acuan tunggal dalam memberikan pemaknaan terhadap realitas yang beragam, khas, dan spesifik. Castells mengidentifikasi hal ini

⁵ Eagleton dalam pembahasannya dalam “*Culture & Barbarism : Metaphysics in a Time of Terrorism.*” (2009), sementara Castells dalam pembahasan mengenai *God’s Planet* dalam *The Power of Identity* (2010).

sebagai kesalahan dari globalisasi yang memaksakan suatu logika pasar keuangan (ekonomi neoliberal) serta jaringan produksi dan perdagangan multinasional ke seluruh sistem kehidupan dan melintasi batasan negara-bangsa (p. xxxv). Sehingga, konsekuensinya, adalah munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap dominasi sistem ekonomi kapitalisme global dengan berbagai macam bentuk dan cara perlawanan.

Kunci dari pernyataan Castells tersebut bisa dilihat pada adanya kontestasi antara konteks global dan lokal, modernitas dan tradisi, ataupun universalisme dan kekhasan. Kontestasi ini bisa terlihat berlangsung dalam situs pemaknaan terhadap identitas. Pemaknaan identitas diarahkan pada pentingnya artikulasi identitas yang essensialis, fundamental, atau bahkan radikal, yang dalam konteks ini merupakan suatu bentuk resistensi terhadap dominasi kekuatan kapitalisme global. Dalam istilah Castells sebagai bentuk *resistance identity*; suatu bentuk identitas yang muncul sebagai reaksi terhadap dominasi (p. 8), sehingga resistensi, perlawanan dengan kekerasan dan terror menjadi suatu artikulasi 'logis'.

Berdasarkan penafsiran Castells maupun Eagleton terhadap fundamentalisme dan terorisme di atas, terlihat bahwa keduanya menempatkan fundamentalisme dan terorisme ke dalam aspek budaya dengan identitas sebagai situs pergulatan kuasa dan pemaknaan. Pergulatan ini tidak bisa dilepaskan dari narasi globalisasi yang menempatkan ruang dan waktu dalam bentuknya yang termampatkan (Harvey, 1992). Di satu sisi, globalisasi menciptakan adanya kontestasi antara konsep waktu yang mengarah pada lini waktu pra modern (*regress*) dengan lini waktu yang selalu mengarah ke depan (*progress*). Namun, di sisi lain, globalisasi juga menciptakan suatu interkoneksi (*interconnectivity*) antara ruang dan waktu yang berbeda; membentuk suatu jejaring yang melintas batas ruang dan waktu. Dalam istilah Appadurai (2002), globalisasi memungkinkan terjadinya "*flows of the scapes*" (*ethnoscape, ideoscape, technoscape, financescape, and mediascape*). Dalam hal ini, baik fundamentalisme ataupun kapitalisme global bisa dilihat sebagai contoh bagaimana aliran dan arus etnisitas, ideologi, media, teknologi, dan finansial melewati batas ruang dan wilayah.

Jejaring dan interkoneksi adalah yang kemudian bisa dilihat sebagai salah satu fitur penting ketika meletakkan permasalahan fundamentalisme dan terorisme dalam konteks globalisasi. Baik itu terorisme global ataupun kapitalisme global, dalam konteks ini, dimaknai dan dianggap beroperasi dalam suatu jejaring. Terorisme Islam, misalnya, dipahami sebagai bentuk jejaring (Al-Qaidah, Taliban, Jemaah Islamiyah) yang anggotanya tersebar dan beroperasi di seluruh dunia. Demikian pula dengan kapitalisme global yang dipandang beroperasi lintas wilayah. Castells (2004) memaknai konteks jejaring dan interkoneksi ini sebagai salah satu fitur masyarakat pasca-industri yang disebutnya sebagai “*a network society*”. Menurut Castells, dalam sistem jejaring ini, yang mengikat bagian-bagian jaringan (*the nodes*) adalah adanya suatu kode yang dibagi dan dipahami bersama. Kode ini bila dikaitkan dengan konteks budaya menunjukkan suatu sistem representasi dan pemaknaan⁶. Dalam hal ini jejaring dan interkoneksi bisa dibaca sebagai situs produksi dan sirkulasi makna.

2.3 Masyarakat Jaringan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Kapitalisme

Kemunculan masyarakat jaringan tidak bisa dipisahkan dari adanya proses globalisasi, kapitalisme, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hassan (2003), dalam pembahasannya mengenai media, identitas, dan politik menyetujui bahwa jaringan bukan saja berhubungan dengan aspek teknologi (TIK) namun juga berhubungan dengan aspek sosial, budaya, dan politik. Menurutnya, Internet adalah bagian dari kemajuan teknologi informasi dengan kemunculan masyarakat jaringan sebagai konsekuensinya, yang tidak bisa dipisahkan dari kapitalisme (p. 18). Dalam hal ini, penciptaan teknologi informasi dipandang sebagai alat yang akan membantu efektifitas dan produktifitas sistem produksi, konsumsi, dan distribusi dalam mata rantai sistem ekonomi neo-liberal yang diusung oleh kapitalisme global. Hassan mengategorikan pola hubungan antara masyarakat jaringan, teknologi informasi dan komunikasi, dan

⁶ Dalam istilah dan definisi yang dikemukakan Hall dalam *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (1997).

kapitalisme global tersebut dalam suatu ruang lingkup yang berkaitan, yang disebutnya sebagai ruang lingkup digital (*digitalscape*) (p. 15). Ruang lingkup digital tersebut melingkupi teknologi digital (*digital technology*), kapitalisme digital (*digital capitalism*), globalisasi digital (*digital globalization*), dan akselerasi digital (*digital acceleration*).

Teknologi Digital

Teknologi digital menurut Hassan tidak terlepas dari suatu logika digital. Logika tersebut menempatkan rasionalisasi dan instrumentalisasi bentuk-bentuk komunikasi yang diarahkan pada suatu mekanisme yang tidak bisa memberikan toleransi kepada faktor-faktor kesalahan manusia (p. 17). Dalam hal ini, penggunaan peralatan digital dalam kehidupan keseharian kita bisa menjadi contoh. Dengan menggunakan logika bahasa biner “ya” atau “tidak” (dalam bahasa mesin direpresentasikan oleh angka 1 dan 0) peralatan digital memberikan instruksi pengoperasian, seperti menu perintah dalam telepon genggam ketika akan mengirimkan pesan (kirim atau tidak), atau menu perintah untuk mematikan dan menghidupkan. Tanpa memberikan alasan mengapa dan bagaimana caranya, peralatan digital dengan sendirinya hanya menawarkan alternatif pilihan “ya” atau “tidak” sebagai basis perintahnya. Atau, contoh lain yang tidak kita sadari adalah tampilan teks dan kertas di layar Microsoft Word; gambar digital, audio/video, dan teks-teks yang dilihat di browser Internet. Bila diperhatikan bahasa pemrogramannya, tampilan-tampilan tersebut merupakan hasil simulasi dari komputasi angka-angka 1 dan 0⁷.

Namun demikian, tentunya kompleksitas rangkaian program digital ini bukanlah yang diinginkan oleh pengguna. Tentunya, produk digital inipun menawarkan suatu keefektifitasan dan kemudahan penggunaan. Contoh-contoh inilah yang diistilahkan Hassan sebagai suatu “*technological determination*” karena teknologi menentukan dan mengontrol manusia untuk melaksanakan perintah-perintah dan melihat satu realitas tertentu. Di sini terlihat bahwa teknologi digital bukanlah suatu instrumen belaka, namun juga merupakan suatu

⁷ Untuk melihat bagaimana logika ini berjalan, kunjungi tautan ini http://www.youtube.com/watch?v=NLIgopyXT_g

representasi ideologi. Determinasi teknologi-ideologis inilah yang merupakan salah satu karakteristik masyarakat jaringan.

Kapitalisme Digital

Hassan menyebutkan bahwa Internet dan masyarakat jaringan tidak mungkin ada tanpa adanya kapitalisme (p. 18). Pernyataan Hassan ini didasari oleh penelaahannya atas konteks sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perkembangan Internet dan jaringan pada era 1970-1980. Internet yang semula dikembangkan di lab militer untuk tujuan pengawasan terhadap ancaman dan serangan Uni Soviet beserta negara komunis lainnya, namun pada perkembangan berikutnya Internet diperkenalkan sebagai bagian dari konsumsi publik dan menjadi bagian dari keseharian.

Hal ini, menurut Hassan, secara paralel berhubungan dengan perubahan struktur ekonomi kapitalis yang terjadi pada era yang sama. Struktur ekonomi kapitalis yang semula berpatokan pada model produksi *Fordism*, yang menekankan pada produksi alat-alat berat, manufaktur, dan baja dengan sistem regulasi pemerintah yang ketat pada 1970-1980an, mengalami perubahan ke sistem ekonomi neo liberal yang menekankan pada ekonomi pasar dan deregulasi kebijakan (p. 19). Dalam orientasi ekonomi yang berpatokan pada pasar, secara logis para produsen dan pelaku industri akan berusaha untuk mencari cara yang terbaik dan efektif untuk menjangkau pangsa pasar, dalam hal ini konsumen yang akan menggunakan produk mereka.

Dalam konteks ini, penggunaan jaringan Internet untuk menjangkau konsumen lebih luas melintasi batas wilayah dipandang sebagai cara terbaik dan efektif. Maka, usaha-usaha untuk menyatukan dunia dalam jaringan Internet menjadi salah satu tujuan utama. Karenanya, ketika kemudian pengembangan dan infrastruktur jaringan Internet berpindah dari lab militer dan universitas ke lembaga riset perusahaan telekomunikasi dan komputer, Hassan memandang konteks ini sebagai suatu proses untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sistem ekonomi neoliberal.

Globalisasi Digital

Kebutuhan penetrasi pasar pada segala aspek kehidupan mendorong terciptanya suatu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa melintasi batas wilayah negara-bangsa. Hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu konvergensi teknologi digital untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi kapitalis global (p. 23). Berkenaan dengan hal ini, bagi Hassan, globalisasi ekonomi yang dibarengi dengan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi merupakan penggerak globalisasi politik maupun budaya.

Dalam hal ini, Hassan memandang ekonomi dan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi sebagai pemicu percepatan globalisasi secara intensif dan ekstensif: secara intensif menghadirkan dunia komersil ke setiap individu dan secara ekstensif memastikan bahwa semua orang di penjuru dunia akan mengalami dan merasakan hal yang sama (p. 26). Namun demikian, universalisasi ini, di satu sisi, menciptakan suatu bentuk keseragaman praktik dan konsumsi budaya, namun di sisi lain, juga memunculkan perlawanan terhadapnya. Munculnya *friedchicken* lokal yang terkesan meniru “*friedchicken*” McD atau KFC misalnya, dengan harga yang lebih murah berusaha ‘menyaingi’ “*friedchicken*” ‘asli’ McD atau KFC. Walaupun terkesan meniru dan dengan sasaran pasar yang berbeda, munculnya ragam-ragam *friedchicken* bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap standarisasi *friedchicken* McD dan KFC yang telah membentuk selera dan cita rasa “ayam goreng tepung”. Bila dikaitkan dengan pendapat Hassan, fenomena perlawanan ini merupakan paradoks dari keseragaman yang dibawa oleh globalisasi (p. 26). Ketika lokal berusaha menyaingi global, bentuk-bentuk dan representasi yang dipergunakan tidak bisa terlepas dari elemen-elemen global: seperti penggunaan tepung untuk ayam goreng, model dan kotak kemasan, sampai pada model waralaba dalam sistem penjualannya. Demikian pula sebaliknya, ketika yang global berusaha untuk menghadirkan dan merepresentasikan produknya, elemen-elemen lokalitas terlihat berusaha dimasukkan ke dalamnya⁸. Konteks lokal-global dan global-lokal inilah yang juga merupakan salah satu karakteristik masyarakat jaringan.

⁸ Penggunaan nasi dalam menu sajian McD ataupun KFC

Percepatan Digital

Kecepatan dan percepatan merupakan salah satu karakteristik yang melatari masyarakat jaringan. Dalam logika kecepatan dan percepatan ini, seluruh aktifitas dan kehidupan masyarakat jaringan harus berjalan dan berganti dengan secepat-cepatnya. Contoh sederhana, misalnya, adalah ketika mengakses atau mengunduh data dari Internet, faktor kecepatan akses dan unduhan menjadi faktor utama bagi kita, yang sering terekspresikan dalam ujaran “koneksi lola”⁹ (*loading* lambat). “Lola” dan “tidak lola” seakan menjadi penanda kebutuhan kita akan akses kecepatan.

Hassan mengaitkan kebutuhan akan kecepatan dan percepatan ini dengan konteks pergerakan informasi di dalam masyarakat jaringan (p. 27-30). Kebutuhan ini merupakan efek dari sistem ekonomi neoliberal yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi. Keterlambatan dan ketidaktepatan dipandang sebagai tidak efisien dan merupakan suatu kelemahan dalam persaingan global. Kebutuhan akan percepatan ini kemudian menciptakan suatu temporalitas baru yang bergerak dengan cepat bagi masyarakat jaringan.

2.4 Masyarakat Jaringan, Identitas Kolektif, dan Perlawanan

Dalam subbab ini dipaparkan konteks masyarakat jaringan dan konstruksi identitas kolektif dalam perlawanan terhadap orde dominan. Karena itu, pemaparan Castells akan menjadi landasan teoritis.

Castells, dalam *Power of Identity* (2010), mengemukakan bahwa fenomena budaya, sosial, dan politik yang mewarnai awal abad ke-dua puluh satu adalah munculnya gerakan-gerakan sosial lintas batas negara-bangsa dengan mengusung identitas kolektif, baik itu identitas agama, identitas budaya, identitas politik, maupun identitas seksual. Menurutnya, kemunculan masyarakat jaringan dan bangkitnya kuasa identitas tersebut memberikan suatu pemaknaan baru terhadap proses globalisasi, kekuatan geopolitik, dan transformasi sosial yang berlangsung pada abad ke-dua puluh satu (p. xvii). Dominasi dan hegemoni kapitalisme global dengan kekuatan ekonomi neoliberal, yang dianggap sebagai kekuatan dominan yang tak terbantahkan, dilawan oleh kekuatan-kekuatan

⁹ *Loading* lambat

berjejaring lintas batas negara-bangsa yang menghancurkan titik-titik (*nodes*) kekuatan kapitalisme global. Puncak dan titik balik perlawanan ini adalah dengan meletusnya peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut, bagi Castells, merupakan suatu bukti adanya suatu gerakan kolektif yang disasarkan untuk mengubah nilai-nilai dan institusi dominan dengan mengatasmakan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bermakna bagi para pelaku gerakan perlawanan (p. 109).

Bila diperhatikan lebih jauh, peristiwa tersebut sekaligus membuktikan dan menepis anggapan bahwa agama dan Tuhan telah mati dalam arus sekularisasi dan modernisasi. Dalam konteks ini, terlihat bahwa fundamentalisme, dengan mengusung identitas agama, merupakan kekuatan yang bisa menggerakkan perlawanan kolektif terhadap dominasi kapitalisme global. Bila mengacu pada pendapat Castells, munculnya agama sebagai kekuatan perlawanan tidak terlepas dari adanya kekecewaan masyarakat dunia, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh arus globalisasi, terhadap janji-janji yang ditawarkan oleh kapitalisme dan demokrasi (p. xxi). Dalam hal ini, agama merupakan jawaban alternatif terhadap permasalahan budaya, ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam konteks kebangkitan fundamentalisme Islam secara global, Castells menyebutkan bahwa kebangkitan identitas Islam secara global berlangsung pada era 1970an, yang bertepatan dengan kebangkitan revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan restrukturasi ekonomi Amerika Serikat. Kebangkitan ini ditandai dengan munculnya tiga revolusi di belahan dunia Islam: revolusi Iran, Mesir, dan Algeria.

Dalam pergerakan dan revolusi Islam tersebut, identitas Islam fundamental dan radikal menjadi pusat rekonstruksi dan proyek identitas Islam. Bila memperhatikan pemaparan-pemaparan Castells (p. 13-23), bisa diimplikasikan bahwa dalam rekonstruksi identitas Islam tersebut, posisi dan kedudukan negara (*Al-Watan*), umat (*Al-Ummah*), dan penegakan syariat merupakan hal yang penting. Dalam sudut pandang Islam fundamental dan radikal, kedudukan negara berposisi di bawah kepentingan dan keselamatan umat. Kedudukan syariat dan aturan hukum fikih menjadi pengikat umat dalam suatu konsepsi *Daulah Islamiyah*.

Bila dikaitkan dengan konsep modern mengenai negara, konsepsi *Daulah Islamiyah* yang dipahami oleh kaum fundamentalis tentunya bertentangan antara satu sama lain. Ketika konsep negara modern menempatkan identitas nasional yang berpatokan pada teritori tertentu sebagai narasi pemersatu, namun dalam konteks *Daulah Islamiyah*, identitas nasional tersebut harus tunduk pada identitas agama yang melintasi ruang batas teritori negara-bangsa. Dengan kata lain, konsep identitas agama yang diusung oleh gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam tersebut merupakan suatu konsep global yang mengikat dan menyatukan seluruh bangsa di dunia dalam satu jaringan pemaknaan *Al-Ummah*, yakni suatu konsepsi yang bisa dilihat sebagai upaya untuk menciptakan suatu masyarakat jaringan lintas-batas negara-bangsa (*Al-Ummah*).

Menurut Castells, bentuk-bentuk proyeksi identitas yang dimunculkan oleh gerakan fundamentalisme Islam merupakan suatu konstruksi identitas Baru (p. 17). Hal ini disebabkan karena konsepsi identitas yang dimunculkan oleh gerakan fundamentalisme Islam berbeda dengan konsep-konsep identitas Islam tradisional. Ciri yang mendasar adalah pada posisi penafsiran atas ajaran Al-Quran dan Hadist dan legalisasi bentuk-bentuk penafsiran tersebut ke dalam hukum yang mengatur kehidupan umat. Dalam hal ini, Islam tradisional lebih menekankan pada konteks sosial-budaya dalam menafsirkan syariat dan penerapan hukum fikih, berbeda dengan penafsiran kelompok Islam fundamentalis yang menekankan pada kesatuan antara syariat dan fikih dalam kehidupan umat (Castells, 2010).

Dalam hal ini, kemunculan gerakan fundamentalisme Islam tidak terlepas dari proses globalisasi yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai masyarakat tradisional yang diperparah oleh kegagalan kaum nasionalis dalam menjalankan peran negara sebagai pelindung umat. Untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan kapitalisme global yang datang dari luar umat (kaum Salibi dan Yahudi) maupun dari dalam umat (kaum munafik), kelompok Islam fundamentalis merekonstruksi identitas Islam dan menghadirkan suatu identitas perlawanan (*resistance identity*). Dalam hal ini, jaringan Islam global yang direpresentasikan oleh gerakan jaringan Al-Qaidah merupakan contoh artikulasi identitas perlawanan kelompok Islam fundamental dan radikal.

Dari analisis Castells terhadap gerakan jaringan Al-Qaidah (p. 72-73), ada beberapa isu penting yang bisa dipergunakan dalam menganalisis gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam dalam konteks masyarakat jaringan.

Pertama : pergerakan sosial harus dipahami dalam artian sebagai pergerakan sosial itu sendiri. Dalam hal ini, Castells mengemukakan bahwa langkah analisis yang ditempuhnya adalah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing pergerakan dalam konteks dinamika tiap-tiap pergerakan tersebut; kemudian memperhatikan interaksi gerakan tersebut dengan konteks yang lebih luas dan mempengaruhi kemunculan pergerakan tersebut.

Kedua : pergerakan sosial bisa merupakan suatu gerakan yang konservatif, revolusioner, ataupun bukan keduanya. Dalam konteks ini, Castells memandang pergerakan yang ada merupakan gejala dari kehidupan sosial dan memengaruhi struktur sosial dengan intensitas yang bervariasi.

Ketiga : mengategorikan pergerakan sosial tersebut ke dalam tiga prinsip : 1) identitas pergerakan, 2) lawan atau musuh pergerakan tersebut, dan 3) tujuan gerakan tersebut bagi kehidupan sosial /masyarakat.

Ketiga isu ini akan saya pergunakan dalam analisis di bab berikutnya (BAB 3)

2.5 Konteks Masyarakat Jaringan dalam Lansekap Ruang Publik Indonesia

Bila dikaitkan dengan pemberitaan tentang penangkapan teroris di warnet seperti dipaparkan pada awal BAB 2, kompleksitas konteks-konteks masyarakat jaringan yang disebutkan pada subbab-subbab sebelumnya bisa terangkum dengan jelas. Dalam hal ini, pemberitaan tentang penangkapan anggota teroris bisa dilihat sebagai suatu representasi dan gambaran utuh kompleksitas masyarakat jaringan dalam konteks ruang publik Indonesia. Dari pemberitaan tersebut, bisa dilihat elemen material budaya yang berhubungan dengan konteks masyarakat jaringan: warnet, PC, dan jaringan Internet. Selain itu, praktik-praktik budaya, sosial, dan politis yang berkaitan dengan masyarakat jaringan bisa juga terlihat dengan adanya aktifitas dalam jaringan (*online activity*), keberadaan anggota jaringan teroris, densus 88, publik, dan media. Berangkat dari konteks-konteks ini pada subbab-subbab berikut saya uraikan konteks masyarakat jaringan di ruang publik Indonesia.

2.5.1 Masyarakat Jaringan dari Bilik Warnet

Keberadaan warnet di ruang publik Indonesia bisa dilihat sebagai miniatur kompleksitas dan keberkaitan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kapitalisme global dalam lansekap ruang publik Indonesia. Bila diperhatikan komponen-komponen utama warnet, seperti PC, monitor, *software*, dan perangkat jaringan yang menghubungkan komputer-komputer ke jaringan Internet terlihat bahwa warnet merupakan perwujudan dari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan publik Indonesia.

Bila diperhatikan lebih jauh lagi, penggunaan nama warnet yang merupakan gabungan unsur lokalitas (warung) dan global (*net/network*) serta aktifitas dalam jaringan yang berlangsung di dalamnya, menunjukkan bahwa warnet merupakan tempat mengalirnya transaksi dan mobilitas budaya, ekonomi, teknologi, sosial, dan ideologi lintas batas wilayah negara-bangsa.

Merunut sejarah keberadaan warnet di ruang publik Indonesia, 1995 merupakan tahun ketika warnet pertama kali diperkenalkan kepada publik. Hadirnya warnet pertama, BONANET¹⁰ di Bogor, merupakan momentum awal dari lahirnya warnet di Indonesia. Sebenarnya, pada awal 1990an Internet sudah mulai dipergunakan oleh masyarakat kampus seperti UI dan ITB, serta lembaga penelitian LAPAN dan BPPT. Namun demikian, kehadiran warnet pertama ini merupakan penanda bagi terbukanya akses Internet bagi publik.

Apabila memperhatikan tahun masuknya jaringan Internet ke Indonesia, terlihat bahwa perkembangan Internet di Indonesia tidak terlepas dari konteks komersialisasi akses Internet di Amerika yang juga berlangsung dalam rentang dekade 1990an¹¹. Dengan kata lain, masuknya Internet ke Indonesia tidak terlepas dari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem ekonomi neoliberal yang berlangsung di Amerika, atau dalam istilah Hassan, dalam

¹⁰ Data mengenai sejarah Internet dan perkembangannya di Indonesia diambil dari wiki yang dikelola oleh telkomsepeedy. Sebagian besar konten dalam wiki ini merupakan hasil penelitian *Social Construction of Technology Research Group* yang dipublikasikan untuk publik dan di-port dalam situs berikut

http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Sejarah_Internet_Indonesia.

¹¹ Bisa dilihat pada pemaparan Hassan dalam *Media, Politics and the Network Society* (2003) halaman 14-15.

pemaparan subbab sebelumnya, kehadiran Internet di Indonesia tidak terlepas dari ruang lingkup digital (*digitalscape*).

Kehadiran warnet di ruang publik Indonesia tidak terlepas pula dari perkembangan teknologi digital lainnya. Selain berhubungan dengan perkembangan teknologi jaringan, keberadaan warnet berhubungan juga dengan perkembangan teknologi komputasi digital, dalam hal ini dengan dikenalnya PC oleh masyarakat Indonesia. Masuk dan dikenalnya PC di Indonesia pun tidak terlepas dari dikenalkannya penggunaan komputer bagi publik luas pada 1981. Pada saat itu, di Amerika, produsen komputer melakukan suatu revolusi penggunaan komputasi digital. Komputer pada awalnya hanya bisa dipergunakan di industri-industri besar, militer, ataupun insitusi penelitian pemerintah dan kampus. Dengan diperkenalkannya PC, sistem komputasi digital memasuki ruang khalayak yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, 1981 pun merupakan tahun mulai dipasarkannya PC di Indonesia.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa, dalam konteks ruang publik Indonesia, keberadaan warnet tidak bisa dilepaskan dari konteks-konteks yang melatari terbentuknya masyarakat jaringan. Akan tetapi, keberadaan anggota teroris di bilik Internet tentunya membutuhkan penjelasan lain terkait fungsi keberadaan warnet dan aktifitas dalam jaringan di bilik warnet.

2.5.2 Jaringan *Offline* dan *Online*

Dalam paparan-paparan Hassan (2003) dan Castle (2010) mengenai masyarakat yang telah saya kemukakan sebelumnya, bisa disarikan bahwa pemaknaan jaringan dan masyarakat jaringan bukan saja terbatas pada aktifitas atau hal-hal yang berhubungan dengan Internet atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemaknaan jaringan dan masyarakat jaringan juga mengacu pada adanya suatu *shared code* yang dipahami bersama. Dalam konteks fundamentalisme dan radikalisme Islam, identitas Islam sebagai identitas perlawanan (*resistence identity*) terhadap kapitalisme global merupakan *shared code* yang dimiliki bersama.

Namun demikian, berita penangkapan anggota teroris di warnet dan sorotan media sekitar isi laptop Noordin M Top¹² menunjukkan bahwa kedua pemaknaan terhadap jaringan dan masyarakat jaringan saling berkaitan dalam memberikan pemaknaan terhadap gerakan-gerakan fundamentalisme Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, baik Castells maupun Hassan, mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi komunikasi sebagai media perlawanan dan pemanfaatannya sebagai ruang proyeksi identitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari gerakan-gerakan fundamentalisme maupun radikalisme Islam.

Senada dengan Hassan dan Castells, Anderson dalam “The Internet and Islam’s New Interpreters” (2003) menyebutkan bahwa Internet bagi para aktifis-aktifis Islam merupakan suatu ruang dan media untuk menginterpretasi ulang Islam dan identitas Islam (p. 74). Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari kondisi lingkungan jaringan (*network environment*) Internet yang memungkinkan untuk melewati institusi-institusi media massa yang cenderung menghadirkan berita tak berimbang mengenai Islam, ataupun untuk menghindari rangkaian sensor pemberitaan yang dilakukan oleh pemerintah yang cenderung represif terhadap gerakan-gerakan fundamentalisme dan radikalisme.

Dalam konteks ruang publik Indonesia, kemunculan jaringan fundamentalisme dan radikalisme Islam baik secara *offline* maupun *online* tidak terlepas dari konteks kejatuhan rejim Orde Baru pada 1998¹³. Pasca-kejatuhan rejim Orde Baru, muncul beberapa organisasi-organisasi Islam fundamentalis dan radikal yang mengusung identitas Islam, seperti FPI, FKAWJ, dan FUI. Organisasi-organisasi tersebut membentuk jaringan-jaringan di wilayah Indonesia bahkan, sebagian dari kelompok ini, seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan

¹² Bisa dilihat dalam pemberitaan di detik.com dengan judul berita “Isi Laptop Noordin: Ada Video Dani & Nana Survei di Depan Hotel Marriot”
<http://news.detik.com/read/2009/09/29/152611/1211167/10/isi-laptop-noordin-ada-video-dani-nana-survei-di-depan-hotel-marriott> (diakses pada 10 Maret 2011) atau di vivanews.com dengan judul berita “Polri Beberkan Isi Laptop Noordin M Top”
<http://nasional.vivanews.com/news/read/92867-polri-beberkan-isi-laptop-noordin-m-top> (diakses pada 10 Maret 2011).

¹³ Bisa dilihat dalam pemaparan saya pada BAB 1

Jemaah Islamiyah¹⁴ menjalin hubungan lintas-batas negara-bangsa dengan jaringan Islam fundamentalis dan radikal lainnya seperti Al-Qaidah dan Taliban.

2.5.2.1 Jaringan *Offline*

Dalam penelitian terhadap gerakan dan kelompok Islam radikal, Fealy (2004) dan SETARA Institute (2010) menyebutkan bahwa di tengah keragaman kelompok dan gerakan Islam radikal, ada enam kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok Islam radikal yang sangat berpengaruh. Enam kelompok tersebut adalah Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII), Jemaah Islamiyah (JI), Hizbut Tahrir (HT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jamaah (FKAWJ), dan Front Pembela Islam (FPI).

Baik Fealy maupun SETARA Institute mengemukakan bahwa kelompok Islam radikal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan berusaha untuk melakukan perubahan kehidupan sosial dan politik Indonesia secara dramatis. Dalam hal ini, Fealy secara spesifik menyebutkan empat isu utama yang diusung oleh kelompok Islam radikal tersebut, yang membedakan gerakan Islam radikal dengan kelompok Islam dalam arus utama (p. 106). Implementasi syariat Islam secara komprehensif, bentuk dan konsep negara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan demokrasi merupakan isu utama yang diusung oleh kelompok Islam radikal tersebut.

Dalam isu implementasi syariat Islam, Fealy mengemukakan bahwa kelompok-kelompok Islam radikal tersebut memiliki posisi yang sama (p. 108). Semua kelompok Islam radikal memandang bahwa syariat Islam harus diimplementasikan secara komprehensif dan diformalisasikan ke dalam konstitusi negara. Hal ini tidak terlepas dari keterkaitan ideologis antara kelompok Islam radikal dengan gerakan-gerakan ‘pembaharuan’ dan penyucian Islam yang berlangsung di belahan Timur-Tengah. Gerakan pembaharuan, seperti gerakan ‘Salafi’, varian-varian dari Wahabi, dan kelompok ‘modernis’, disebutkan Fealy (dan Castells) sebagai gerakan yang mempengaruhi ideologi kelompok Islam radikal.

¹⁴ Lihat pembahasan Bräuchler dalam “Islamic Radicalism Online : The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace” (2004) dan “Cyberidentities at War: Religion , Identity , and the Internet in the Moluccan Conflict” (2003).

Dalam konteks Indonesia, penegakan syariat Islam ini diarahkan pada restorasi Piagam Jakarta yang ditafsirkan sebagai bentuk formalisasi syariat Islam ke dalam konstitusi Negara. Namun demikian, perbedaan terlihat ketika restorasi Piagam Jakarta ke dalam konstitusi diarahkan pada perubahan bentuk negara. Fealy mengategorikan perbedaan pandangan ini ke dalam tiga konsep negara. DI/NII memandang bahwa syariat Islam bisa tegak apabila bentuk negara Indonesia diubah menjadi Negara Islam Indonesia. Sementara itu, HTI, JI, MMI memandang bahwa syariat Islam bisa tegak apabila Indonesia diubah menjadi bagian dari Kekhalifahan Islam dunia (*Global Islam*). Berbeda dengan kelompok Islam radikal sebelumnya, FPI dan FKAJWJ memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk yang final. Bahkan, dalam perspektif organisasinya¹⁵, FPI mengemukakan bahwa penegakan syariat Islam diperjuangkan melalui jalur ‘konstitusional’. Namun demikian, apabila kita memperhatikan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI, perjuangan konstitusional ini terlihat menunjukkan hal sebaliknya.

Selain perbedaan di atas, modus operandi kelompok radikal Islam dalam upaya penegakan syariat Islam pun menunjukkan variasi, terutama upaya-upaya penegakan dengan cara kekerasan. Terkecuali HT, kelompok Islam radikal lainnya diidentifikasi Fealy sebagai kelompok radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan tujuannya (p. 109).

Fealy mengategorikan aksi-aksi kekerasan FPI sebagai bentuk aksi dari kelompok *vigilante*, yaitu aksi dari kelompok yang menyasar dan menghentikan aktifitas-aktifitas yang dipandang bertentangan dengan nilai moralitas dan akhlak Islam. Kategori ini terlihat memberikan gambaran tentang aksi kekerasan FPI di ruang publik Indonesia. Bila dikaitkan dengan pernyataan FPI dalam perspektif organisasi, aksi ini merupakan aksi FPI sebagai “Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam...” (“Perspektif Organisasi”, FPI). Bila dikaitkan dengan penelitian SETARA

¹⁵ Bisa dilihat dalam “Perspektif Organisasi” FPI pada tautan berikut <http://fpi.or.id/index.php?p=tentangfpi&mid=1>.

Institute, aksi *vigilante* FPI ini merupakan ciri gerakan kelompok radikal berbasis urban¹⁶.

Sementara itu, aksi kekerasan yang dilakukan oleh FKAWJ dan MMI dikategorikan sebagai aksi kelompok paramiliter, yaitu aksi kekerasan yang dilakukan oleh milisi dan satuan bersenjata untuk membela umat Islam di tengah ancaman fisik dan konflik antara Islam dan non Islam. Dalam hal ini, Laskar Jihad dan Laskar Mujahidin yang diturunkan dalam konflik Ambon dan Maluku merupakan contoh dari bentuk aksi tersebut. Aksi terorisme dikategorikan sebagai aksi yang diarahkan untuk mengancam pemerintah dan publik dengan menggunakan tindakan teror dan ‘pembalasan’ terhadap musuh-musuh Islam. Fealy memasukkan DI/NII dan JI ke dalam kategori ini.

Secara geneologis, Fealy dan SETARA Institute melacak pengaruh DI/NII sebagai ‘cikal-bakal’ dari gerakan radikalisme Islam di Indonesia. DI/NII dipandang sebagai kelompok Islam radikal yang telah ada sejak jaman pra-kemerdekaan. Dalam hal ini, kontrol dan tindakan tegas terhadap DI/NII berlangsung sejak jaman kolonial Belanda, masa pemerintahan Sukarno, sampai dengan Orde Baru. Karena itu, DI/NII dipandang sebagai kelompok Islam radikal yang mempengaruhi gerakan radikalisme Islam lainnya. Salah satu pengaruh yang terindikasikan adalah sebaran keanggotaan dan pemimpin kelompok Islam radikal yang banyak berasal dari mantan anggota DI/NII, seperti dalam keanggotaan dan kepengurusan JI, MII, dan FKAWJ (Fealy, p. 111-114).

Selama Orde Baru berkuasa, gerakan-gerakan kelompok Islam radikal mengalami represi yang cukup kuat. Secara politik represi terlihat dari penyederhanan kehidupan berpolitik dengan mengubah sistem multipartai menjadi dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya¹⁷. Dengan alasan untuk “menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan...” (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3”, 1975), rejim Orde Baru menyederhanakan kompleksitas kehidupan dan aspirasi politik. Dengan sistem politik ini,

¹⁶ Pembahasan lengkap bisa dibaca dalam laporan SETARA Institute (2010) pada bab “Potret Radikalisme di Perkotaan” hal 44-72.

¹⁷ Dalam konteks Orde Baru, Golkar dikategorikan bukan sebagai partai politik.

keterwakilan suara kelompok Islam disederhanakan ke dalam satu partai politik. Dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diposisikan sebagai representasi partai Islam¹⁸.

Namun demikian, posisi PPP pun diarahkan untuk mengikuti kepentingan rejim Orde Baru. Penggunaan azas tunggal Pancasila sebagai azas partai terlihat sebagai upaya untuk mengontrol dan membatasi gerakan ideologis Islam¹⁹. Bentuk kontrol inipun direpresentasikan dalam tataran simbol. Penggantian lambang partai yang semula menggunakan Ka'bah menjadi Bintang²⁰ terlihat sebagai bentuk kontrol Orde Baru terhadap simbolisasi identitas Islam dalam ranah politik.

Selain represi politik, rejim Orde Baru pun menggunakan represi secara militer. Dalam konstelasi kekuasaan rejim Orde Baru, militer diposisikan sebagai alat represi negara dengan cara kekerasan (*Repressive State Apparatus*)²¹ terhadap gerakan-gerakan yang dipandang sebagai gerakan subversif yang mengancam stabilitas dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, gerakan-gerakan pro-demokrasi, Komunisme dan Marxisme, seta gerakan Islam radikal dipandang sebagai gerakan yang berpotensi mengancam stabilitas tersebut. Jaringan pengawasan dan kontrol negara-militer terhadap kehidupan dan ruang publik tersebar dan termanifestasikan dengan keberadaan Koramil, Kodim, dan Babinsa di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menciptakan kondisi stabilitas nasional dalam pengawasan dan kontrol militer.

Tragedi Tanjung Priok pada 1984 merupakan salah satu contoh represi rejim Orde Baru terhadap kelompok Islam dengan cara militer dan kekerasan. Peristiwa yang dipicu dengan pencabutan pamflet di mushala As-Sa'adah, Koja Tanjung Priok, oleh aparat Babinsa Kodim 0502 ini mengakibatkan perlawanan

¹⁸ PPP merupakan penggabungan dari Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

¹⁹ Pengubahan tersebut diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 8 Tahun 1985.

²⁰ Dalam hal ini, Ka'bah merupakan simbolisasi dari arah Kiblat umat Islam. Sementara itu, bintang diasosiasikan dengan lambang dari sila pertama pancasila.

²¹ Istilah Althusser dalam "Ideology and Ideological State Aparatus" (1971).

dari Jemaah mushala dan warga dan berakhir dengan puluhan korban jiwa²². Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengaitkan peristiwa ini dengan gagasan dan proses formalisasi azas tunggal Pancasila dalam kehidupan politik dan berbangsa di Indonesia. Dalam hal ini, terlihat bahwa represi politik dan represi militer memiliki kaitan yang cukup erat. Militer terlihat sebagai bagian dari mesin politik rejim Orde Baru untuk melanggengkan kuasa dan kontrolnya terhadap publik dan aktifitas kelompok Islam.

Hefner (2003) menyoroti sisi lain dari hubungan antara rejim Orde Baru dan militer dengan kelompok Islam. Hefner mengindikasikan bahwa kontrol dan pengawasan terhadap kelompok Islam, baik itu kelompok radikal maupun moderat, selama rejim Orde Baru berkuasa tidaklah statis. 'Kecairan' kebijakan dan kontrol Orde Baru tersebut, tidak terlepas dari konteks gerakan kebangkitan Islam di dunia, sorotan dunia Barat terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rejim Orde Baru, dan munculnya kelas menengah Islam perkotaan yang menuntut reformasi politik pada akhir 1980-an (Hefner, p. 163-164). Untuk menyaingi tekanan dan tuntutan dari dalam dan luar ini, Orde Baru mengubah strategi kontrol dan pengawasannya terhadap kelompok dan tokoh-tokoh Islam.

Hefner mengungkapkan bahwa, pada akhir 1980-an ini, rejim Orde Baru mengubah sistem represi menjadi sistem ko-optasi. Ketika tokoh-tokoh Islam moderat, seperti K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur/NU) dan Amien Rais (Muhammadiyah), menunjukkan penentangan terhadap kebijakan politik Orde Baru, rejim berkuasa kemudian melakukan pendekatan pada dan ko-optasi atas kepada kelompok-kelompok Islam radikal. Hefner menyebutkan bahwa Kelompok Islam radikal seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam pada awal 1990-an berubah posisi dari kelompok radikal yang menentang rejim Orde Baru menjadi kelompok yang membela rejim tersebut (p. 164). Bersama-sama dengan rejim Orde Baru, kedua kelompok Islam ini berusaha menekan dan mengaitkan gagasan-gagasan demokrasi yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam moderat sebagai bagian

²² Informasi diperoleh dari laporan investigasi Kontras dalam "Sakralisasi Ideologi Memakan Korban" (2001).

dari konspirasi Barat (Yahudi dan Kristen) untuk menghancurkan Indonesia dan umat Islam.

Namun demikian, stabilitas nasional yang disokong oleh kontrol dan pengawasan tidak bisa menahan gelombang krisis moneter yang melanda Asia pada 1997. Sebagai bagian dari jaringan ekonomi 'kapitalis' yang bergantung pada modal, moneter, dan pasar, Indonesia mengalami keterpurukkan ekonomi. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan pro demokrasi dan kelompok-kelompok Islam untuk menuntut reformasi ekonomi dan politik, yang diakhiri dengan 'lengsernya' presiden Soeharto dan 'jatuhnya' rejim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Hefner mengemukakan bahwa gerakan tuntutan ini merupakan gerakan koalisi yang melibatkan kelompok agama lainnya, kelompok nasionalis-sekuler, dan kelompok Islam (p. 175).

Dalam hal ini, pasca-kejatuhan Orde Baru dan era reformasi terlihat sebagai momen artikulasi pluralitas bangsa Indonesia, yang ditafsirkan Fealy dan Hefner sebagai momen munculnya wajah Indonesia yang beragam dan demokratis. Namun demikian, munculnya gerakan radikalisme Islam di ruang publik Indonesia memunculkan penafsiran lain atas pluralitas ini. Hefner mengemukakan bahwa gerakan radikalisme Islam memperkuat kontestasi pemaknaan dan relevansi Islam di tengah kehidupan bangsa Indonesia (p. 161-162).

Tarik-menarik antara kelompok Islam moderat dengan kelompok Islam radikal dalam pengakomodasian dan formalisasi syariat Islam ke dalam konstitusi negara merupakan gambaran dari pluralitas yang berlangsung pada era pasca-Orde Baru. Karena itu, Hefner berpendapat bahwa pluralitas bangsa Indonesia harus juga diiringi oleh komitmen untuk mengakomodasi keragaman tersebut dengan cara yang 'sipil' dan pluralis, sehingga perlu adanya suatu budaya pluralisme dalam struktur masyarakat yang majemuk (p. 159). Namun, bila dikaitkan dengan tafsiran-tafsiran kelompok Islam radikal terhadap pluralitas dan pluralisme, pendapat Hefner tersebut merupakan hal yang justru ditentang, sehingga kondisi keragaman dalam konteks ini terlihat menunjukkan suatu kompleksitas.

2.5.2.2 Jaringan Online

Bila ditarik benang merah, konteks-konteks *offline* yang disebutkan di atas menunjukkan suatu pola jaringan. Ideologi gerakan modernis Islam yang dimulai dari kawasan Timur-Tengah menyebar dan berkaitan dengan perkembangan gerakan radikalisme Islam di Indonesia. Namun demikian, sebaran dan pengaruh ideologi tersebut terlihat juga menunjukkan variasinya sehingga memunculkan pola global-lokal dalam kategori gerakan Islam radikal Indonesia. Dalam hal ini Hizbut Tahrir, Jemaah Islamiyah, dan Majelis Mujahidin Indonesia bila dikaitkan dengan persepsinya terhadap bentuk negara terlihat berposisi pada konsep global Islam dalam kerangka kekhalifahan Islam dunia. Sementara itu, DI/NII, FPI, dan FKAWJ walaupun memiliki perbedaan terhadap konsep negara, namun kerangka negara tetap diletakkan dalam konteks lokal: Negara Islam Indonesia ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pengawasan dan kontrol rejim Orde Baru terhadap gerakan Islam maupun gerakan pro-demokrasi terlihat juga sebagai bentuk jaringan. Dengan jejaring pengawasan dan kontrol '*panopticonism*'²³ yang terbentang dari tataran R.T. sampai nasional, rejim Orde Baru terlihat mengukuhkan kuasanya terhadap publik. Demikian pula dengan konteks yang melatari kejatuhan rejim Orde Baru yang tidak bisa dilepaskan dari jaringan. Krisis moneter yang menerpa kawasan Asia pada 1997, secara langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia yang kemudian menjalar pada 'ambruknya' kekuasaan rejim Orde Baru. Bangkitnya gerakan reformasi menuntut perubahan politik Indonesiapun bergerak dalam jaringan. Arus demonstrasi mahasiswa, aktifis pro-demokrasi, dan kelompok lainnya membentuk jaringan perlawanan terhadap rejim Orde Baru.

Konteks-konteks *offline* inipun terlihat berlangsung secara *online* di ruang maya. Lim (2002) menunjukkan bahwa pada masa menjelang kejatuhan rejim Orde Baru, diskusi-diskusi dan gerakan perlawanan terhadap rejim Orde Baru berlangsung secara *online* pula. Di tengah kontrol '*panopticonsim*' rejim Orde

²³ Konsep kontrol dan pengawasan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam *Panopticon* (1791). Konsep ini kemudian ditelusuri lebih jauh oleh Foucault dalam *Discipline and Punish* (1975).

Baru di ranah *offline*, ruang maya menjadi ruang publik yang signifikan bagi kelompok-kelompok anti rejim Orde Baru dalam menyuarakan aspirasi, bertukar informasi, dan strategi gerakan perlawanan (p. 393-395). Bahkan, menurut Lim, pada aksi-aksi demonstrasi 1998, Internet menjadi media informasi dan penyusunan strategi pergerakan demonstran. Lemahnya kontrol rejim Orde Baru di ruang maya, dalam hal ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi.

Sementara itu, Bräuchler (2003 dan 2004) dan Hefner (2003) mengemukakan peranan Internet bagi pergerakan kelompok Islam radikal. Dalam hal ini, keduanya menganalisis aktifitas *online* FKAWJ. Menurut Hefner, dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam radikal lain, FKAWJ²⁴ adalah kelompok Islam radikal yang sangat mengandalkan teknologi informasi dan ruang maya sebagai modus operandi pergerakannya (p. 161-162). Penguasaan kelompok Islam radikal ini terhadap teknologi informasi dan Internet tidak terlepas dari sistem perekrutan FKAWJ yang memasukkan beberapa aktifis Internet dan sarjana lulusan jurusan teknologi informasi.

Pada masa konflik di Maluku dan Ambon, FKAWJ melalui situs resminya <http://www.laskarjihad.or.id> aktif memberikan informasi mengenai konflik yang terjadi di Maluku dan Ambon²⁵. *Online* pada 2000, situs FKAWJ ini merupakan situs kelompok Islam radikal Indonesia pertama. Namun demikian, pada 2002 seiring dengan pembubaran FKAWJ situs inipun *offline*. Bräuchler dan Hefner mengemukakan bahwa pembubaran dan *offline* nya situs FKAWJ ini tidak terlepas dari isu perang terhadap terorisme yang dilancarkan oleh Amerika Serikat pasca peristiwa *World Trade Center* (2001) dan konteks peledakan bom Bali pada 2002.

Selain situs [laskarjihad.or.id](http://www.laskarjihad.or.id), setidaknya ada tiga situs berita *online* yang mengaku sebagai situs berita *online* Islam, yaitu [arahmah.com](http://www.arahmah.com), [voa-islam.com](http://www.voa-islam.com), dan [erasmuslim.com](http://www.erasmuslim.com). Ketiga situs tersebut terlihat aktif memberikan informasi-informasi mengenai Islam, khususnya mengenai gerakan-gerakan perlawanan

²⁴ FKAWJ didirikan pada 14 Februari 1998.

²⁵ Lengkapnya bisa dibaca dalam artikel yang ditulis Bräuchler (2004).

kelompok-kelompok Islam di Afghanistan, Pakistan, Palestina, ataupun tempat-tempat lain yang mengalami konflik antara Islam dengan kekuatan-kekuatan “musuh-musuh” Islam. Selain itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik Indonesia pun tidak luput dari liputan ketiga media *online* ini. Peristiwa-peristiwa yang sering diberitakan biasanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipandang selalu merugikan umat Islam dan selalu berpihak pada kepentingan-kepentingan “musuh-musuh” Islam.

Dalam hal ini, modus operandi kelompok Islam radikal terlihat bukan saja berlangsung dalam tataran *offline* seperti dikemukakan Fealy, namun juga berlangsung dalam tataran *online*.



BAB 3

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Cyber-FPI

3.1 Pengantar

Dalam bab ini saya membahas konstruksi identitas FPI di ruang maya serta kaitannya dengan wacana radikalisme Islam di Indonesia. Konteks-konteks yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya akan diterapkan dalam pembahasan. Secara sistematis, dua tahapan analisis akan dipaparkan dalam bab ini. Tahapan pertama adalah analisis konstruksi identitas di dalam situs FPI dalam kaitannya dengan artikulasi identitas Islam pasca-kejatuhan rejim Orde Baru. Tahapan kedua adalah analisis terhadap wacana yang berkembang sehubungan dengan keberadaan FPI. Dalam tahapan kedua ini, beberapa artikel dalam *fpi.or.id*, pemberitaan di tiga situs berita *online*, dan komentar pengunjung situs terhadap pemberitaan mengenai FPI dianalisis.

3.2 Proyek Identitas Pasca-Rejim Orde Baru

Seperti telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, kejatuhan rejim Orde Baru merupakan titik awal kemunculan kembali gerakan-gerakan Islam fundamental dan radikal. Bersama dengan gerakan-gerakan 'pro-demokrasi', gerakan-gerakan tersebut mewarnai ruang publik Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan-kekuatan rejim Orde Baru. Era Reformasi adalah istilah yang sering dipergunakan untuk mendeskripsikan keadaan setelah kejatuhan rejim Orde Baru. Dalam era Reformasi, akses publik terhadap informasi terbuka luas dengan munculnya berbagai media massa cetak maupun elektronik. Menjamurnya media massa cetak maupun elektronik ini seolah menandai lahirnya suatu *civil society* yang akses dan partisipasi publiknya terhadap informasi berlangsung 'dengan baik' tanpa adanya halangan dan sensor dari rejim yang berkuasa¹.

¹ Lihat pembahasan Fealy dalam "Islamic Radicalism in Indonesia : The Faltering Revival ?" (2004) dan Hasan dalam "The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of Indonesian Public Sphere" (2009).

3.2.1 *Civil Society* dan Komunalisme Umat

Reformasi dan *civil society*² (masyarakat madani) pada saat itu terlihat sebagai istilah populer dalam kehidupan politik maupun keseharian bangsa Indonesia. Kedua istilah ini pun seakan menjadi suatu nilai tukar dalam 'transaksi politik' antara elit-elit politik dengan publik. Dengan kata lain, keduanya terlihat sebagai suatu *shared code* yang mengikat bangsa Indonesia, dan membedakannya dengan kondisi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Namun demikian, reformasi dan proyeksi *civil society* sebagai suatu proyek identitas oleh kelompok-kelompok Islam fundamental dan radikal dipandang sebagai suatu arena pergulatan kepentingan. Agenda reformasi dicurigai disusupi oleh kepentingan-kepentingan kaum neo-liberal, mata-mata asing, atau dalam istilah yang acapkali digunakan FPI, sebagai proyek kelompok SEPILIS³ yang menyaru dalam “LSM-LSM komparador” sebagai basis pergerakannya.⁴

Dalam hal ini, reformasi dan proyek *civil society* yang didengungkan oleh tokoh-tokoh ‘pro-demokrasi’ dipandang FPI sebagai usaha “melakukan MANIPULASI HUJAH dan KORUPSI DALIL, atas nama masalah, pembaharuan, persamaan, persatuan, kemanusiaan, kebebasan, keadilan dan HAM! Mereka adalah Perusak Aqidah, Penghancur Akhlaq, Pemerkosa Syari'at dan Penoda Agama” (“Maklumat FPI tentang SEPILIS”, 2008). Argumen-argumen ini kemudian dijadikan FPI sebagai landasan ‘kewajiban’ untuk menegakan *amar ma'ruf nahyi mungkar*.⁵

Dari konteks-konteks di atas, terlihat bahwa situasi pasca-rejim Orde Baru merupakan suatu momen (re)konstruksi identitas kebangsaan Indonesia. Tarikulur antara kelompok-kelompok ‘pro-demokrasi’ dan kelompok-kelompok Islam fundamental dan radikal dalam memberikan pemaknaan kepada konsepsi identitas bangsa menunjukkan bahwa proyek identitas merupakan suatu arena kontestasi pemaknaan. Kendatipun proyek *civil society* berusaha diterjemahkan dan diasosiasikan ke dalam istilah yang ‘bernuansa Islami’ menjadi masyarakat

² Istilah ini sering digunakan Nurcholish Madjid dan tokoh reformasi lainnya.

³ Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme.

⁴ Pernyataan FPI di dalam “Profil FPI: Lemahnya Penegakan Hukum” (2008, 8 September). diambil dari <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=38> (diakses pada 08 Maret 2012).

⁵ mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi umat

madani, bagi kelompok Islam fundamental dan radikal, hal ini tetap dipandang sebagai suatu proyek identitas yang mengancam akidah umat Islam. Para penggerak dan pencetus gagasan masyarakat madani selalu dicurigai sebagai bagian dari jaringan gerakan SEPILIS yang berkiblat pada konsep-konsep dan nilai-nilai Barat.⁶

Gencarnya isu-isu dan wacana penegakan syariat Islam dalam ruang publik Indonesia bisa dilihat sebagai upaya pencegahan dan perlawanan terhadap arus sekularisasi yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang dituduh FPI dan kelompok Islam fundamental lainnya sebagai SEPILIS tersebut. Namun demikian, wacana penegakan syariat merupakan wacana yang penuh dengan perdebatan. Syariat sebagai suatu ‘produk interpretasi’ tentunya memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Di tengah kemajemukan bangsa dan umat Islam Indonesia, suatu penafsiran terhadap syariat Islam tentunya menghadirkan polemik tersendiri. Perdebatan klasik antara golongan Nahdliyin dengan Muhammadiyah mengenai tatacara peribadahan dan ritual keagamaan menjadi contoh keragaman tafsiran terhadap syariat.

Dalam konteks ini penegakan syariat dan konsepsinya dalam kehidupan umat merupakan wacana yang cair. Kecairan ini ditafsirkan oleh kelompok Islam fundamental maupun radikal sebagai suatu bentuk penyimpangan ajaran dan syariat Islam. Karena itu, bentuk identitas dan konsep umat yang utuh, ajek, dan *kaffah* di bawah tuntunan syariat Islam ‘yang murni’ merupakan proyek identitas yang diusung oleh kelompok-kelompok Islam fundamental dan radikal.⁷

Kondisi yang dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa, secara garis besar, proyek identitas yang berlangsung sejak pasca-kejatuhan rejim Orde Baru diusung oleh dua kekuatan yang berseberangan. Di satu sisi, gerakan-gerakan pro-demokrasi hadir dengan mengusung proyek *civil society* yang mengacu pada konsep negara dan masyarakat modern. Di sisi lain, gerakan-gerakan Islam

⁶ FPI secara khusus membuat maklumat mengenai ini. Isi maklumat bisa dibaca dalam “Maklumat FPI tentang SEPILIS.” (2008, 4 Agustus) dalam tautan ini <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=73>.

⁷ Pembahasan mendetil bisa dilihat dalam laporan SETARA Institute (2011), terutama pada bab “Ragam Wajah Satu Cita-cita” halaman 76-107, ataupun pembahasan Fealy (2004).

fundamental dan radikal (Islamis) hadir dengan mengusung proyek identitas Islam yang mengacu pada komunalitas umat berlandaskan syariat Islam. Sementara itu, terjepit di tengah dua arus kekuatan ini adalah publik dan umat. Publik dalam istilah *civil society* atau umat dalam istilah Islam dalam konteks perdebatan ini berada dalam pusaran kepentingan antara kelompok pro-demokrasi dan gerakan Islamis.

Di tengah pusaran kepentingan ini, media massa hadir sebagai perantara dan mediasi publik terhadap akses-akses informasi dan realitas sosial yang terjadi. Menjamurnya media massa cetak dan elektronik seakan memberikan akses yang luas dan ruang yang terbuka bagi publik. Proyek identitas yang menjadi medan pergulatan pemaknaan pun tidak luput dari peran media dalam menghadirkannya kembali ke dalam ruang publik Indonesia.

3.2.2 Media dan Gerakan Islam Pasca-Kejatuhan Rejim Orde Baru

Munculnya tayangan-tayangan debat politik, jajak suara dan pendapat pemilu, dan pengungkapan kasus-kasus korupsi menjadi sajian keseharian publik Indonesia pada era Reformasi. Seolah memberikan ruang pada proyeksi dan artikulasi identitas Islam, media pun tidak luput menghadirkan tayangan-tayangan Islami dan liputan-liputan mengenai Islam dalam acara ataupun kolom khusus kajian Islam⁸.

Namun demikian, bagi gerakan-gerakan Islam fundamental dan radikal, media massa cetak dan elektronik ‘populer’ dipandang dan dicurigai sebagai bagian dari media propaganda kelompok SEPILIS untuk menyuarakan agenda-agenda yang membahayakan kehidupan umat, dan untuk memengaruhi opini publik tentang gerakan-gerakan Islam. FPI, misalnya, secara khusus menulis beberapa artikel yang memaparkan pandangan mengenai posisi media. Dalam artikel yang berjudul “Empat Kelompok Jahat Berkonspirasi Membubarkan FPI”⁹, Habib Rizieq menuduh media massa sebagai bagian dari konspirasi empat kelompok besar: mafia bisnis, kelompok liberal, gerakan Kristen radikal, dan konspirasi politik, yang bertujuan untuk menghancurkan gerakan Islam, seperti

⁸ Pemaparan lebih jauh bisa dilihat dalam Hasan (2009).

⁹ Artikel lengkap bisa dibaca dalam <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=178>.

gerakan-gerakan yang dilakukan oleh FPI. Dengan mencontohkan cara media massa memberitakan FPI atau gerakan Islam dengan tidak berimbang, Habib Rizieq berasumsi bahwa media massa merupakan alat kepentingan konspirasi empat kelompok yang disebutkan di atas.¹⁰

Dalam hal ini, bagi FPI, media maupun kekuatan-kekuatan kelompok SEPILIS tidak terlepas dari adanya suatu konspirasi global untuk menghancurkan umat Islam secara sistematis. Media dalam hal ini disangsikan kredibilitas dan netralitasnya. Media dituding sarat dengan agenda-agenda yang bisa merusak akidah dan akhlak umat Islam¹¹. Ketidakpercayaan terhadap media massa dominan dan kecurigaan terhadap adanya suatu konspirasi sistematis untuk menghancurkan umat Islam bisa dilihat sebagai salah satu konteks yang mendorong gerakan-gerakan Islam untuk memilih media publikasi dan media massa alternatif.

Menjamurnya media publikasi dakwah dan media massa Islam pasca-rejim Orde Baru bisa dilihat sebagai salah satu indikasinya. Secara politis, menjamurnya media publikasi dakwah dan media massa Islam dipengaruhi oleh hilangnya sensor pemerintah terhadap penerbitan dan publikasi berita. Kejatuhan “panoptikonisme” rejim Orde Baru memberikan ‘angin segar’ bagi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi di ruang publik.¹² Dalam konteks budaya, menjamurnya media publikasi dakwah seperti selebaran, buletin, pamflet, dan munculnya media massa Islam tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan produksi dan publikasi berlangsung dengan murah dan cepat.

Tersedianya perangkat dan peranti komputer yang didukung dengan *printer* dan perangkat lunak berkemampuan *desktop publishing* yang mudah dan

¹⁰ Dalam artikel itu, Habib Rizieq menyebutkan adanya dokumen khusus yang disebutnya sebagai *Rand Document*: dokumen yang dipercayai Habib Rizieq berisi instruksi-instruksi bagi media massa dalam menghadirkan pemberitaan mengenai gerakan Islam.

¹¹ Lihat artikel “FPI Kritik Keras Media Saat Kedatangan Fahira Idris” di <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=189>.

¹² Diskusi lebih jauh bisa dibaca dalam Lim, M. (2002). “Cyber-civic Space in Indonesia from Panopticon to Pandemonium ?” IDPR, 24(4), 383-400.

murah¹³ memberikan peluang bagi gerakan-gerakan Islam untuk meyuarkan dan menyebarkan syiar Islam kepada publik. Pamflet, buletin dakwah, dan selebaran produksi ‘rumahan’ disebarikan melalui mesjid, kelompok pengajian, dan kajian Islam di kampus-kampus. Fenomena kehadiran Laskar Jihad di perempatan lampu merah pada masa-masa konflik Ambon (1999-2001) untuk membagikan selebaran-selebaran dan informasi mengenai gerakan ‘jihad’ di Ambon merupakan contoh bagaimana gerakan-gerakan Islam menggunakan media publikasi alternatif dalam menyebarkan dan meyuarkan pendapatnya.¹⁴

Tersedianya akses ke jaringan Internet juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi menjamurnya media publikasi dan media massa Islam. Dalam hal ini, Internet memungkinkan sirkulasi informasi yang lebih luas dengan menjangkau audiens sasarannya secara lintas-batas. Dalam pembahasannya mengenai gerakan Islam, Bunt (2000) memaparkan bagaimana gerakan-gerakan Islam menggunakan Internet sebagai media perjuangan dan ruang konstruksi identitas Islam yang ideal (p. 102-103). Dalam hal ini, hadirnya transkripsi Al-Quran, Hadist, dan teks-teks agama dalam bentuk digital di ruang maya, dengan disertai rekaman-rekaman audio-video dakwah ataupun laporan perjuangan umat Islam, bisa dilihat sebagai suatu *shared code* dan *shared narrative* dalam upaya membentuk identitas kolektif Islam lintas-batas negara-bangsa.

Konflik Ambon dan Maluku merupakan contoh bagaimana Internet menghadirkan suatu *shared narrative* mengenai perjuangan dan kondisi umat Islam pada tataran lokal ke dalam konteks nasional dan global.¹⁵ Selama konflik berlangsung, FKAJ (Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama’ah), melalui situs yang dimilikinya: <http://www.laskarjihad.or.id>¹⁶, gencar menginformasikan kondisi konflik di Ambon. Artikel-artikel berisi berita kemenangan kelompok

¹³ Dalam hal ini, toko-toko dan lapak-lapak penjual perangkat lunak bajakan memiliki peran penting dalam proses produksi media cetak ‘rumahan’.

¹⁴ Baca artikel Hefner berjudul “Civic Pluralism Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia”, dalam Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (ed.) (2003). *New Media in the Muslim World*. Bloomington: Indiana University Press. Hal. 158-179 .

¹⁵ Pembahasan mendetil bisa dibaca dalam Brauchler (2003 dan 2004).

¹⁶ Situs pada 2002 ditutup, tidak lama setelah FKWAJ membubarkan diri. Namun demikian, arsip situs masih bisa dibuka dengan mengakses <http://web.archive.org> (menggunakan VPN), atau arsip diskusi dalam yahogroup.

Islam, kekejaman yang dilakukan oleh pihak Kristen, ataupun ketidaknetralan TNI dalam menyelesaikan konflik dipublikasikan di dalam situs tersebut. Untuk mengugah ‘kesadaran’ umat Islam akan konflik yang terjadi, kondisi konflik dan peperangan yang ‘sesungguhnya’ disimulasikan melalui foto dan video yang diunggah di halaman situs.

Selain situs FKAWJ, pada era yang sama¹⁷ hadir pula situs berita *online* eramuslim.com. Eramuslim merupakan salah satu situs berita Islam yang populer¹⁸ dan sering menjadi ‘rujukan’ informasi mengenai kondisi dan permasalahan umat Islam di Indonesia maupun dunia. Setelah Eramuslim.com, arrahmah.com¹⁹ dan voa-islam.com²⁰ merupakan situs berita Islam *online* yang juga cukup populer. Mirip dengan gerakan-gerakan Islam Indonesia yang beraneka wajah, situs berita *online* Islam pun menunjukkan variasinya. Namun, bila dilihat secara garis besar, konten berita yang dimuatnya memiliki kemiripan. Dengan narasi-narasi tekstual dan visual yang menyimulasikan kondisi dan perjuangan umat Islam di dunia, situs-situs tersebut terlihat menghadirkan suatu konsep kesatuan umat Islam. Dalam hal ini, narasi-narasi yang dipergunakan terlihat membentuk suatu *shared narrative* yang mengikat umat dalam kisah dan pengalaman yang sama.

Sementara itu, FPI sebagai organisasi Islam yang lahir pada era yang sama dengan gerakan-gerakan Islam radikal lainnya (17 Agustus 1998) baru dimulai kehadirannya di ruang maya pada 2008. Terhitung sejak peluncuran situs resminya: fpi.or.id sampai dengan sekarang, FPI terlihat aktif memutakhirkan konten situsya²¹. Hal ini mengindikasikan bahwa, selain aktif di ranah *offline*, FPI juga aktif di ruang maya. Bila dikaitkan dengan wacana proyek identitas dan peran media *online* Islam seperti yang disebutkan di atas, aktifitas *online* FPI tentunya perlu untuk diteliti.

¹⁷ Data diambil melalui pencarian DNS dan IP www.who.is/domain_archive-com/eramuslim.com/.

¹⁸ Data diambil dari alexa page ranking.

¹⁹ *Online* sejak 2005 www.who.is/domain_archive-com/arrahmah.com/.

²⁰ *Online* sejak 2009 www.who.is/domain_archive-com/voa-islam.com/. *Punning* nama yang cukup menarik, mirip dengan VOA: Voice of America.

²¹ Data diperoleh dari web.archive.org. Akses ke arsip web bisa dilakukan dengan menggunakan VPN (*Virtual Private Network*).

3.3 FPI Offline

Mengacu pada pemaparan Fealy terhadap gerakan radikalisme Islam di Indonesia, FPI tampak sebagai kelompok Islam radikal yang kontras bila dibandingkan dengan kelompok Islam radikal lainnya. Kekontrasan ini terlihat dari sudut pandang FPI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dipandang FPI sebagai bentuk dan dasar negara yang sah dan berlaku di wilayah Indonesia.²² Deklarasi pendirian FPI pada 17 Agustus 1998 bisa dilihat sebagai simbolisasi dari posisi FPI terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Idealisasi FPI terhadap nasionalisme pun terlihat diperkuat dalam ‘heroisasi’ ketokohan Habib Rizieq. Dalam artikel yang berjudul “Pandu Arab Indonesia” pada situs fpi.or.id, Habib Rizieq diceritakan berasal dari keturunan Arab-Betawi yang menjunjung tinggi semangat perjuangan bangsa dan nasionalisme Indonesia.²⁴

Permasalahan utama bagi FPI terletak pada formalisasi syariat Islam dalam konstitusi negara. Dalam hal ini, tuntutan terhadap formalisasi syariat Islam dipandang FPI sebagai hak yang syah sebagai bagian dari warga negara Indonesia²⁵. Namun demikian, upaya penegakan syariat Islam bukan saja dilakukan melalui upaya tuntutan formalisasi, tetapi juga melalui aksi-aksi ‘penegakan dan pengawasan hukum’ (*vigilante*) dengan kekerasan terhadap kegiatan-kegiatan dan tempat-tempat yang disinyalir sebagai kegiatan dan tempat maksiat, perusak moral, dan penghancur akhlak-akidah umat. Walaupun pada awalnya, basis pergerakan dan aksi FPI berpusat pada wilayah urban (Jakarta dan sekitarnya), namun dalam perkembangan berikutnya aksi *vigilante* FPI juga merambah ke daerah, seiring dengan dibukanya beberapa cabang FPI di daerah.

²² Informasi diperoleh dari artikel yang ditulis oleh Habib Rizieq dengan judul “Tathbiq Syariah di Indonesia” dalam situs fpi.or.id pada tautan ini <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=251> (diakses pada 20 Mei 2012).

²³ Secara eksplisit Sekretaris Jenderal FPI Shobri Lubis menyatakan hal ini. Pernyataan Shobri bisa dibaca dalam “Dari Geruduk Waria Sampai Komunis” pada situs [vivanews.com](http://sorot.vivanews.com) dalam tautan ini http://sorot.vivanews.com/print_detail/printing/161960-anti-maksiat-cara-fpi (diakses pada 20 Mei 2012).

²⁴ Informasi lengkap bisa dibaca pada tautan berikut <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=10>.

²⁵ Pembahasan mendetil dipaparkan dalam pembahasan saya mengenai perspektif organisasi FPI di subbab-subbab berikutnya.

Bila ditelusuri pada awal pembentukan, kelahiran FPI tidak bisa dilepaskan dari konteks jatuhnya rejim Orde Baru. Di tengah isu-isu reformasi politik yang diusung oleh gerakan-gerakan lainnya, FPI hadir dengan mendeklarasikan gerakan reformasi moral dan akhlak bangsa. Namun demikian, pada perkembangan berikutnya aksi-aksi FPI disinyalir mendapatkan dukungan dari militer yang bertujuan untuk menggunakan FPI sebagai alat status quo (“Dari Geruduk Waria Sampai Komunis”, vivanews.com). Kehadiran beberapa petinggi militer dalam deklarasi FPI disinyalir juga sebagai indikasi dukungan militer dibalik keberadaan FPI.

Dalam penelusuran indeks berita situs fpi.or.id, saya menemukan beberapa artikel FPI yang menunjukkan dukungannya terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dalam artikel berjudul “Langkah TNI Membasmi Ahmadiyah”, “Awat!.. Data Bodong LSM Komprador Sudutkan TNI” dan “Pangdam Siliwangi: Kita Duduki Saja Masjid Ahmadiyah” terindikasikan bahwa militer dan FPI memiliki hubungan yang cukup dekat. Bahkan dalam beberapa milad FPI ke-12 yang juga bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI ke-65, FPI menyebutkan bahwa gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya turut hadir dalam, acara tersebut (“Acara HUT RI ke-65 dan Milad FPI ke-12”, fpi.or.id).

Konteks-konteks ini mengindikasikan bahwa keberadaan FPI tidak terlepas dari konstelasi kuasa dan politik Indonesia, dan memberikan implikasi bahwa gerakan FPI bukan semata-mata gerakan penegakan moralitas ataupun syariat Islam, namun juga gerakan yang bermuatan politis. Hefner (2003) dalam penelitiannya terhadap FKAWJ, mengemukakan keterlibatan militer dalam pembentukan dan aksi kelompok Islam radikal tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan militer dalam aksi-aksi kelompok Islam radikal.

Secara ideologis, FPI merupakan kelompok Islam radikal yang menunjukkan variasi ideologi Islam modernis dan tradisional. Fealy menyebutkan bahwa FPI secara ideologis berpandangan *Ahlu Sunnah Wal Jammah* namun dengan orientasi salafi (p. 114). Hal ini menurut Fealy, tidak terlepas dari beberapa tokoh-tokoh pendiri FPI yang berasal dari kalangan NU dan kalangan kelompok Islam modernis dengan anggota kelompok yang sebagian besar berasal

dari kalangan Islam tradisional. Habib Rizieq sendiri disebutkan Fealy sebagai tokoh Islam yang berhaluan modernis. Namun demikian, dalam wawancara Sekjen FPI, Shobri Lubis, dengan *vivanews.com* pada 2010 (“Dari Geruduk Waria Sampai Komunis”, *vivanews.com*) asosiasi FPI dan Habib Rizieq dengan gerakan wahabi dan modernis lainnya dibantah. Dalam wawancara tersebut, Shobri Lubis menyebutkan bahwa ideologi FPI adalah *Ahlussunnah Wal Jamaah Asy'ariyah* dengan madzhab Imam Syafi'i, dan Habib Rizieq disebutkan tetap berpandangan *Ahlussunnah Wal Jamaah* walaupun pernah menempuh studi di Arab Saudi yang nota bene merupakan asal dari gerakan wahabisme.

Fealy menyebutkan bahwa peran ulama-ulama berketurunan Arab (Hadrami) dalam pergerakan kelompok Islam radikal merupakan salah satu karakteristik dari kelompok Islam radikal. Hal inipun berlaku bagi FPI yang diketuai oleh Habib Rizieq yang berasal dari keturunan Arab-Betawi. Fealy menyebutkan bahwa posisi ulama keturunan Arab ini tidak terlepas dari persepsi terhadap kedekatan genealogis ulama-ulama ini dengan nabi Muhammad dan juga kedekatan secara kultural dengan budaya Arab yang dipandang sebagai bagian budaya Islam (p. 110). Dalam hal ini, terlihat bahwa kemurnian Islam diasosiasikan dan dimanifestasikan secara genetis dan kultural. Namun demikian, dalam artikel “Pandu Arab Indonesia”, Habib Rizieq dinarasikan sebagai keturunan pejuang Arab dan pendekar Betawi (Pitung). Dalam hal ini, terlihat bahwa sosok Habib Rizieq berusaha dihadirkan sebagai sosok yang juga memiliki kedekatan dengan budaya lokal (Betawi).

Untuk menganalisis bagaimana konteks-konteks *offline* ini berkaitan dengan aktifitas *online* FPI, pembahasan berikutnya akan menganalisis situs resmi FPI: *fpi.or.id*. Brauchler (2003 dan 2004), dalam pembahasannya mengenai aktifitas *online* FKAWJ, mengimplikasikan pentingnya menganalisis aktifitas *online* gerakan-gerakan Islam untuk memetakan kompleksitas informasi dan identitas yang diusung oleh gerakan tersebut (p. 281). Dalam hal ini, analisis yang dilakukan adalah untuk mencari bentuk-bentuk representasi dan persepsi yang melatari aksi *offline* (latar ideologis) gerakan tersebut. Berdasarkan kerangka

pemikiran ini, berikut ini akan saya paparkan analisis terhadap aktifitas *online* FPI.

3.4 FPI *Online*: Hidup Mulia atau Mati Syahid

Judul subbab di atas merupakan *title of document*²⁶ situs resmi FPI. Seolah sebagai bentuk penegasan posisi FPI sebagai pembela Islam kepada pengunjung situs, *title of document* tersebut selalu muncul di *toolbar browser* pengunjung situs.

Merujuk pendapat Chandler (1998)²⁷ mengenai fungsi Internet sebagai media representasi identitas, penelitian terhadap situs Internet perlu memperhatikan cara konten direpresentasikan dan disajikan kepada pengunjung. Dalam hal ini, elemen-elemen pembangun situs, baik itu elemen tekstual, visual, maupun elemen lainnya, seperti tautan dan struktur halaman web, bisa dilihat sebagai elemen yang menyusun konstruksi identitas.

Sementara itu, bila mengikuti argumen Hayles mengenai *Media Specific Analysis* (MSA),²⁸ materialitas dan keterkonstruksian situs bisa dilihat sebagai bagian yang mengarahkan dan memengaruhi cara pengunjung mencerna informasi yang disajikan di dalamnya. Dalam hal ini, elemen dan struktur halaman situs bisa dilihat sebagai bagian yang juga memengaruhi pemaknaan konten atau isi (informasi) situs.

Dengan demikian, dalam penelitian terhadap situs *fpi.or.id*, elemen-elemen tekstual, visual, dan struktur tata letak situs merupakan bagian yang saya perhatikan, sehingga konstruksi ideologis yang direpresentasikan di dalamnya bisa dibongkar.

Secara tataletak, situs *fpi.or.id* didesain mengikuti tataletak berjenis *F-Layout*²⁹. Dalam standar tata letak berjenis *F-design*, bagian-bagian terpenting

²⁶ *Title of document* merupakan elemen `<title>` dalam kode HTML yang berfungsi untuk menampilkan judul halaman web di *toolbar browser*. Informasi diperoleh dari http://www.w3schools.com/html/html_head.asp.

²⁷ Lihat Chandler, D. "Personal Home Pages and the Construction of Identities on the Web" di <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/webident.html>.

²⁸ Lihat Hayles, N. K. (2002). *Writing Machines*. Cambridge and London: MIT Press.

²⁹ Informasi mengenai jenis-jenis tataletak dan desain situs diperoleh dari <http://webdesign.tutsplus.com/sessions/web-design-theory/>.

dari situs diletakkan mengikuti arah pergerakan mata pengunjung dari sebelah kiri ke kanan dengan urutan dari atas ke bawah. Karena itu, ketika membuka halaman depan fpi.or.id, pengunjung disambut oleh *header*³⁰ yang berisi banner dan menu navigasi situs, kemudian diarahkan ke bagian *body* yang berisi konten situs, *sidebar* yang berisi tautan ke seksi kategori berita, dan terakhir bagian *footer*.

Dengan mengikuti alur tataletak ini, terlihat cara FPI menyusun dan mengatur informasi. Dari urutan-urutan informasi yang disajikan, dua elemen di bagian *header*, yaitu *banner* dan menu navigasi, merupakan elemen yang saya analisis konstruksi representasinya. Keduanya merupakan bagian dari elemen visual situs. Selain itu, untuk meneliti bentuk representasi tekstual, satu artikel di dalam situs, yaitu “Perspektif Organisasi”, juga merupakan bagian yang saya analisis.

3.4.1 Dalam Bentangan Spanduk: Representasi Identitas Bangsa dan Agama

Ketika membuka halaman depan fpi.or.id, *banner* pada gambar 3.1 adalah elemen visual situs yang membentang dari kiri ke kanan. Bila diperhatikan, di bagian kiri *banner* terlihat bendera merah putih yang berkibar. Di bagian tengah, terbentang gambar jemaah majelis dengan teks bergerak bertuliskan: FRONT PEMBELA ISLAM, melintasi bentangan gambar tersebut. Di bagian kanan, terdapat logo FPI. Sementara itu, di bagian bawah teks tertulis: Pelayan Ummat dan Pembela Agama~www.fpi.or.id~Website Resmi DPP-FPI, bergerak melintasi bentangan *banner* dari kanan ke kiri.

Pada level presentasi, penggunaan elemen-elemen gambar dan teks bergerak terlihat berfungsi untuk menciptakan efek interaktifitas tampilan kepada pengunjung situs. Namun, bila dibaca dari level pemaknaan elemen-elemen tersebut bisa dilihat sebagai suatu representasi identitas yang diproyeksikan oleh FPI.

Bendera merah putih secara konotatif merupakan representasi identitas bangsa Indonesia, yang bisa juga dibaca sebagai visualisasi konsep nasionalisme

³⁰ Struktur dan model penyajian standar situs biasanya terdiri dari bagian *header*, *body*(*content*), dan *footer*. Selain itu, menu navigasi dan *sidebar* juga merupakan bagian terpenting dalam struktur halaman situs Internet. Penjelasan mendetil bisa dilihat di <http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/web-development-from-scratch-basic-layout/>.

Indonesia. Sementara itu, logo FPI yang sarat dengan simbol-simbol Islam seperti: bulan-bintang yang disusun oleh kaligrafi kalimat syahadat, dan tulisan “Allah” di atas segitiga tasbih yang menyerupai kubah mesjid bisa ditafsirkan sebagai representasi identitas Islam. Ketika kedua gambar ini dibaca dalam kesatuan utuh, terlihat adanya dua representasi identitas: identitas bangsa dan identitas agama.

Bila *banner* yang membentang di situs fpi.or.id ini dibandingkan dengan *banner* yang terbentang di situs Islam lainnya (gambar 3.2-3.6), seperti eramuslim.com, arrahmah.com, voa-islam.com, ataupun dengan *banner* yang terbentang di situs NU (nu.or.id) dan situs PP Muhammadiyah (muhammadiyah.or.id), hanya di situs FPI sajalah kita bisa melihat bendera merah-putih. Hal ini memberikan kesan bahwa representasi identitas bangsa dan agama begitu penting untuk dikedepankan oleh FPI dan seolah menjadi bentuk penegasan FPI sebagai organisasi Islam yang tidak bisa dilepaskan dari konteks negara kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 3.1 Screenshot Banner Header fpi.or.id

Sumber: fpi.or.id



Gambar 3.2 Screenshot Banner Header eramuslim.com

Sumber: eramuslim.com



Gambar 3.3 Screenshot Banner Header arrahmah.com

Sumber: arrahmah.com



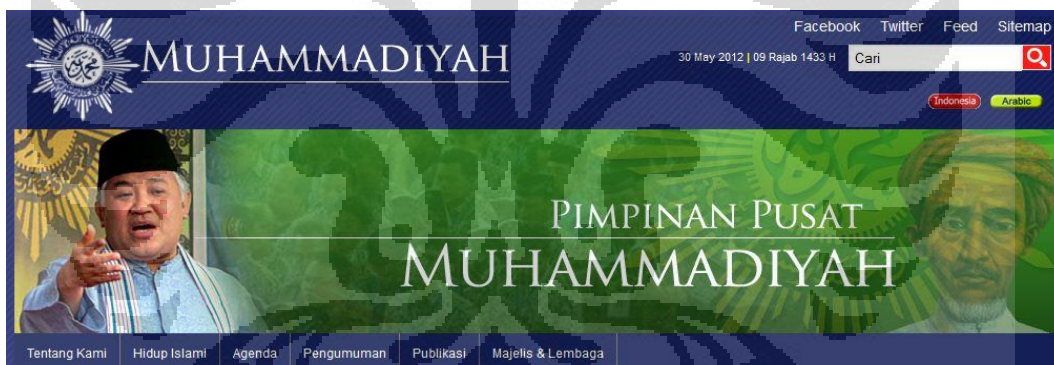
Gambar 3.4 Screenshot Banner Header voa-islam.com

Sumber: voa-islam.com



Gambar 3.5 Screenshot Banner Header nu.or.id³¹

Sumber: nu.or.id



Gambar 3.6 Screenshot Banner Header muhammadiyah.or.id

Sumber: muhammadiyah.or.id

Namun demikian, posisi tataletak bendera merah putih dan logo FPI dalam bentangan *banner* (gambar 3.1) tersebut bisa dilihat dari dua posisi berbeda. Pertama, bendera merah putih dan logo FPI diletakkan dalam posisi saling berhubungan (*relational*) antara kanan dan kiri.³² Kedua, bendera merah putih dan logo FPI tersebut terlihat diletakkan dalam posisi yang bertentangan (*opposition*) antara kanan atau kiri. Untuk itu, pembacaan lebih jauh perlu dilakukan. Dalam

³¹ Pencantuman nama Djarum Foundation, sebagai produsen rokok, di bagian banner nu.or.id, tentunya akan sangat kontras dengan banner fpi.or.id.

³² Dilihat dari sisi pengujung.

hal ini, pendapat Castells mengenai konstruksi identitas kolektif saya pergunakan untuk menganalisis posisi ini.

Identitas bangsa, bila dilihat dari perspektif Castells (2011), dikategorikan sebagai salah satu bentuk *legitimizing identity*. Dalam hal ini, identitas bangsa dimaknai sebagai suatu bentuk identitas dominan yang secara simbolis dan ideologis mengikat dan menyatukan individu-individu ke dalam wilayah pemaknaan negara-bangsa. Sementara itu, bila dikaitkan dengan gerakan-gerakan kebangkitan Islam,³³ artikulasi identitas Islam merupakan bagian dari gerakan perlawanan terhadap dominasi negara dan kekuatan-kekuatan lain (musuh-musuh Islam) yang berusaha menghancurkan umat dan agama.

Pemaknaan identitas Islam sebagai identitas perlawanan ini bisa dikaitkan dengan beberapa konteks. Dikaitkan dengan konteks represi dan kontrol rejim Orde Baru, kemunculan identitas Islam bisa dilihat sebagai suatu bentuk resistensi terhadap dominasi dan kontrol negara. Dikaitkan dengan konteks pasca-kejatuhan rejim Orde Baru, kemunculan identitas Islam merupakan bagian dari kontestasi antara kekuatan pro-demokrasi (*civil society*) dan kekuatan Islam fundamental-radikal (konsep umat) dalam membentuk proyek identitas bangsa pasca-kejatuhan rejim Orde Baru. Dalam hal ini, kelahiran FPI (17 Agustus 1998) dengan mengusung identitas Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks-konteks di atas.³⁴

Bila konteks-konteks tersebut dipergunakan untuk membaca *banner* yang membentang di situs fpi.or.id, peletakan dua simbol identitas yang secara konseptual dan historis bertentangan bisa ditafsirkan sebagai cara FPI untuk menunjukkan posisinya di tengah wacana kebangsaan dan wacana gerakan fundamentalisme Islam. Di dalam perspektif organisasi, FPI secara gamblang menyebutkan bahwa “motif untuk memperjuangkan syariat Islam adalah langkah yang sah, sedangkan aksi-aksi untuk memperjuangkannya diupayakan untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia” (“Perspektif Organisasi”).³⁵ Pernyataan ini mengindikasikan bentuk ‘negosiasi’ FPI dalam upayanya

³³ Seperti yang telah disinggung di BAB 2, atau bisa dibaca dalam Castells (2010, 17).

³⁴ <http://fpi.or.id/index.php?p=tentangfpi&mid=1>.

³⁵ Diambil dari “Perspektif Organisasi” <http://fpi.or.id/index.php?p=tentangfpi&mid=1> (diakses pada 5 Maret 2012).

mewujudkan suatu proyek identitas yang berlandaskan syariat Islam dalam konsepsi negara-bangsa. Bila dikaitkan secara historis, kelahiran FPI pada 17 Agustus 1998, yang bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI, terkesan memperkuat pemaknaan ini. Dengan demikian, baik secara literal maupun simbolis bendera merah putih dan logo FPI terlihat diletakkan dalam posisi saling berhubungan (*relational*) dalam pemaknaan dan idealisasi identitas FPI.

Akan tetapi, di tengah konstruksi pemaknaan negosiasi bangsa-agama yang terkesan begitu dikedepankan di dalam *banner* situs, keberadaan teks bergerak dalam *tagline* situs: “Pelayan Ummat dan Pembela Agama”, terlihat membantah konstruksi yang terbaca sebelumnya. Penggunaan kata “pelayan ummat dan pembela agama” secara gamblang menunjukkan posisi ‘lain’ FPI. Bila merujuk pendapat Castells, yang telah saya singgung dalam bab sebelumnya,³⁶ posisi umat dan keselamatan agama merupakan hal yang menjadi prioritas utama pergerakan Islam fundamental dan radikal. Penegakan syariat Islam dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan penegakan hukum negara.

Demikian pula dengan FPI yang secara gamblang menyebutkan bahwa “[p]osisi FPI menjadi semacam Pressure Group di Indonesia...serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam”. Karena itu, pernyataan “pelayan ummat dan pembela agama” menunjukkan posisi FPI yang lebih mengedepankan posisi identitasnya sebagai bagian dari komunalitas agama dibandingkan identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Secara praktis, dalam tataran *offline*, aksi-aksi kekerasan yang sering ditudingkan kepada FPI terlihat memperkuat posisi tersebut. Akibatnya, negosiasi yang sebelumnya terbaca berubah menjadi suatu kontradiksi dan resistensi.

Dengan demikian, posisi bendera merah putih dan logo FPI dalam *banner* secara *literal* dan simbolik terlihat diletakkan berseberangan (*opposition*). Fungsi *banner* situs pun terlihat memberikan penegasan terhadap kontradiksi antara nasionalisme dengan fundamentalisme agama; antara wawasan kebangsaan dengan komunalisme agama.

³⁶ Lihat Castells (2011) hal. 13-23.

Analisis terhadap *banner* situs *fpi.or.id* ini menunjukkan adanya kompleksitas dan kontradiksi representasi identitas yang berusaha dihadirkan FPI kepada publik. Di satu sisi, FPI terlihat “ingin” menunjukkan keberpihakannya pada wacana kebangsaan, namun di sisi lain, keberpihakannya pada wacana fundamentalisme dan radikalisme Islam juga terlihat begitu kuat, sementara kedua-duanya secara konseptual dan historis³⁷ berada dalam posisi yang berseberangan. Untuk menggali lebih jauh bagaimana oposisi dan kontradiksi ini direpresentasikan di dalam situs, berikut ini saya paparkan analisis elemen kedua situs: menu navigasi.

3.4.2 Dalam Tuntunan Navigasi: Representasi Identitas Perlawanan (*Resistance Identity*)

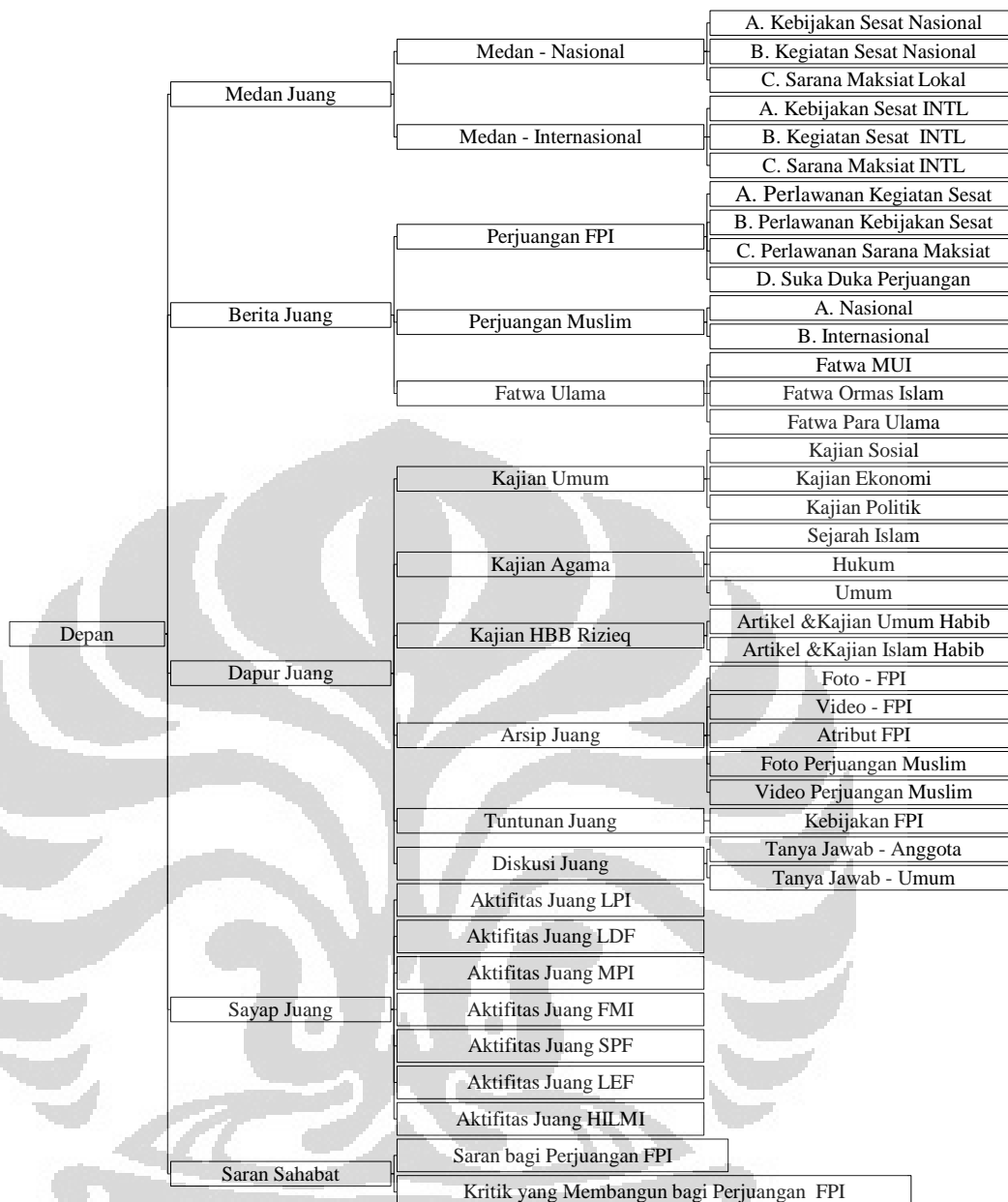
Bagian menu navigasi merupakan bagian yang juga menarik untuk diperhatikan (gambar 3.7). Dalam *web environment*, menu navigasi merupakan cara untuk mengarahkan pengunjung situs ke informasi-informasi tertentu yang dimuat di dalam situs³⁸. Bila dikaitkan dengan strategi narasi, menu navigasi bisa dilihat sebagai cara untuk mengarahkan pengunjung/pembaca ke narasi-narasi tertentu³⁹. Karena itu, konstruksi-konstruksi ideologis bisa juga dibongkar di dalam struktur menu navigasi situs FPI.

³⁷ Beberapa penelitian mengenai fundamentalisme dan radikalisme Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pertentangan antara negara dengan gerakan Islam tersebut sudah berlangsung sejak jaman revolusi kemerdekaan RI. Pada era Orde Lama, gerakan DI-TII merupakan contoh gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam yang secara langsung melakukan pemberontakan. Gerakan ini kemudian mendapat represi dan kontrol yang ketat pada masa Orde Baru. Diskusi lebih lanjut bisa dilihat dalam pemaparan dalam bab sebelumnya, dan beberapa sumber yang dijadikan acuan dalam bab tersebut.

³⁸ Informasi diperoleh dari:

http://www.webdevelopersnotes.com/tips/webdesign/web_site_navigation.php3 (diakses pada 25 Februari 2012).

³⁹ Teks dalam halaman web berbentuk *hypertext* yang, bila didefinisikan secara sederhana, merupakan bentuk teks yang memiliki tautan ke teks lain. Hayles secara spesifik mengaitkan bentuk *hypertext* ini sebagai bagian dari strategi penandaan. Diskusi mendetil bisa dibaca di Hayles, N. K. (2004). “Print Is Flat, Code Is Deep : The Importance of Media-Specific Analysis”, *Poetics Today*, 25(1), 67-90.



Gambar 3.7 Struktur Menu Navigasi fpi.or.id

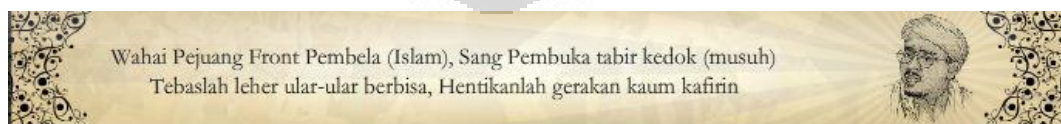
Dari kategori berita atau informasi yang dibagi berdasarkan lokal, global, dan internasional (dalam menu “medan juang” dan “kabar juang”), terlihat usaha FPI dalam menghadirkan suatu “*shared narrative*” yang menggugah kesadaran akan keberadaan umat secara global dan komunal. Terkesan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan umat pada tataran lokal dan nasional tidak bisa dipisahkan dari

apa yang terjadi pada tataran global.⁴⁰ Terlihat adanya suatu interkoneksi antara konteks lokal-global dan global-lokal dalam cara FPI memaknai konsep umat. Dalam hal ini, konsep kesatuan umat Islam terlihat direpresentasikan di dalam situs. Hal ini tentunya menambahkan kontradiksi lainnya terhadap usaha FPI untuk menegosiasikan kesatuan bangsa dengan kesatuan umat. Kesatuan bangsa mengacu pada batasan wilayah negara-bangsa, sementara kesatuan umat merupakan antitesis dari batasan tersebut.

Simulasi keadaan umat di tengah-tengah medan pertempuran ideologis dan fisik terlihat dinarasikan melalui menu navigasi ini. Simulasi terlihat dimunculkan melalui penggunaan dan pengulangan kata ‘juang’, ‘perjuangan’, ‘perlawanan’, dan ‘sesat’ pada hampir setiap menu navigasi. Tercatat sekitar 14 kali pengulangan kata “juang”, 6 kali kata “perjuangan”, 3 kali kata “perlawanan”, 6 kali kata “sesat”. Dalam hal ini, simulasi yang dilakukan oleh FPI tampak berbeda bila dibandingkan dengan situs-situs Islam lainnya.

Dalam *eramuslim.com*, *arahmah.com* dan *voa-islam.com*, penyajian foto-foto dan video perjuangan umat Islam, ataupun foto-foto kekejaman ‘musuh-musuh Islam’ terlihat sebagai elemen dominan dalam menyusun “*structures of feeling*”⁴¹ mengenai kondisi dan perjuangan umat Islam. ‘Vulgarisme’ darah dan mayat yang sering dipertontokan di dalam situs-situs tersebut sama sekali tidak dimunculkan di dalam situs FPI. Selain itu, penggunaan gambar pedang sebagai bagian dari simbolisasi perlawanan umat Islam seperti yang biasanya dipergunakan oleh kelompok atau organisasi Islam fundamentalis dan radikal pun tidak terlihat.

Pedang, dalam situs FPI, diterjemahkan dan dihadirkan melalui bentuk asosiasi metonimi seperti dalam *banner* di bawah ini (gambar 3.8):



Gambar 3.8 *Banner Body fpi.or.id*

⁴⁰ Walaupun sampai saat penelitian ini menu internasional yang disediakan di dalam navigasi masih belum terisi, keberadaan navigasi ini bisa menunjukkan suatu persepsi.

⁴¹ Istilah Raymond Williams (1978) dalam *Marxism and Literature*. Oxford University Press, USA.

Sumber: fpi.or.id

Dalam *banner* tersebut kata pedang muncul ketika diasosiasikan secara metonimi dengan kata “tebaslah”. Sementara itu, objek yang mengikuti verba “tebaslah” menggunakan bentuk metafora dari musuh dan kaum kafirin. Terlihat bahwa FPI berusaha untuk tidak mengasosiasikan langsung konsep perlawanan dengan pedang dan tindakan kekerasan seperti yang ‘lazim’ dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam fundamental dan radikal. Penggunaan kata “ular-ular berbisa” sebagai asosiasi terhadap “kaum kafirin” terlihat sebagai upaya dan “kehati-hatian” FPI dalam mengategorikan musuh-musuh Islam. Sama halnya dengan pola pengulangan kata-kata di dalam menu navigasi, rangkain kata dalam *banner* inipun⁴² disajikan secara berulang-ulang, seakan-akan berusaha untuk melakukan suatu penegasan.

Terkesan bahwa ‘vulgarisme’ visual yang sering disuguhkan di dalam situs-situs Islam radikal berusaha ditekan dan dicoba untuk ‘diperhalus’ dalam permainan kata. Seolah-olah, FPI berusaha untuk membuat jarak dengan simbol-simbol yang berasosiasi dengan kekerasan dan kebidaban. Dengan strategi tersebut, FPI terkesan berusaha menepis pemaknaan radikal dan pelaku kekerasan yang sering ditudingkan kepadanya. Dengan demikian, FPI terlihat berusaha membedakan antara tindakan radikal dan teror dengan usaha pembelaan terhadap umat.

Analisis terhadap menu navigasi ini menunjukkan bahwa informasi di dalam situs diarahkan untuk memunculkan dan menyimulasikan kondisi perlawanan dan perjuangan umat. Melalui navigasi ini, pengunjung terlihat dituntun untuk menelusuri kondisi umat dan posisi FPI yang ‘sebenarnya’ sebagai ‘pelayan umat dan pembela agama’ karena tindakan pembelaan yang dilakukannya merupakan tindakan logis dan benar di tengah kondisi umat yang sedang diserang oleh ‘kebijakan dan kegiatan sesat’ baik secara lokal maupun global.

Dengan demikian, terlihat bahwa konstruksi identitas yang dibangun melalui representasi ini mengarahkan pada suatu identitas perlawanan

⁴² Termasuk *banner* di bagian *header*.

(*resistance identity*), sehingga bila dikaitkan dengan negosiasi konsep kebangsaan dengan konsep komunalitas umat; antara identitas bangsa dan identitas agama yang terepresentasikan sebelumnya, hal ini justru memperkuat sisi kontradiksi dan oposisi. Dalam hal ini, terindikasikan bahwa FPI berada dalam posisi yang bertentangan dengan konsep dan wawasan kebangsaan.

3.4.3 Dalam Perspektif Organisasi: Proyeksi dan Idealisasi Umat

Dari sekian banyak artikel yang dipublikasikan FPI di situs resminya, “Perspektif Organisasi” merupakan artikel yang cukup penting untuk dianalisis. Ditautkan pada menu “Tentang FPI”,⁴³ artikel ini tentunya difungsikan untuk memberikan penjelasan kepada publik/pengunjung tentang keberadaan FPI di ruang publik Indonesia. Karena itu, artikel ini terlihat sebagai bentuk penegasan dan penjelasan FPI di tengah wacana radikalisme Islam dan intoleransi yang sering ditudingkan kepadanya. Bila dilihat dari sisi konstruksi identitas, artikel yang dituliskan ini terlihat sebagai cara FPI merepresentasikan bentuk identitas umat ideal yang diperjuangkannya.

Woodward (2002), dalam pembahasannya mengenai konstruksi identitas, menyebutkan bahwa gagasan mengenai perbedaan (*notion of difference*) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konstruksi identitas (35). Perbedaan, menurutnya, bisa dikonstruksikan secara negatif melalui marginalisasi ataupun pengucilan. Dalam hal ini, perbedaan diletakkan pada posisi yang bertentangan (*binary opposition*). Namun demikian, perbedaan bisa juga dikonstruksikan sebagai sumber keragaman. Dalam hal ini, perbedaan diletakkan dalam satu pola relasi yang saling berhubungan satu dengan lainnya (*relational*). Melalui pola relasi ini, keberadaan suatu identitas (*self/us*) tidak bisa dipisahkan dari keberadaan identitas lian (*the other/them*).

Dikaitkan dengan pendapat Woodward tersebut, penandaan perbedaan dalam perspektif organisasi terlihat lebih mengedepankan konstruksi identitas yang memarginalkan keberadaan identitas lain. Dalam hal ini, terlihat adanya pola

⁴³ <http://fpi.or.id/?p=tentangfpi&mid=1>.

oposisi biner dalam penandaan. Namun demikian, konstruksi ini tersamarkan oleh negosiasi-negosiasi yang terlihat ditawarkan oleh FPI.

Secara garis besar, pola oposisi biner yang terbaca dari perspektif organisasi FPI adalah adanya oposisi antara kekhasan nilai/universalisme nilai, penegakan syariat/penegakan hukum, lingkungan sosial sehat/lingkungan sosial rusak, mayoritas/minoritas, dan gerakan pembelaan (perlawanan)/gerakan perusak. Namun kemudian, pola-pola ini terlihat disusun ulang dalam argumen-argumen FPI.

Kekhasan nilai dan akhlak Islam dalam perspektif organisasi disusun ulang menjadi universalisme nilai.⁴⁴ Islam, dalam hal ini, ditafsirkan FPI sebagai agama yang “mengajarkan nilai-nilai akhlak yang universal, nilai-nilai baku moral yang kompatibel diaplikasikan bagi seluruh umat manusia”. Pernyataan ini menyiratkan bahwa nilai dan akhlak Islam bukan saja berlaku bagi umat Islam, akan tetapi juga berlaku dan berkesesuaian dengan nilai-nilai moralitas secara universal. Dalam hal ini, nilai-nilai komunalisme agama dicoba dihadirkan dan diasosiasikan dengan standar dan patokan yang berlaku universal. Bila dikaitkan dengan aksi-aksi FPI di ruang publik, asosiasi ini memberikan landasan membenaran. Hal ini karena isu moralitas yang didengungkan oleh FPI merupakan isu moralitas yang juga bisa dibenarkan secara universal.

Namun demikian, bila dilihat dari sisi lain, pengedepanan universalisme nilai dan akhlak Islam ini mengindikasikan pemarginalan nilai-nilai moralitas lainnya. Takaran baik dan buruk, bermoral dan tidak bermoral, adalah hal yang relatif. Dalam hal ini, syariat Islam dipandang FPI sebagai patokan dari moralitas dan akhlak tersebut, yang penegakannya harus “diwujudkan...dengan menuntut pemerintah setempat untuk mengadopsi sebagian dari nilai-nilai ajaran Islam (Syariat)”. Pernyataan ini mempertegas indikasi bahwa FPI melakukan standarisasi nilai-nilai syariat Islam di atas nilai-nilai lain dengan melegalkannya dalam perangkat hukum yang berlaku. Dengan demikian, pernyataan

⁴⁴ Dalam hal ini, pun terlihat bahwa FPI berada pada logika yang sama dengan konsep-konsep modernitas dan, bila dikaitkan dengan konteks globalisasi, logika standar ini memiliki kesamaan.

universalisme nilai Islam terlihat lebih menunjukkan sisi dominasi dibandingkan dengan adanya relasi keragaman.

‘Dominasi’ ini diterjemahkan oleh FPI sebagai hal yang wajar karena “Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka sudah sewajarnya posisi tawar umat Islam lebih besar”. Dominasi dalam hal ini terlihat diletakkan dalam konteks hak mayoritas. Dengan logika hak mayoritas lebih besar daripada hak minoritas, terlihat bahwa tuntutan penegakan syariat dalam ruang publik Indonesia bukanlah suatu ‘pemaksaan’ kehendak, tapi merupakan suatu tuntutan warga negara terhadap haknya.

Tuntutan ini, menurut FPI, merupakan hal yang wajar dan hak karena selama ini umat Islam berada dalam dominasi kekuatan-kekuatan global dan lokal yang berusaha “[me]maksakan sistim politik, budaya dan sosial ke bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam”. Karena itu, aksi-aksi penuntutan hak bukan merupakan tindakan penyerangan ataupun perusakan, akan tetapi suatu perlawanan terhadap ‘penindasan’. Melalui argumentasi-argumentasi tersebut, terlihat FPI berusaha menyusun ulang pemaknaan dominasi dengan terdominasi, pemaksaan dengan tuntutan, penyerangan dengan perlawanan, sehingga terkonstruksilah pemaknaan terhadap aksi-aksi FPI di ruang publik Indonesia sebagai gerakan yang wajar dan sah.

Namun demikian, argumentasi-argumentasi ini juga mengindikasikan pengucilan terhadap hak-hak minoritas. Dengan dikedepankannya hak mayoritas, tentunya ada hak-hak lain yang dikebelakangkan. Seolah menepis asumsi ini, FPI kemudian menyebutkan bahwa tuntutan penegakan syariat harus memperhatikan “nilai-nilai moral yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan keyakinan umat beragama lainnya”. Namun, di sinilah letak kontradiksi pernyataan FPI. Standarisasi nilai yang bertentangan dan tidak bertentangan merupakan hal yang multitafsir, dan tentunya merupakan suatu arena perdebatan pula.

Hukum negara merupakan sebuah standar baku ketika dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum, dalam hal ini, merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menjamin pola hubungan antara komponen

bangsa. Namun demikian, hukum dan penegakannya dipandang FPI kurang mengakomodasi dan menjamin hak-hak umat Islam. Karena itu, penegakan syariat dipandang sebagai tindakan sah untuk menjamin kehidupan umat yang “bersih dari segala penyakit masyarakat”. Dengan demikian, hukum negara harus “sejalan dengan nilai-nilai syariat”. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam pola hubungan antara hukum dan syariat Islam, penegakan syariat Islam merupakan sisi yang lebih dikedepankan. Bila dikaitkan dengan hak mayoritas dan minoritas, terlihat bahwa, bagi FPI, hak mayoritas umat Islamlah yang lebih diutamakan.

Dari pembacaan terhadap pola-pola ini, terlihat bahwa identitas umat ideal yang direpresentasikan di dalam perspektif organisasi adalah umat yang memiliki nilai-nilai akhlak dan moralitas yang tinggi. Nilai-nilai akhlak dan moralitas ini dipersepsikan sebagai “nilai-nilai akhlak yang universal, nilai-nilai baku moral yang kompatibel diaplikasikan bagi seluruh umat manusia”. Penegakan syariat dipandang sebagai syarat utama untuk mewujudkan proyek identitas ini. Lingkungan sosial umat, bagi FPI, dipandang harus bersih dari “penyakit masyarakat”. Dalam hal ini, perlawanan terhadap keberadaan gerakan atau kebijakan lokal maupun global yang merusak “moralitas dan akidah umat” adalah satu keharusan.

Konsep umat yang dihadirkan oleh FPI merupakan konsepsi umat yang tetap diletakkan dalam kerangka negara-bangsa. Namun demikian, pola hubungan antara elemen pembangun negara-bangsa ini terlihat dibaca ulang menjadi bentuk pola hubungan yang lain. Umat dan penegakan syariat Islam terlihat lebih dikedepankan. Bila dibandingkan dengan konsep *civil society* yang diusung oleh gerakan-gerakan pro-demokrasi, konsep umat yang diperjuangkan oleh FPI terlihat bertolak belakang dengan *civil society*.

Bila konsepsi umat ini dikaitkan dengan aksi-aksi *offline* FPI di ruang publik Indonesia, terlihat bahwa aksi-aksi tersebut berkaitan erat dengan idealisasi umat yang direpresentasikan di dalam perspektif organisasi ini.

3.4.4 Pesan dari Langit: Idealisasi Perjuangan Umat

Idealisasi perjuangan FPI dan sentralitas Habib Rizieq terlihat begitu kuat direpresentasikan di dalam situs. Secara khusus, pada halaman visi & misi⁴⁵ munajat, himne, dan mars organisasi dimuat sehingga memperkuat bentuk idealisasi perjuangan FPI. Pernyataan “Hidup Mulia, Mati Sahid” terlihat diulang-ulang pada setiap halaman, sehingga memperkuat pemunculan identitas perlawanan (*resistance identity*).

Sentralitas Habib Rizieq terlihat begitu dikedepankan di dalam setiap halaman situs, baik itu dalam setiap pernyataan yang dirilis FPI maupun dalam bentuk elemen-elemen visual situs. Elemen visual yang terlihat begitu kentara merepresentasikan hal ini adalah *banner* yang membentang pada bagian *body* halaman depan situs. *Banner* yang membentang ini terlihat menyimulasikan sosok Habib sebagai sosok umat yang ideal. Dengan menggunakan tipe *banner* interaktif, kesempurnaan dan idealisasi sosok Habib terlihat direpresentasikan melalui simulasi gambar bergerak.



Gambar 3.9 *Banner Body* Bingkai 1

Sumber: fpi.or.id

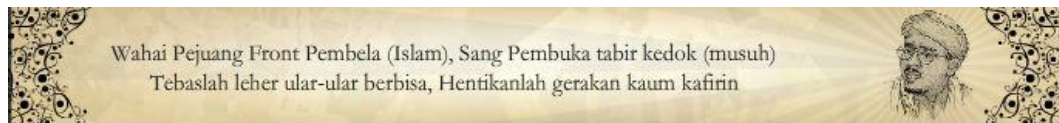
Bingkai pertama (gambar 3.9) *banner*, menyimulasikan sinar matahari yang menyinari langit. Kemudian, bingkai ini disusul oleh pemunculan bingkai kedua. Dalam bingkai kedua (gambar 3.10), sosok Habib Rizieq muncul dari arah sebelah kiri layar ke bagian tengah bentangan *banner*, seolah menyusun pemaknaan sentralitas dan kesucian Habib yang muncul dari langit dan memberikan pesan (wahyu). Kemudian, disusul oleh bingkai ketiga (gambar 3.11) dan keempat (gambar 3.12) yang menyimulasikan pesan dari Habib.



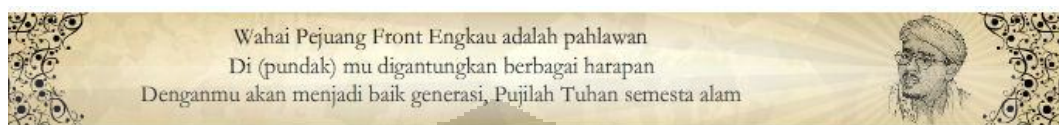
⁴⁵ <http://fpi.or.id/index.php?p=visimisi&mid=2>.

Gambar 3.10 *Banner Body* Bingkai 2

Sumber: fpi.or.id

Gambar 3.11: *Banner Body* Bingkai 3

Sumber: fpi.or.id

Gambar 3.12 *Banner Body* Bingkai 4

Sumber: fpi.or.id

Bila diperhatikan, simulasi bingkai-bingkai ini terlihat merepresentasikan keluhuran dan kesucian sosok Habib Rizieq. Kesan luhur dan suci terlihat diasosiasikan dengan penggunaan elemen langit dan sinar matahari yang, bila disatukan dengan pesan-pesan dalam bingkai *banner*, terlihat mengonstruksi pemaknaan pesan dari langit.

Pesan dari langit biasanya diasosiasikan dengan pesan dari Tuhan, dan hal ini diperkuat dengan penggunaan kata sapa “Wahai”. Kata “wahai” sering ditemukan dalam narasi-narasi agama, seperti kata sapa Tuhan pada umat: “Wahai manusia”, atau kata sapa yang digunakan nabi ketika menyapa umat muslim: “Wahai kaum muslimin”, sehingga memunculkan pembacaan bahwa pesan yang disampaikan oleh Habib Rizieq merupakan ‘pesan dari langit’, pesan dan titah agama bagi “Front Pembela (Islam)” untuk membela umat dan agama. Hal ini pun merepresentasikan pembenaran bagi FPI untuk melakukan aksi-aksinya di ruang publik Indonesia. Karena itu, aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus ditegakkan.

3.4.5 Kesimpulan

Analisis ini menghasilkan beberapa poin mengenai konsep-konsep umat dan penegakan syariat yang diperjuangkan FPI. Konsep umat, dalam hal ini, dipersepsikan sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka negara-bangsa, sehingga konstruksi *global ummah* tidak terlihat begitu dikedepankan.

Konsep umat ideal yang dikedepankan oleh FPI terlihat berpusat pada akhlak umat.

Bila analisis ini dikaitkan dengan peran *new media* dalam memberikan ruang penyuaran dan konstruksi identitas, terlihat bahwa situs resmi FPI memberikan ruang bagi FPI untuk menyuarakan posisinya kepada publik. Dari analisis terhadap beberapa elemen situs ini, terlihat bahwa identitas yang terlihat begitu kuat direpresentasikan di dalam situs adalah identitas perlawanan (*resistence identity*).

Namun demikian, bentuk artikulasi identitas perlawanan ini terlihat berusaha dinegosiasikan. Terkesan FPI berusaha memberikan pembeda antara gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam dengan gerakan pembelaan umat. Argumen-argumen visual dan tekstual yang dimunculkan di dalam situs terlihat diarahkan untuk mengonstruksi pemaknaan ini. Akan tetapi, bila dilakukan pembacaan lebih jauh, terlihat bahwa argumen-argumen tersebut menunjukkan kontradiksi. Di satu sisi, FPI terkesan mengasosiasikan identitasnya sebagai bagian dari konsepsi bangsa, namun di sisi lain, FPI terlihat mengasosiasikan dirinya dengan komunalitas agama.

Hal ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, identitas FPI adalah identitas yang cair. Kecairan ini terlihat dari tidak konsistennya pengasosiasian identitasnya. Kedua, kecairan identitas ini menunjukkan bahwa gerakan FPI merupakan gerakan politis, bukan gerakan ideologis dan agama. Bila gerakannya merupakan gerakan ideologis, cita-cita penegakan syariat secara *khaffah* tentunya mensyaratkan konsistensi, bukan negosiasi. Kekuatan argumentasi-argumentasi tekstual yang dimunculkan FPI di dalam situsnya menepis stereotipe terhadap FPI sebagai organisasi yang tidak 'rasional' dan 'bar-bar'. Argumen-argumen tersebut menunjukkan bahwa FPI adalah organisasi yang juga memiliki kemampuan intelektualitas yang 'tinggi'.

Untuk melihat bagaimana konstruksi-konstruksi ini dipersepsikan oleh publik dan media, maka pembahasan akan melangkah pada tahap kedua, yaitu analisis terhadap komentar-komentar di dalam situs berita *online*.

3.5 FPI, Media, dan Partisipasi Publik

Perdebatan mengenai aksi-aksi FPI di ruang publik dan wacana radikalisme Islam tidak bisa dilepaskan dari peran media dalam memberikan informasi kepada publik. Media massa cetak maupun elektronik terlihat begitu gencar memberitakan aksi-aksi FPI, sehingga membentuk opini publik tentang keberadaan dan aksi-aksi FPI.

Dalam kerangka proyek *civil society* Habermas⁴⁶, keberadaan media massa diletakkan sebagai elemen penting dalam membentuk suatu *public sphere* dan ruang publik bagi berlangsungnya partisipasi publik, sehingga *civil society* yang demokratis bisa terwujud. Sementara itu, Anderson⁴⁷ berpendapat bahwa keberadaan media massa juga berperan dalam pembentukan narasi kebangsaan. Dalam hal ini, media massa dipandang memberikan suatu *shared experience* dan *narrative* mengenai keberadaan sebuah *imagined community*. Namun demikian, sentralitas media massa pada institusi modal ataupun negara ditengarai menciptakan persepsi-persepsi dan opini yang berpihak pada kepentingan-kepentingan kuasa, baik itu kepentingan institusi kapitalis atau negara⁴⁸. Keberpihakan media massa terhadap kepentingan kuasa ini dipandang memberikan informasi-informasi yang cenderung menciptakan suatu “*false consciousness*” akan realitas yang ada.

Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, pertentangan antara posisi media di ruang publik juga terlihat mewarnai perdebatan antara gerakan-gerakan pro-demokrasi dengan gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Gerakan pro-demokrasi menempatkan media massa sebagai bagian dari proyek demokrasi. Sementara itu, gerakan-gerakan Islam fundamental dan radikal memandang media massa sebagai bagian dari kepentingan kelompok-kelompok yang berencana merusak umat.

Namun demikian, hadirnya Internet di ruang publik Indonesia terlihat memberikan ruang partisipasi publik yang luas. Internet memungkinkan publik

⁴⁶ Habermas, J. (1974). “The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964).” *New German Critique*, (3), 49. doi:10.2307/487737.

⁴⁷ Anderson, B. (1991). *Imagined Communities*. London: Verso.

⁴⁸ Kritik yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh *the Frankfurt School*, seperti Adorno dan Horkheimer.

untuk menyuarakan pendapat dan pengalamannya⁴⁹. Dalam hal ini, Internet memberikan akses pengetahuan dan informasi yang luas bagi publik. Sentralitas media massa dalam memberikan informasi dan pengetahuan terlihat ‘tersaingi’ oleh munculnya blog-blog pribadi, situs jejaring sosial, wikis, dan situs-situs lainnya. Bila dikaitkan dengan wacana perdebatan mengenai aksi-aksi FPI, Internet memberikan ruang bagi publik untuk menyuarakan pendapatnya.

FPI, Media, dan publik hadir di Internet. FPI, melalui situs resminya, seperti yang telah saya bahas, terlihat menyuarakan posisinya. Namun demikian, situs FPI tersebut terlihat tidak memberikan ruang bagi publik untuk memberikan komentar langsung tentang FPI. Komentar publik hanya bisa dilakukan melalui email yang disediakan di situs. Komentar-komentar publik tentang FPI justru terlihat di dalam situs-situs berita *online*, seperti: tempo.co, vivanews.com, dan detik.com (transcorp). Setelah ditelusuri, situs-situs berita *online* tersebut juga memiliki keterkaitan dengan institusi media populer.⁵⁰

Berdasarkan konteks-konteks di atas, di dalam subbab ini, saya akan mengeksplorasi opini-opini publik di dalam ruang komentar ketiga situs berita *online* terhadap keberadaan FPI dan gerakan-gerakan radikalisme Islam di ruang publik Indonesia. Saya mengaitkan hasil analisis terhadap representasi identitas dan konsepsi umat di dalam situs FPI dengan beberapa artikel dan komentar di dalam ketiga situs tersebut.

3.5.1 Kontestasi Ruang Interpretasi dan Ruang Publik

Analisis terhadap beberapa elemen situs FPI menunjukkan adanya representasi identitas bangsa dan agama. Dalam representasi tersebut, terlihat FPI berusaha memaknai dan mengasosiasikan identitasnya sebagai bagian dari bangsa dan agama. Namun, bentuk representasi tersebut terlihat menunjukkan kontradiksi ketika dibaca lebih jauh. Negosiasi yang terlihat berusaha disusun oleh FPI sebaliknya malah menunjukkan sisi pertentangan FPI dengan identitas bangsa.

⁴⁹ Seperti telah saya kemukakan pada BAB 2 mengenai konteks masyarakat jaringan. Untuk diskusi lebih jauh mengenai potensi Internet dalam menciptakan masyarakat demokratis, bisa dilihat dalam Poster, M. (2001). *What's the Matter with the Internet*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

⁵⁰ tempo.co (grup tempo media), vivanews.com (satu grup dengan anTV dan tvOne), dan detik.com (transcorp).

Untuk melihat bagaimana konstruksi identitas bangsa dan agama ini dipersepsikan oleh media dan publik, saya mengambil pemberitaan mengenai aksi perusakan patung yang dilakukan oleh FPI. Topik kasus ini saya pilih karena nuansa permasalahan identitas bangsa dan agama terlihat cukup kental.

Sasaran-sasaran FPI dalam aksi perusakan tersebut di antaranya adalah patung wayang di daerah Purwakarta (2011) dan patung tiga mojang di Bekasi (2011). Berkenaan dengan aksi ini, secara khusus FPI menuliskan artikel di situsnya. Dua dari situs berita *online* pun memberitakan aksi perusakan ini. Dalam situsnya, FPI menuliskan artikel yang berjudul “Sikap FPI Terhadap Pembuatan Patung di Indonesia⁵¹”, sementara artikel terkait yang dimuat dalam kedua situs berita adalah: “Patung Tiga Mojang Dipotong-potong Besok⁵²” dan “Patung Tiga Mojang Menjadi Icon Hotel di Jogjakarta⁵³” di tempo.co dan “Pasca Insiden Patung, Polisi Siaga di Purwakarta⁵⁴” di detiknews.com. Di dalam artikel berita tersebut, terdapat beberapa komentar dari pengunjung.

3.5.1.1 FPI dan Patung-patung Haram

FPI berpendapat bahwa di ruang publik Indonesia banyak diletakkan patung-patung yang ditafsirkan sebagai “PATUNG HARAM”. Patung haram tersebut, menurut FPI, menuai banyak protes dan reaksi keras dari umat Islam. Dalam penafsiran patung haram dan pembenaran terhadap aksi-aksi penolakan yang terjadi, terlihat beberapa konstruksi wacana.

Keharaman patung dikaitkan dengan syariat Islam yang mengatur batasan-batasan patung yang haram atau tidak. Persepsi syariat ini kemudian dipergunakan FPI untuk menafsirkan dan menentukan bentuk-bentuk identitas budaya lokal yang sesuai dan tidak sesuai untuk diartikulasikan di ruang publik. Dalam konteks perobohan patung di Purwakarta, misalnya, FPI menafsirkan bahwa patung tokoh pewayangan yang ditempatkan di ruang publik merupakan suatu bentuk

⁵¹ <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=477>.

⁵² <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/27/057266560/Patung-Tiga-Mojang-Dipotong-potong-Besok/3> (diakses pada 8 Maret 2012).

⁵³ <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/27/057266689/Patung-Tiga-Mojang-Menjadi-Icon-Hotel-di-Jogjakarta> (diakses pada 8 Maret 2012).

⁵⁴ <http://news.detik.com/read/2011/09/18/180317/1725035/10/pasca-insiden-patung-polisi-siaga-di-purwakarta> (diakses pada 8 Maret 2012)

pelanggaran syariat. Patung pewayangan, menurut FPI, merupakan simbolisasi “Alam Pewayangan” yang mengarah pada kesyirikan dan merusak “[ke]tauhid[an]” masyarakat Purwakarta.

Kota Purwakarta, bagi FPI, dipandang sebagai “Kota Kyai”, yang berarti kota yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, bukan pada ajaran-ajaran sesat dan musyrik. Dengan pengasosiasian ini, FPI menafsirkan bahwa ruang publik serta penanda kota harus mengusung identitas-identitas yang sesuai dengan syariat Islam karena, menurutnya, “tidak boleh melindungi budaya dengan menghancurkan agama, tapi jagalah agama dengan membenahi budaya”. Hal ini menunjukkan suatu penafsiran yang dilandasi oleh dominasi identitas agama terhadap identitas budaya.

Patung-patung yang merupakan bagian dari identitas budaya dan identitas keagamaan lain, menurut FPI, hanya boleh diletakkan di ruang privat masing-masing, seperti “patung Yesus atau Bunda Maria di dalam Gereja, patung Budha di dalam Vihara, aneka patung di dalam candi”. Karena itu, peletakan simbol-simbol keagamaan dan kebudayaan dalam bentuk interpretasi atau representasi seni yang tidak sesuai dengan syariat Islam di ruang publik dipandang sebagai bentuk “PROVOKASI JAHAT” terhadap umat Islam. Dengan demikian, konsep ruang terlihat dipisah-pisahkan antara ruang mayoritas dan ruang minoritas, ruang agama dan ruang budaya. Penafsiran-penafsiran ini pun mengindikasikan klaim-klaim FPI terhadap ruang publik. Ruang publik, dalam hal ini, terlihat dipersepsikan sebagai ruang yang harus ‘diwarnai’ dengan nuansa syariat Islam sebagai konsekuensi dan hak umat mayoritas.

Kontestasi antara wacana agama dan budaya dalam permasalahan patung pun terlihat dikaitkan juga dengan isu politis. Dalam permasalahan patung di Purwakarta, misalnya, FPI mengaitkan aksi perusakan dengan penghamburan dana APBD Purwakarta oleh Walikota Purwakarta. Disebutnya bahwa pembuatan patung tersebut merupakan kebijakan yang tidak memihak pada rakyat. Namun, nuansa politis ini pun kemudian tersamarkan dengan mengaitkannya dengan personalitas dan sikap walikota Purwakarta, yang dipandang FPI menentang syariat Islam.

Interpretasi Bupati Purwakarta terhadap seni dan budaya Sunda dipandang FPI sebagai interpretasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Melalui serangkaian narasi dan argumen yang mempertanyakan ‘keislaman’ Bupati Purwakarta, FPI terlihat memasuki ruang pribadi dan etnisitas. Bupati Purwakarta, dalam hal ini, disebutnya sebagai pihak yang berusaha membawa masyarakat Purwakarta kembali ke “Alam Pewayangan” yang syirik. Hal ini menjadikan argumen bagi FPI untuk menyerukan agar umat Islam dan masyarakat Purwakarta melawan bupati tersebut karena, secara politis dan agama, sosok bupati adalah sosok yang harus dilawan dan dijatuhkan.

Secara keseluruhan, persepsi FPI tentang permasalahan patung ‘haram’ terlihat menunjukkan suatu relasi kuasa antara agama, budaya, dan politik. Dalam hal ini, agama terlihat diposisikan sebagai wacana dominan di tengah keragaman budaya dan dinamika politik yang berlangsung. Agama, dalam hal ini, terlihat diposisikan sebagai wacana untuk melakukan klaim dan penguasaan ruang publik secara kultural dan politis, sehingga permasalahan patung, dalam hal ini, merupakan situs pergulatan makna dan kuasa.

3.5.1.2 Mojang dan Wayang: Agama, Budaya, dan Politik

Dalam situs berita tempo.co dan detiknews.com, pemberitaan dan diskusi mengenai aksi perusakan patung yang dilakukan oleh FPI bisa ditemukan dalam artikel “Patung Tiga Mojang Dipotong-potong Besok”, “Patung Tiga Mojang Menjadi Icon Hotel di Jogjakarta”, dan “Pasca Insiden Patung, Polisi Siaga di Purwakarta”. Patung tiga mojang dan patung karakter wayang, dalam hal ini, merupakan representasi identitas budaya Sunda. Namun demikian, patung-patung tersebut ditafsirkan FPI sebagai patung haram.

Patung mojang, dalam artikel pertama di tempo.co, disebutkan dibongkar dari ruang publik kota Bekasi oleh pemerintah setempat dengan alasan keamanan yang tidak kondusif dan tekanan-tekanan dari ormas Islam kota Bekasi yang menolak keberadaan patung di tengah ruang publik masyarakat kota Bekasi karena diindikasikan menyerupai Bunda Maria (“Patung Tiga Mojang Dipotong”). Namun kemudian, di artikel kedua, disebutkan bahwa “patung yang mengeksplorasi budaya masyarakat Priangan tersebut...terpaksa dipindahkan ke

luar kota karena ditolak masyarakat yang budayanya terwakili...yaitu masyarakat Bekasi, Jawa Barat” (“Patung Tiga Mojang Menjadi Icon”, tempo.co). Artikel kemudian menyebutkan bahwa patung tersebut dipindahkan ke sebuah hotel di daerah Jogjakarta.

Dalam artikel tersebut, terimplikasikan bahwa ormas Islam memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk ‘memerintah’ penguasa setempat untuk membongkar dan memindahkan patung dari Bekasi. Kondisi keamanan terlihat menjadi prioritas pemerintah setempat untuk membongkar patung tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemindahan patung oleh pemerintah merupakan bagian dari tindakan politis (tekanan), bukan merupakan suatu tindakan yang berdasarkan agama atau budaya. Artikel pun terlihat menunjukkan sisi politisnya ketika ormas Islam kemudian diasosiasikan sebagai masyarakat kota Bekasi, sehingga memunculkan kesan bahwa seluruh masyarakat Bekasi melakukan penolakan terhadap keberadaan patung (haram) di ruang publik. Penggantian penyebutan patung Bunda Maria dalam artikel sebelumnya,⁵⁵ dengan patung yang mengeksplorasi budaya Priangan pada artikel kedua⁵⁶ pun terlihat sisi politisnya. Penggantian asosiasi ini⁵⁷ terlihat berusaha mengalihkan isu agama menjadi isu etnis. Patung yang sebelumnya diasosiasikan sebagai penanda identitas agama (Bunda Maria) terlihat disusun ulang menjadi penanda identitas budaya (budaya priangan), sehingga terkonstruksi pemaknaan bahwa penolakan yang terjadi bukanlah penolakan dari umat Islam, melainkan penolakan dari masyarakat Bekasi terhadap identitas budaya Sunda (Priangan) yang terkesan dipaksakan.

Di satu sisi, artikel terlihat berusaha ‘menekan’ konflik yang mungkin terjadi di antara pemeluk agama, namun di sisi lain, artikel menghadirkan kemungkinan lain, yaitu konflik antara lokal (Bekasi) dan pusat (Jawa Barat). Seakan-akan, masyarakat kota Bekasi memiliki penanda yang berbeda dengan penanda-penanda identitas budaya Sunda. Dari konteks ini, terlihat bahwa artikel bermain dalam pola relasi kuasa antara agama, budaya, dan politik. Dalam hal ini, artikel terlihat berposisi pada wacana politis dan budaya, sehingga permasalahan

es Patung Tiga Mojang Dipotong-potong”.

⁵⁶ “Patung Tiga Mojang Menjadi Icon”.

⁵⁷ Ormas Islam menjadi masyarakat Bekasi, Bunda Maria menjadi eksplorasi budaya Priangan.

agama terlihat dikesampingkan. Maka, klaim ‘masyarakat’ terhadap ruang publik pun terlihat sebagai klaim lokalitas terhadap dominasi penanda budaya luar (Sunda). Bila dikaitkan dengan wacana pemisahan kota Bekasi dari Jawa Barat,⁵⁸ terlihat bahwa artikel ini secara ‘tidak langsung’ berusaha mengaitkan pembongkaran patung dengan wacana politis tersebut.

Penelaahan terhadap artikel di tempo.co ini menunjukkan bahwa dalam Patung Tiga Mojang terdapat pola-pola relasi kuasa yang bukan saja sebatas wacana agama, namun juga wacana budaya dan politik. Untuk mengeksplorasi lebih jauh dan melihat cara publik mengaitkan patung dan aksi perobohan dengan konteks-konteks wacana, berikut saya paparkan analisis terhadap komentar di dalam kedua artikel tersebut.

Wacana yang termunculkan sekitar patung Tiga Mojang di dalam komentar pengunjung terlihat diasosiasikan dengan berbagai konteks, sehingga perdebatan mengenai patung Tiga Mojang memunculkan kompleksitas. Bila dilihat dari kategorisasi dominasi, resistensi, maupun negosiasi publik terhadap keberadaan patung dan aksi pembongkarannya, perdebatan yang berlangsung terlihat didominasi oleh pendapat-pendapat yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pembongkaran tersebut. Namun demikian, hal yang membuat permasalahan menjadi kompleks adalah penafsiran dan asosiasi yang dikeluarkan publik ketika memberikan komentar.

Dua pemberi komentar yang menunjukkan kesetujuannya terhadap pembongkaran patung mengaitkan patung dengan pemujaan pada seni, dan pemujaan pada seni ditafsirkan sebagai pemujaan terhadap berhala yang diasosiasikan dengan syirik. Salah satu dari mereka, dengan nama layar RAYA,⁵⁹ terlihat mengaitkannya dengan konteks yang lebih jauh. Disebutkannya bahwa:

buat cinta seni yth,
apa anda pernah membaca sejarah peradaban Islam???selama 13 abad lebih, negara persatuan Islam memimpin 2/3 dunia dengan bekal apa???Islam, bukan seni. kalau semua berdasar seni, berarti berdasarkan pada nafsu manusiami. maka jangan heran,

⁵⁸ Isu yang mulai mencuat pada 2010. Informasi bisa dilihat di <http://www.tempo.co/read/news/2010/09/27/178280877/Ketua-DPRD-Jawa-Barat-Tidak-Setuju-Pemekaran-Jawa-Barat>, atau <http://www.tempo.co/topik/masalah/164/Pemekaran-Wilayah>.

⁵⁹ Penulisan nama layar mengikuti nama yang tercantumkan di dalam situs.

Indonesia tidak akan pernah maju kalau tidak menggunakan Islam sebagai landasannya,
BUKAN SENI

RAYA, 27/07/2010 11:28:00 WIB

use  web via [tempoco](#)

Dalam pendapatnya tersebut, seni dikontraskan dengan kejayaan peradaban Islam yang, menurutnya, dibangun berdasarkan (syariat) Islam, bukan berdasarkan seni. Hal yang menarik adalah munculnya ‘sentimentalitas’ dan romantisasi kejayaan Islam di dalam pernyataannya. Romantisasi akan keberadaan suatu “*global ummah*” dalam konsepsi negara persatuan Islam (Daulah Islamiyah). Namun, romantisasi ini terlihat dikontradiksikan dengan realitas kebangsaan Indonesia yang dipandang tidak berdasarkan syariat Islam. Idealisasi kemajuan bangsa dan umat terlihat diletakkan pada penegakan syariat.

Idealisasi pada penegakan syariat ini terlihat merupakan respon terhadap komentar sebelumnya yang diberikan oleh salah satu pengunjung dengan nama layar CINTA SENI sebagai berikut:

Peristiwa pembakaran patung dengan alasan yang asal-asalan sungguh sebagai sebuah pertanda Bekasi berjalan mundur. Karena semakin jauh kecintaan manusia terhadap seni, semakin dekat mereka kedalam kebidaban.

CINTA SENI, 27/07/2010 11:22:29 WIB

use  web via [tempoco](#)

Dalam pernyataan CINTA SENI, terlihat bahwa konsep kemajuan dan idealisasinya justru pada kecintaan pada seni. Pembongkaran tersebut dipandang sebagai suatu bentuk kebidaban. Kedua perbedaan pandangan mengenai idealisasi kemajuan dan peradaban ini merepresentasikan kontestasi penafsiran antara konsep peradaban Islam yang mengacu pada penegakan syariat dengan konsep peradaban yang mengacu pada nilai-nilai budaya. Terlepas dari dua kontestasi ini, patung tiga mojang dan aksi pembongkarannya dipersepsikan sebagai bagian dari wacana peradaban dan kemajuan umat dan bangsa.

Patung Mोजang juga diasosiasikan dengan penanda identitas budaya. Salah satu pengunjung dengan nama layar MAS PRAWIRO memandang pembongkaran patung sebagai tindakan yang ‘mencerabut’ identitas Bekasi dari identitas budaya

Sunda dan menggantinya dengan identitas budaya Timur-Tengah. Padahal, menurutnya, identitas Bekasi merupakan bagian dari identitas budaya Sunda yang tak bisa dipisahkan. ‘Sentimen’ terhadap dominasi budaya Timur-Tengah atas budaya lokal dan nasional pun muncul di dalam komentar beberapa pengunjung, seperti digantinya patung tersebut dengan patung unta, atau dibongkarnya monas dan patung-patung pahlawan karena dipandang sebagai bagian dari berhala.

Sebagian besar dari pengunjung yang menunjukkan ketidaksetujuannya terlihat mengkritisi posisi pemerintah daerah (Kota Bekasi) maupun pusat dalam menindak aksi-aksi kelompok-kelompok yang disebut sebagai “organisasi semacam mafia” dan “Front/Laskar padang pasir”. Kutukan, ejekan, dan cacian terhadap pemerintah pun terekspresikan di dalam komentar-komentar pengunjung seperti:

Pemerintah SBY diam saja terhadap anarkisme FPI & Sektarianisme.... moga2 pemerintahannya tidak bertahan lama...

BISMA, 08/08/2010 20:10:28 WIB

use  ie via tempoco

Kok bisa orang bodoh seperti itu jadi walikota ? Apa yang milih enggak lebih bodoh ?

DESI ARDANA, 08/08/2010 19:54:19 WIB

use  chrome via tempoco

Walaupun terlihat ‘asal bunyi’, sebutan-sebutan menunjukkan bentuk kritikan terhadap pemerintah yang ‘mungkin’ susah untuk diekspresikan langsung bila dikaitkan dengan konteks *offline*.

Analisis terhadap komentar-komentar ini menunjukkan bahwa wacana mengenai perobohan patung Tiga Mojang merupakan wacana yang cukup kompleks dan cair. Dalam hal ini, penggunaan kata “ormas Islam” di dalam artikel sebagai pihak yang menekan pemerintah daerah diasosiasikan dengan gerakan-gerakan radikalisme Islam yang ‘dipelesetkan’ menjadi gerakan “organisasi semacam mafia”, “Front/Laskar padang pasir”, dan “ormas-ormas anarkis”. Komentar-komentar yang muncul mengaitkan keberadaan kelompok-kelompok ini dengan gerakan-gerakan yang berusaha mengganti identitas lokal

dan bangsa dengan identitas Timur-Tengah. Perobohan terhadap patung tersebut dipersepsikan sebagai bentuk ‘ancaman’ terhadap ruang budaya dan ruang publik oleh kekuatan kelompok-kelompok yang berasosiasi dengan budaya asing (Timur-Tengah), sehingga konstruksi wacana di dalam artikel yang berusaha mengalihkan isu agama ke isu politik lokal diterjemahkan menjadi permasalahan kebangsaan. Sentimen agama yang muncul di dalam artikel dengan menggunakan kata “patung Bunda Maria” tidak memicu perdebatan bernuansa SARA. Artikel terlihat berhasil membentuk opini publik tentang ketidakmampuan pemerintah untuk menangani aksi ormas Islam yang disebutkan di dalamnya. Meskipun menggunakan kalimat-kalimat yang berkesan ‘asal bunyi’, partisipasi publik dalam bentuk penyuaran terhadap kebijakan atau aksi yang terjadi di ruang publik (*offline*) tetap bisa berlangsung.

Sementara itu, di dalam artikel berjudul “Pasca Insiden Patung, Polisi Siaga di Purwakarta” di detiknews.com, diberitakan bahwa perusakan dan perobohan patung Wayang di Purwakarta dilakukan oleh massa. Tempat terjadinya peristiwa dinarasikan dalam kondisi dijaga oleh polisi dan aparat Satpol PP untuk mencegah kerusuhan. Berdasarkan informan bernama Tedy, yang diwawancari oleh reporter detiknews.com, disebutkan bahwa perusakan dan perobohan itu didasari oleh ketidakpuasan warga terhadap “kebijakan Bupati Purwakarta yang telah membangun aneka patung”. Ketidakpuasan tersebut dipaparkannya sebagai akibat dari ketidakjelasan kebijakan dan penggunaan dana APBD.⁶⁰

Penarasian peristiwa (berita) dalam artikel detiknews.com ini terlihat berbeda dengan cara penarasian peristiwa dalam tempo.co. Dalam artikel detiknews.com ini, berita terkesan dihadirkan dengan sudut pandang objektif, dengan menghadirkan dan ‘membiarkan’ salah satu informan untuk menceritakan peristiwa, sehingga menimbulkan kesan keobjektifitasan dan keaktualitasan berita. Pelaku perusakan dan perobohan disamakan menjadi massa, yang kemudian diperjelas oleh si informan menjadi warga. Dengan demikian, pelaku

⁶⁰ Ada kesamaan dengan konteks yang disebutkan FPI di dalam artikelnya.

perusakan dan perobohan tidak diasosiasikan dengan kelompok atau ormas Islam, namun diasosiasikan dengan publik atau warga Purwakarta.

Dengan strategi narasi yang menghadirkan kondisi objektif peristiwa, artikel berusaha menjaga jarak antara interpretasi media dengan realitas yang ada, dan seakan tidak berusaha menggiring opini publik tentang peristiwa yang terjadi. Namun, konstruksi realitas yang dibangun menunjukkan sisi politis artikel tersebut. Pemilihan Tedy dari sekian banyak warga Purwakarta sebagai informan terkesan politis. Kriteria seperti apa yang dipergunakan oleh reporter sehingga hanya Tedy yang dipilih? Kemudian, pengasosiasian pelaku perusakan berusaha diarahkan untuk tidak membentuk opini publik tentang keberadaan kelompok-kelompok Islam di belakang aksi-aksi perusakan dan perobohan tersebut.⁶¹ Dengan demikian, usaha untuk menunjukkan kobjektifitasan berita ini merupakan upaya yang juga berusaha membentuk opini publik, sehingga pemberitaan ‘objektif’ mengenai peristiwa ini pun menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa yang berlangsung di sekitar wacana perusakan patung.

Selanjutnya, untuk mengeksplorasi persepsi publik tentang peristiwa dan pemberitaan perusakan patung di Purwakarta, berikut saya paparkan hasil penelaahan komentar-komentar di dalam artikel detiknews.com tersebut.

Bila dilihat secara keseluruhan, komentar-komentar di dalam artikel menunjukkan resistensinya terhadap aksi perusakan dan perobohan patung Wayang. Objektifitas yang berusaha dihadirkan oleh artikel menggiring opini publik untuk mengaitkan peristiwa perusakan tersebut dengan kebijakan Bupati Purwakarta dalam penggunaan APBD. Namun demikian, kompleksitas wacana berkembang pada konteks-konteks lain.

Strategi narasi teks artikel yang berusaha menekan isu agama dipersepsikan dengan cara berbeda. Perdebatan justru melebar ke permasalahan agama. Pertentangan yang terjadi justru bukan sekitar pertentangan mengenai syariat Islam, namun mengarah pada ejekan bernuansa agama, etnisitas, dan ras,

⁶¹ Sementara itu, FPI di dalam pernyataannya begitu kuat memunculkan konteks agama dalam aksi perusakan dan perobohan patung.

sehingga memicu seorang pengunjung dengan nama layar Aryahadikusuma berkomentar:

 **Aryahadikusuma** 18 Sep 2011 19:42:39 WIB



Semua komentar kita hargai__pada dasarnya ini adalah ketidakpekaan seorang bupati thdp rakyatnya,semua ada aturan main yg jelas_kenapa bupati membuat symbol patung Tokoh wayang,KISEMAR dan PANDAWA_? itu kebanggaan dlm menghargai seni_tapi mestinya ada Prioritas,dan Masyarakat Purwakarta jgn terpancing Provokasi yg tdk baik,walau pun dari ulama,penyaluran Aspirasi ada caranya,jgn merusak_rugi semua khan?mari kita duduk bersama,dan mohon kepada saudara saudaraku,jgn kita membawa bawa agama dlm berkomentar.oke

 **Beri Tanggapan**  **Laporkan**  **Suka**

Komentar Aryahadikusuma berusaha meredakan perdebatan yang terlihat meluas ke permasalahan agama. Aryahadikusuma menegosiasikan perdebatan mengenai perusakan patung. Perusakan tersebut dipandanginya bukan permasalahan agama, namun lebih merupakan permasalahan kebijakan bupati yang tidak tepat.

Perdebatan bernuansa ejekan antar-agama dimulai oleh seorang pengunjung dengan nama layar ibebas, yang menuliskan komentar:

 **ibebas** 18 Sep 2011 22:42:53 WIB

Siapa pelakunya ? Si pengikut * damai...  Tapi, gerembolan * patung miss V dikubus hitam gak mau terima disalahkan. Akibatnya, * tetangga ikut diserang. Udah biasa kelakuan mereka spt itu  Mari para pemimpin kota seindon, mari rame2 kita bangun patung miss V seukuran gajah, jadi mereka gak perlu lagi nyumbang duit * . Cukup datang ke tempat patung itu mereka sudah bisa teriak2 Labbaik Allahumma Labbaik.

 **1 Tanggapan**  **Beri Tanggapan**  **Laporkan**  **1 Suka**

ibebas secara tidak langsung menyebutkan pelaku perusakan adalah pemeluk agama Islam, namun asosiasi-asosiasi penanda identitas yang digunakannya seperti “kubus hitam” dan “Labbaik Allahuma Labbaik” ditafsirkan oleh Aryahadikusuma sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Walaupun komentar-komentar Aryahadikusuma di *thread* diskusi berusaha untuk tidak mengaitkan permasalahan perusakan patung dengan agama, munculnya komentar dari ibebas mendorongnya untuk mengartikulasikan identitasnya sebagai bagian dari umat

Islam dan melakukan perlawanan terhadap ‘pelecehan’ yang dilakukan oleh ibebas dengan memberikan komentar:

 **Aryhadikusuma** 18 Sep 2011 23:06:15 WIB

@IBEBAS..kenapa sih lu koment spt itu_apa lu tahu * Islam,kok jadi nyimpang topik,!! Islam tdk menyembah batu hajar aswad,kita tdk tahu kalau agama kamu nyembah apa? Yg jelas kamu sgt tdk beradab dgn koment SARA mu..apa orang tua anda yg mengajarkan mencaci dan menghina keyakinan orang lain?sy yakin tidak..kecuali orang tua anda Syetan yg terkutuk...jgn gunakan akal--karna otak anda gak akan sampai__karna anda sungguh sgt terhina,baik di mata manusia,maupun Tuhan--mhn maaf kalau tersinggung,Asuuu!!

Hal inipun terjadi juga dalam komentar pengunjung-pengunjung lain yang merasa tersinggung dengan pernyataan ibebas, yang kemudian menuliskan ejekan-ejekan balasan seperti:

 **omatdoctor** 18 Sep 2011 19:19:41 WIB

Daripada patung bugil dah gak pake baju, gondrong gak pernah cukur dekil... Disembah2 Goblog2!!

 **Mesleck Adiwijaya** 18 Sep 2011 18:59:12 WIB

jgn lupa juga patung bugil di tiang gantungan yg disembah2

 **ibebas itu anak a n j i n g** 19 Sep 2011 00:24:41 WIB

ibebas itu emak-nya B A B I...bapak-nya A n J i N g... makanya komennya ya sekelas B A B I aja...

Bila diperhatikan lebih jauh, ejekan-ejekan yang terjadi berputar di sekitaran penafsiran patung sebagai bagian dari penanda keagamaan. Disadari atau tidak, ‘sakralitas’ patung dan batu dalam konteks ini berhubungan dengan identitas agama.

Dari perdebatan-perdebatan di atas, terlihat bahwa aksi perusakan dan perobohan patung tidak bisa disederhanakan dan dibuat objektif, seperti yang diberitakan dalam artikel detiknews.com. Bingkai realitas yang berusaha dibangun seobjektif mungkin melalui strategi narasi pemberitaan tidak bisa menampung kompleksitas penafsiran terhadap realitas yang terjadi. Dengan demikian, wacana yang berkembang di dalam komentar menunjukkan resistensinya terhadap wacana yang dimunculkan di dalam artikel berita.

Selain itu, di dalam komentar-komentar, pelaku perusakan dan perobohan patung pun diasosiasikan dengan kelompok-kelompok Islam radikal. Massa, dalam hal ini, diinterpretasikan bukan sebagai warga saja, tapi juga sebagai kelompok-kelompok Islam radikal. Sama halnya dengan komentar-komentar dalam artikel patung Tiga Mojang di tempo.co, komentar-komentar mengenai patung Wayang pun menunjukkan ‘sentimen-sentimen’ terhadap klaim kelompok-kelompok tersebut atas ruang budaya dan ruang publik. Kritik dan ‘cacian’ kepada pemerintah pun terekspresikan di dalam komentar-komentar artikel.

3.5.2 Antara Akidah dan Kesesatan: Ruang Tanda Tanya

Identitas perlawanan (*resistance identity*) adalah identitas yang termunculkan dari analisis beberapa elemen situs fpi.or.id. Konstruksi identitas ini dibangun melalui penamaan menu navigasi, pola pengulangan tampilan elemen situs, dan konsepsi idealisasi perjuangan umat di tengah ancaman musuh-musuh yang berusaha merusak akidah dan akhlak umat.

Sentralitas perjuangan tersebut terletak pada penegakan akhlak dan akidah berdasarkan syariat Islam yang *khaffah* dalam ruang publik Indonesia. Konstruksi narasi yang terbaca baik itu dalam elemen visual maupun tekstual mengindikasikan bahwa cita-cita tersebut harus diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap pihak-pihak yang berencana merusak akidah dan akhlak Islam. Secara ideologis dan praktis musuh yang dipersepsikan oleh FPI adalah gerakan-gerakan pro-demokrasi yang ‘bercita-cita’ mewujudkan suatu *civil society* di tengah keragaman bangsa Indonesia. FPI mengidentifikasi gerakan ini sebagai gerakan SEPILIS⁶² yang sesat dan menyesatkan umat.

Penyusupan ide-ide SEPILIS ke dalam kehidupan umat, dalam persepsi FPI, ditempuh melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui film-film sesat yang berusaha memengaruhi akidah umat. Dalam hal ini, razia dan pelarangan pemutaran film-film sesat tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana FPI mewujudkan gerakan-gerakan perlawanannya. Salah satu aksi

⁶² Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme.

razia yang cukup menarik perhatian publik dan media adalah aksi penolakan FPI terhadap pemutaran Film “?”⁶³.

Dalam situs fpi.or.id, posisi penolakan FPI terhadap film “?” sangat ditunjukkan. Pernyataan sikap FPI terhadap film tersebut ‘sengaja’ diletakan di setiap halaman situs. Poster film “?” dan judul artikel penolakan berhuruf kapital cetak tebal terlihat dipampang di bagian *sidebar* setiap halaman situs. Seolah ‘mempromosikan’ posisi penolakan dan sikap FPI terhadap film “?”. Hal ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelaahan terhadap wacana-wacana yang dimunculkan di dalam artikel tersebut. Kemudian, untuk melihat bagaimana reaksi media dan publik terhadap aksi razia dan pelarangan pemutaran film ini, saya memilih dua artikel beserta komentar dari situs vivanews.com dan detiknews.com.

3.5.2.1 FPI dan Tanda Tanya

Artikel berjudul “STOP FILM Perusak Aqidah!”⁶⁴ memaparkan hasil interpretasi FPI terhadap film “?”. Dalam pemaparannya, FPI melakukan interpretasi terhadap poster film, kemudian diperkuatnya dengan menggunakan penafsiran terhadap isi film tersebut. Elemen-elemen poster dianalisis secara mendetil. Dengan menggunakan pembacaan elemen-elemen gambar, FPI berusaha menjelaskan kepada publik bahwa di dalam poster tersebut terdapat unsur-unsur yang menandakan bahwa film “?” adalah film sesat yang bisa merusak akidah. Konteks pemaknaan terhadap poster film tersebut juga dihadirkan dalam pembacaan FPI, seperti tempat poster tersebut dipromosikan, keterkaitan antara *Republika* dengan Hanung Bramantyo, dan penolakan Hanung untuk mengakui “stempel pluralis maupun liberalis untuk filmnya tersebut”.

Respon FPI terhadap penolakan Hanung kemudian diterjemahkan secara simbolis dengan menempelkan tulisan “SESAT” di dalam poster tersebut. Penulisan kata sesat di dalam poster dibuat menyerupai stempel bertuliskan sesat (gambar 3.13).

⁶³ Dibaca “Tanda Tanya”.

⁶⁴ <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=461>.



Gambar 3.13 Poster Film “?” fpi.or.id

Sumber: fpi.or.id

Tindakan ‘vandalisme’ ini menunjukkan upaya FPI untuk menegaskan kesesatan film “?”. Menurut FPI penegasan tersebut penting karena:

Masyarakat awam adalah tingkatan kelompok orang yang lugu dan polos dengan pola pikir yang sangat sederhana. Mereka hanya “memahami” dari apa yang mereka dengar, lihat, tonton dan saksikan dari film tersebut, bukan “menafsirkan” apa yang dimaksud sang sutradara atau produsernya. (“Stop Film Perusak Akidah!”, fpi.or.id)

Bila digali lebih jauh, pernyataan dan “vandalisme” ini adalah suatu ‘penguasaan’ secara simbolis terhadap ruang interpretasi publik. Dengan dipersepsikannya publik sebagai sekelompok orang yang tidak memiliki pengetahuan, FPI berusaha mengonstruksi pemaknaan akan kuasanya terhadap akses-akses publik terhadap pengetahuan. FPI terlihat memosisikan dirinya sebagai bagian dari rejim kebenaran yang memiliki hak untuk menentukan benar atau tidaknya suatu interpretasi, sehingga pola kuasa ini terepresentasikan dalam argumen-argumen FPI mengenai isi film “?”.

Dalam penafsirannya terhadap isi film, FPI berargumen bahwa film tersebut akan memberikan kesan yang salah dan akhirnya akan menyesatkan “masyarakat awam” dan “umat Islam”. Publik (masyarakat awam dan umat Islam) dipersepsikan akan memiliki tafsiran yang sama seperti yang diasumsikan FPI. FPI berasumsi bahwa film “?” memberikan kesan bahwa umat Islam adalah bengis dan intoleran, kemurtadan dan pluralisme itu diperbolehkan oleh agama,

dan penyimpangan dari syariat itu diperbolehkan. Kesan-kesan itu kemudian ditafsirkan kembali oleh FPI sebagai suatu kebohongan dan penyesatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok liberal. FPI kemudian menyatakan perang terhadap semua film yang dipandangnyanya merusak akidah dan syariat.

Persepsi-persepsi yang termunculkan dari pernyataan-pernyataan FPI di dalam artikel ini mengimplikasikan bahwa klaim dan perlawanan FPI terhadap nilai-nilai yang merusak akidah dan syariat Islam tidak hanya dilakukan pada konteks ruang fisik. Perlawanan dan klaim FPI juga diarahkan pada ruang interpretasi dan penafsiran. Dalam hal ini, Film “?” bukan hanya ditolak pada sisi keberadaannya sebagai suatu produk budaya material, namun juga pada konstruksi-konstruksi ideologi yang melatarinya, sehingga konsumsi publik terhadap produk budaya inipun berusaha untuk diatur dan disensor. Dengan demikian, klaim-klaim FPI terhadap ruang fisik dan penafsiran ini bisa dilihat sebagai klaim yang berusaha mendominasi seluruh aspek kehidupan publik (umat).

Untuk menggali persepsi media dan publik terhadap wacana kesesatan film “?” ini, berikut akan saya paparkan analisis terhadap dua artikel dan komentar-komentar di dalamnya.

3.5.2.2 Akidah dalam Tanda Tanya

Artikel pertama yang akan saya bahas adalah artikel dalam vivanews.com. Dalam artikel berjudul “Tayangkan Film ‘?’, FPI Ancam Geruduk SCTV”,⁶⁵ vivanews.com memberitakan rencana aksi penolakan FPI terhadap pemutaran film “?” oleh SCTV. Tepat di bawah judul artikel, vivanews.com menyertakan tulisan yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai penafsiran FPI terhadap film tersebut. Tulisan itu berbunyi “Film ini dinilai FPI merusak moral dan akidah umat Islam.”

Judul artikel dipilih untuk memperkuat kesan ancaman dan kebrutalan FPI. Penggunaan foto (gambar 3.14) di dalam artikel pun sengaja dimunculkan untuk memperkuat kesan tersebut. Usaha untuk mempertentangkan antara moralitas dan

⁶⁵ <http://metro.vivanews.com/news/read/243297-tayangkan-film-----fpi-siap-geruduk-sctv>. (diakses pada 8 Maret 2012).

akidah yang diperjuangkan FPI dengan aksi-aksi ‘brutalnya’ dimunculkan. Kesan ini diperkuat dengan diberikannya *caption* yang berbunyi: “FPI melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor. (www.fpi.or.id)”.



Gambar 3.14: “FPI melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor. (www.fpi.or.id)”

sumber: www.vivanews.com

Narasi pemberitaan disusun untuk menghadirkan keseimbangan dan aktualitas informasi dengan mengutip pernyataan-pernyataan ketua DPP-FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, sebagai pendukung informasi yang disampaikan. Dengan mengutip pernyataan Habib Salim Alatas, vivanews.com menginformasikan bahwa dasar ancaman FPI untuk menolak pemutaran film tersebut adalah karena SCTV berencana untuk memutar film perusak akidah dan moral umat Islam, meskipun MUI telah mengharamkannya.

Ancaman FPI diinterpretasikan oleh [vivanews](http://vivanews.com) dari pernyataan Habib yang menyebutkan bahwa “bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini”. Kemudian, untuk mempertegas ancaman tersebut, vivanews.com menambahkan informasi bahwa FPI akan menghentikan aksinya bila tidak ada pihak-pihak yang berusaha merusak akhlak dan akidah Islam. Konteks lainnya seperti kedatangan FPI ke *Republika*, dan isu pluralisme yang ditudingkan FPI pun disampaikan di dalam narasi.

Dengan demikian, secara keseluruhan narasi yang dipergunakan di dalam artikel berusaha menggiring opini publik terhadap perdebatan mengenai aksi FPI. Indikasi ini tampak dari penggunaan judul dan gambar yang sengaja digunakan

untuk menyusun ulang penafsiran terhadap perjuangan FPI, penggunaan pernyataan habib untuk mendukung argumen, dan dimunculkannya informasi-informasi kunci mengenai kontroversi aksi FPI. Dalam hal ini, artikel terlihat seperti rangkuman dari pernyataan FPI di situsnya.

Konstruksi realitas yang dihadirkan oleh artikel ditafsirkan secara bervariasi di dalam komentar-komentar (60 komentar) pengunjung. Sama halnya dengan hasil analisis komentar dalam kedua artikel berita sebelumnya, komentar pengunjung banyak menunjukkan penolakan terhadap aksi FPI. Namun, kompleksitas wacana yang dimunculkan terlihat menunjukkan nuansa yang berbeda.

FPI dalam komentar-komentar artikel diasosiasikan dengan tindakan-tindakan kekerasan, perusakan, dan brutalitas. Salah satu pengunjung dengan nama layar noname memberikan komentar:



walah.....FPI lagi apa tidak pernah sekolah ya.....kok tidak tahu dan makna pluralisme.....hidup saja di hutan-2 seperti suku pedalaman

• [Balas](#) • [Laporkan](#)

noname

26/08/2011

Dalam komentar noname, FPI diasosiasikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Penentangan FPI terhadap pluralisme ditafsirkan olehnya sebagai suatu kebodohan. Lantas, konsep tak berpendidikan dan kebodohan ini diasosiasikan pada suku pedalaman. Bila dikaitkan dengan asumsi FPI dalam artikel pernyataan penolakan film “?” (STOP Film Perusak Akidah), komentar noname membalikkan asumsi FPI yang menyebut masyarakat awan sebagai kelompok masyarakat polos dan berpikir sederhana. ‘Keluhuran’ FPI atas pengetahuan publik pun disangsikan dalam komentar pengunjung dengan nama layar iii dan rika.



iii

26/08/2011

alah.. bisa2nya FPI ajah... orang islam sekarang sudah cerdas.. toh itu juga cuma film.. apa2 pake grudukan pantes ja gak maju2... gak jelas n kurang kerjaan... swiping segala macam lah... yang harusnya dilakuin adalah menghargai hak asasi orang lain

• [Balas](#) • [Laporkan](#)



rika

26/08/2011

ah.FPI so' banget. tindakannya selalu merasa benar s padahal tindakan yang dilakukan tidak. biarlah orang berfikir. semua udah pada dewasa kok dan berpendidikan. apa yang mesti FPI takutkan 95% agama islam? apakah nonton film orang langsung pindah agama?

Iii dan rika, sebaliknya, memandang bahwa umat Islam justru memiliki kemampuan untuk menafsir⁶⁶ sendiri. Iii memandang justru FPI yang harus diajari cara untuk menghargai hak asasi orang lain. Selain itu, singkatan FPI pun dipesetkan menjadi Font Perusak Indonesia, Front Perusak Islam, bahkan dipesetkan menjadi Front Pendukung Israel.

Dari beberapa komentar tersebut, tampak bahwa klaim FPI terhadap kuasa pengetahuan dan interpretasi ditafsirkan ulang oleh publik. Kemandirian publik terhadap interpretasi dan pengetahuan, seperti dikemukakan rika, membantah asumsi-asumsi FPI. Dalam hal ini, dominasi yang terkesan ingin diraih FPI terhadap ruang interpretasi publik disusun ulang menjadi suatu ejekan dan cemoohan.

Namun demikian, beberapa pengunjung yang memberikan dukungan terhadap FPI menunjukkan pembelaannya. FPI, bagi beberapa pengunjung tersebut, dimaknai sebagai pembela Islam dan pembela akidah. Dukungan terhadap permasalahan pluralisme dan hak asasi yang ditentang FPI muncul dari salah satu pengunjung dengan nama layar juned74 yang mendefinisikan pluralisme sebagai:

juned74
26/08/2011

Bertoleransi yang bagaimana bro???? Anda orang islam, apa anda mau rumah anda dipakai kegiatan agama lain ?.jika anda menjunjung tinggi toleransi (pluralisme)..ya lakukan..berani..paling2 ente digebukin sama ortu ente dan di cap kafir..wasallam.

• Balas • Laporkan

Pendapat juned74 terlihat memiliki kesamaan dengan pendapat FPI tentang film “?”. Dalam hal ini, pluralisme dan toleransi ditafsirkannya sebagai suatu tindakan pencampuran akidah dan syariat (kesesatan). Dengan menggunakan kalimat “digebukin sama ortu ente dan dicap kafir”, Juned74 mempersepsikan bahwa

⁶⁶ Dalam artikel FPI, masyarakat dianggap tidak mampu menafsir.

masyarakat (dalam hal ini orang tua) juga menolak paham tersebut. Bentuk dukungan yang paling kuat tampak dari pernyataan dua pengunjung berikut:



alex

26/08/2011

film ini, Masya Allah benar2 melecehkan dan merendahkan Islam. sudah sepatutnya umat Islam MARAH !!!!! hanung laknatullah



sijabat

26/08/2011

Hanya domba kurap yg iri pada FPI... coba lihat di luar negeri umat Islam itu ditindas,..kami masih nagsih toleransi sama para domba,..yg menjadi kacung di jaman penjajah,..

Reaksi alex menunjukkan kesesuaian dengan reaksi FPI di dalam artikel yang ditulis di situs fpi.or.id. Terindikasikan wacana kesesatan yang ditudingkan FPI terhadap film “?” dipersepsikan alex sebagai suatu kebenaran yang tak terbantahkan, sehingga film “?” dimaknai sebagai suatu penistaan terhadap ajaran agama. Stempel “SESAT” yang terdapat di dalam poster film “?” (gambar 3.13) diekspresikan olehnya dalam bentuk hujatan “hanung laknatullah”.

Wacana perjuangan dan perlawanan umat yang terimplikasikan dari pernyataan sijabat diaktualisasikan menjadi suatu ‘sentimen’ terhadap umat lain yang diasosiasikannya dengan “domba kurap” dan “kacung di jaman penjajah”. Toleransi dipersepsikan sebagai suatu ingatan kolektif yang telah dikhianati oleh umat/golongan “domba kurap”. Bila dikaitkan dengan wacana perlawanan FPI, istilah tersebut merepresentasikan sentimen mayoritas/minoritas yang dimunculkan FPI di dalam perspektif organisasi yang telah dibahas sebelumnya.

Namun demikian, idealisasi perjuangan umat yang terimplikasikan dalam pernyataan sijabat dan beberapa pendukung FPI ditafsirkan dengan berbeda oleh beberapa pengunjung yang menunjukkan penolakannya terhadap aksi FPI. Klaim-kalim FPI terhadap ruang publik Indonesia sebagai situs pergulatan pemaknaan dan kuasa terlihat di-dislokasikan ke tempat-tempat yang dipersepsikan oleh mereka sebagai ruang ideal bagi perjuangan umat, seperti Palestina dan Afghanistan.

Strategi narasi yang dipergunakan vivanews.com tampak mempengaruhi beberapa pengunjung. Peletakan gambar dalam artikel dan penggunaan kata

“moralitas” juga dipergunakan oleh pengunjung untuk memaknai ulang FPI. Moralitas yang diperjuangkan FPI dikontraskan dengan tindakan-tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum, seperti diekspresikan oleh pengunjung dengan nama layar qunyukrawun sebagai “kelompok yang suka melanggar aturan, contoh foto di atas yang memalukan. Memakai pakaian "Islami" tapi gak pake Helm”. Kesesatan dimaknai bukan sebagai bentuk penyimpangan dari akidah. Kesesatan dipersepsikan sebagai bentuk ‘kebodohan’ dan ‘keterbelakangan’ FPI dalam menafsirkan keragaman yang ada.

Narasi yang disusun untuk menghadirkan kata kunci-kata kunci kontroversi berhasil ‘memancing’ terjadinya perdebatan di ruang komentar. Perdebatan-perdebatan yang terjadi lebih mengarah pada pemaknaan aksi yang dilakukan FPI dibandingkan perdebatan terhadap pemaknaan film “?”, sehingga secara keseluruhan strategi narasi yang disusun dalam artikel berhasil membentuk opini publik terhadap aksi penentangan FPI.

Pemberitaan mengenai aksi penolakan FPI terhadap penayangan film “?” di situs detiknews.com dimuat dalam artikel berjudul “Digeruduk FPI, SCTV Batal Tayangkan Film “?””.⁶⁷ Artikel ini memberitakan keberhasilan FPI menggagalkan rencana penayangan film “?” oleh SCTV.

Dengan menggunakan frasa yang sama dengan judul artikel di vivanews.com, artikel ini berusaha menggiring opini publik tentang aksi FPI tersebut. Selain penggunaan judul yang sama, artikel ini pun menggunakan foto (gambar 3.15) yang senada dengan artikel di vivanews.com (gambar 3.14). Seolah-olah menunjukkan kelanjutan ‘cerita’ mengenai rencana aksi penolakan FPI terhadap penayangan film “?”.

⁶⁷ <http://news.detik.com/read/2011/08/27/182934/1712585/10/digeruduk-fpi-sctv-batal-tayangkan-film-> (diakses pada 8 Maret 2012).



Gambar 3.15 Foto Aksi FPI

sumber: detiknews.com

Ketiga pihak yang terlibat dalam wacana penolakan pemutaran film “?” dimunculkan di dalam narasi. Dalam narasi, disebutkan bahwa Habib Salam Alatas⁶⁸ memberikan orasi di depan publik dengan menyerukan bahwa "Film '?' menggambarkan umat islam itu bengis dan jahat. Ada adegan orang islam merusak restoran China, lalu pendeta ditusuk dan gereja dibom".

Sementara itu, untuk menghadirkan keterwakilan dari pihak SCTV *Corprotare Secretary* SCTV, Hardijanto Soeroso, dimunculkan. Pernyataan Hardijanto yang dikutip adalah sebagai berikut: "[t]erimakasih atas silaturahmi dari FPI, ini merupakan masukan dan evaluasi bagi kami. Sebagaimana kita telah berkomunikasi, kami nyatakan tidak akan memutar film '?' pada malam takbiran nanti". Sutradara film “?”, Hanung, di dalam narasi juga dihadirkan dengan memberikan pernyataan bahwa “...Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Buat saya itulah Islam”.

Bila digali lebih jauh, pengutipan-pengutipan informasi ini merupakan salah satu strategi narasi dalam membentuk opini pengunjung. Pengutipan pendapat Habib Alatas merupakan cara artikel menghadirkan kontroversi film “?”. Kontroversi inipun mendapatkan reaksi dari beberapa pengunjung. Beberapa pemberi komentar mengekspresikan kesetujuannya dengan penafsiran FPI, sehingga beberapa pemberi komentar menunjukkan penolakannya terhadap persepsi yang “salah” mengenai Islam, seperti dalam komentar berikut:

⁶⁸ Narasumber yang sama dengan artikel di dalam vivanews.com.

 **Roy's Alfarozi**

28 Aug 2011 06:42:58 WIB

utk mendiskreditkan umat islam banyak cara dilakukan, dr yg halus smp yg kasar. nah, film "?" ini salah satunya. dg alasan ada misi yg ingin disampaikan bahwa islam adalah rohmatan lil'alam, tp visualisasinya justru melecehkan harkat & martabat umat islam, maka sesungguhnya film ini sangat kontra produktif. wahai insan film indonesia, janganlah merasa lbh pintar ttg islam drpd org-2 yg lbh kredibel dr anda ! sikap tawadlu mrpkn solusi utk menyelesaikan setiap masalah... wallahu a'lam.

Dalam komentar ini, representasi tentang “umat Islam” di dalam film dipandang bukan suatu kenyataan yang sebenarnya. Kredibilitas penafsiran dan pemahaman tentang Islam dipandang terletak pada kuasa pengetahuan akan Islam. Dalam hal ini, kuasa pengetahuan dan pemahaman tentang Islam bukanlah milik publik ataupun umat. Kuasa pengetahuan dipersepsikan terletak pada adanya otoritas-otoritas penafsiran (ulama). Bila dikaitkan dengan argumen-argumen FPI, komentar ini mengaktualisasikan perspektif FPI dalam memandang kondisi umat.⁶⁹

Sementara itu, dalam komentar-komentar lain, penolakan terhadap representasi Islam dan idealisasi penafsirannya justru dipandang sebagai perspektif yang tidak melihat realitas ‘yang sebenarnya’, yakni realitas yang direpresentasikan oleh aksi-aksi kekerasan dan intoleransi FPI di ruang publik Indonesia.

 **herdyta**

27 Aug 2011 23:08:03 WIB

kenapa tidak boleh diputar?apakah film itu menjelekkkan Islam atau muslim secara keseluruhan?jawabnya TIDAK. film itu ingin menunjukkan perilaku SEBAGIAN orang Islam yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. kenapa SEBAGIAN yang jelek itu harus dibela,karena memang seperti itulah sikap FPI sehari2, anarkis dengan membawa2 nama Tuhan,padahal jauh dari kehendak Tuhan. tugas kita lah untuk menyadarkan saudara2 kita FPI untuk kembali ke jalan yang benar. pissman hal yang sama terjadi juga kepada umat agama2 lain.apakah perilaku SEBAGIAN orang Amerika dan Yahudi mencerminkan * agamanya?TIDAKK. 😊

Komentar pengunjung dengan nama layar “herdyta” ini, menunjukkan penolakan terhadap interpretasi dan aksi yang dilakukan FPI. Representasi dalam Film “?” dipandang bukan sebagai generalisasi dari ‘umat’ Islam, namun representasi sebagian umat Islam, dalam hal ini FPI. Bila diperhatikan, komentar ini merupakan pendefinisian ulang pemaknaan umat yang selalu dipergunakan oleh FPI. Logika generalisasi FPI dibaca ulang menjadi logika komunalitas FPI

⁶⁹ Perspektif yang dimunculkan dalam pernyataan FPI tentang kesesatan film “?”.


yang sempit. Dengan demikian, komentar ini bisa dibaca sebagai resistensi terhadap ‘dominasi’ FPI dalam memberikan pemaknaan umat.

Perdebatan mengenai isu pluralisme yang ditudingkan FPI kepada film “?” juga mewarnai komentar. Secara garis besar, perdebatan berpusar pada pertentangan antara idealisasi keragaman identitas bangsa dengan penodaan kesucian akidah.

Dalam idealisasi keragaman identitas bangsa, pluralisme dipersepsikan sebagai bagian dari identitas bangsa yang harus dirayakan dan dijaga keberadaannya. Dalam hal ini, pluralisme dimaknai sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang terepresentasikan dalam komentar berikut:

 Frans Lie

28 Aug 2011 05:04:20 WIB

ini-lah negeriku, harapan dan cinta kasih, yang mempunyai 5 agama, dan PANCASILA(Bhinneka Tunggal Ika), dan bermacam-macam suku dan budaya di negeri indonesia ini,. Yang sudah diterapkan atau di tetapkan oleh Ir.soekarno sejak Zaman itu,. Saya merasa banyak perubahan, dalam segi ekonomi, dalam segi politik, dalam segi sosial dan sebagainya,. memang hidup harus ada perubahan,. tapi, masa-masa dulu jangan di lupakan, seperti pada masa-masa zaman soekarno dan soeharto, .

Komentar mengasosiasikan pluralisme dengan idealisasi bangsa Indonesia. Pluralisme, dalam hal ini, diterjemahkan sebagai keragaman yang menyatukan bangsa Indonesia dalam satu narasi bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Dengan mengacu pada masa Soekarno dan Soeharto, pengunjung ini mengonstruksi ingatan kolektif akan kondisi ideal bangsa pada masa lalu. Masa sekarang dipandang sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ingatan masa lalu tersebut (*nostalgia for the present*⁷⁰).

Namun demikian, romantisasi kondisi bangsa disangsikan dalam beberapa komentar lain. Keberadaan gerakan-gerakan radikalisme Islam dipandang sebagai ancaman bagi realitas bangsa yang beragam, seperti terepresentasikan dalam komentar berikut:

⁷⁰ Istilah yang dikemukakan Jameson dalam Frederic, Jameson. (1984). “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism.” *New Left Review*, No. 146: 59-92.

 **Yosef Yulia**

28 Aug 2011 09:00:35 WIB

Klo Kita bentuk Fron Pembela Nasrani .Fron Pembela Budha Fron Pembela Hindu dan Fron Pembela Non Muslim apa akan dilarang oleh Pemerintah berarti melanggar UUD bagaimana NKRI bisa bertahan coy

Pernyataan pengunjung dengan nama layar YosefYulia ini mengimplikasikan adanya disintegrasi bangsa. Pembiaran terhadap gerakan-gerakan komunal (agama) di ruang publik Indonesia dipersepsikannya sebagai penyebab disintegrasi tersebut. Dalam hal ini, komunalitas dipersepsikannya sebagai ancaman bagi konsep kesatuan bangsa.

Pluralisme, bagi sebagian pengunjung lain, dipandang sebagai bentuk penyimpangan akidah dan menyesatkan, sehingga bagi beberapa pengunjung keberadaan FPI di ruang publik, Indonesia justru merupakan suatu bentuk pembelaan terhadap agama dan umat dari serangan-serangan kelompok-kelompok perusak akhlak dan akidah. Seperti terlihat dalam komentar berikut:

 **Fahmi Alhamid**

27 Aug 2011 22:08:27 WIB

Bagus FPI, selamat kalian sdh menjalankan Amar maruf nahi mungkar, teruskan perjuangan kalian utk meluruskan umat manusia di indonesia yg sdh terlalu jauh dari tuntunan Islam, mrk sdh menjadi korban dari semua konspirasi ada dalang dibelakang semua kejadian yg merusak moral generasi muda dan bangsa Islam di indonesia sdh tercuci otaknya dgn Merajalela nya musik selama 24jam ditayangkan di TV dan di mall2 tiap hari yg membuat generasi muda jatuh terpuruk dari norma keislamannya, berantas sinetron2 yg tdk bermutu, spt pembunuhan, penculikan, pekosaan ,fitnah memfitnah, kawin lari, anak melawan orangtuanya, semua film sinetron bertema cerita yg sama semua ttg kejelekan yg menjurus kpd kehancuran

Bila diperhatikan, komentar ini merepresentasikan tafsiran-tafsiran FPI terhadap permasalahan moralitas dan wacana penegakan syariat Islam, yang dalam konteks ini, bisa dimaknai sebagai bentuk aktualisasi sudut pandang FPI dalam perdebatan yang berlangsung.

Berbeda dengan dua komentar sebelumnya, idealisasi bangsa dan umat dipersepsikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wacana penegakan syariat Islam dalam ruang publik Indonesia, sehingga dalam perspektif ini, keberadaan FPI dalam ruang publik Indonesia dipandang sebagai penyelamat bangsa dan agama. Bahkan, dalam komentar lain, FPI dimaknai sebagai sosok penegak hukum di tengah ketiadaan aparat negara, seperti terepresentasikan dalam komentar berikut:

Universitas Indonesia

□ ketika polisi tidak lagi bisa diharapkan, fpi lah yg jadi tumpuan 27 Aug 2011 22:21:15 WIB
 kapan ya fpi ini datang ke kampung saya di pekanbaru utk menutup perjudian yg dibiarkan oleh polisi. kami udh capek melapor, pernah diraxia sekali setelah itu dibiarkan dan 2 kali seminggu mobil patroli polsek datang menjemput uang keamanan. rupanya razia hanya buat mendudukkan angka setoran. ayo fpi, warga rindu aksi mu

Heroisme FPI, dalam komentar di atas, menunjukkan suatu pembalikan posisi antara polisi sebagai penegak hukum dengan FPI sebagai ‘pelanggar hukum’, sehingga stereotipe FPI sebagai kelompok perusak dimaknai sebagai penolong dan peyelamat umat.

3.5.3 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap topik perusakan patung dan penolakan penayangan film “?” di dalam pernyataan sikap FPI, artikel, dan komentar di tiga situs berita *online*, beberapa poin bisa saya simpulkan.

Patung dan film sebagai interpretasi merupakan situs pergulatan penafsiran dan kuasa baik itu di ranah *offline* maupun di ruang maya. Dalam hal ini, materialitas produk budaya tidak bisa dipisahkan dari pembebanan makna dan wacana yang mengitarinya.

Syariat Islam dipergunakan sebagai wacana dan alat untuk melakukan klaim dan penguasaan atas ruang interpretasi dan ruang publik secara kultural dan politis. Dengan dipublikasikannya pernyataan sikap FPI di Internet, terlihat bahwa FPI berusaha untuk menyuarakan interpretasi dan menyerukan klaimnya terhadap publik. Hal ini menunjukkan usaha FPI untuk mengonstruksi suatu *shared narrative* dan *building perception* terhadap interpretasi dan aksinya kepada publik.

Dalam artikel-artikel di beberapa situs yang dianalisis, terlihat bahwa dalam relasi kuasa antara FPI dan gerakan-gerakan Islam radikal dengan pemerintah diperlihatkan kemampuan FPI untuk menegosiasikan, dan bahkan mendominasi, posisi serta kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai bentuk-bentuk artikulasi identitas budaya di ruang publik menjadi representasi relasi kuasa tersebut. Relasi kuasa yang berlangsung di ranah *offline* juga

memengaruhi kedua situs berita *online* dalam menghadirkan konstruksi realitas di ruang maya.

Namun demikian, ruang maya memberikan peluang bagi kedua situs berita untuk menyediakan ruang partisipasi publik. Ruang komentar dalam hal ini merupakan ruang yang memberikan peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam pergulatan wacana yang terjadi. Ruang maya memberikan ‘kebebasan’ bagi publik untuk mengklaim ruang interpretasi terhadap realitas yang berlangsung di ranah *offline*. Klaim-klaim FPI dan gerakan Islam radikal terhadap ruang publik, identitas budaya maupun agama, ditafsir ulang. Penafsiran ulang ini mengindikasikan resistensi publik terhadap klaim-klaim tersebut. Ruang maya juga memberikan ruang bagi publik untuk menyuarakan kritik-kritik terhadap ‘ketidakmampuan’ pemerintah untuk mengatasi gerakan-gerakan Islam radikal.



BAB 4 KESIMPULAN

Wacana radikalisme Islam dan keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di ruang publik Indonesia adalah wacana yang kompleks. Kompleksitas ini tidak bisa dilepaskan dari kontestasi pemaknaan antara identitas bangsa dengan identitas Islam. Kompleksitas ini berlangsung dalam ranah *offline* maupun ruang maya.

Aksi-aksi FPI di ruang publik Indonesia merupakan upaya FPI untuk mewujudkan proyek identitas umat Islam ideal di tengah kerangka berbangsa dan bernegara. Idealisasi umat dalam perspektif FPI terletak pada moralitas yang ditopang oleh penegakan syariat Islam. Upaya penegakan syariat Islam tersebut, ditempuh dengan aksi-aksi kekerasan yang bersifat *vigilante*, yaitu aksi kekerasan yang menasar dan menghentikan aktifitas-aktifitas di daerah urban yang dipandang bertentangan dengan nilai moralitas dan akhlak Islam.

Ruang publik ditafsirkan sebagai ruang yang harus bersih dari produk-produk dan praktek budaya yang merusak akhlak dan akidah umat. Ruang publik juga ditafsirkan sebagai ruang yang harus bersih dari kebijakan-kebijakan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan umat. Dalam hal ini, syariat merupakan alat untuk melakukan klaim dan penguasaan atas ruang publik dan ruang interpretasi secara kultural dan politis.

Kehadiran FPI di ruang maya merupakan usaha FPI untuk menyuarakan posisinya terhadap publik dalam menghadirkan konsep umat ideal. Analisis-
analisis terhadap beberapa elemen situs menunjukkan bahwa identitas yang terlihat begitu kuat direpresentasikan adalah identitas perlawanan (*resistence identity*). Beberapa elemen visual dan tekstual diarahkan untuk menegosiasikan identitas perlawanan ini. Namun, kompleksitas pengasosiasian antara konsepsi bangsa dan komunalisme agama mengakibatkan kontradiksi pemaknaan.

Kontradiksi ini menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, identitas FPI adalah identitas yang cair. Kecairan ini terlihat dari tidak konsistennan pengasosiasian identitasnya. Kedua, kecairan identitas ini menunjukkan bahwa

gerakan FPI merupakan gerakan politis, bukan gerakan ideologis dan agama. Bila gerakannya merupakan gerakan ideologis, cita-cita penegakan syariat secara *khaffah* tentunya mensyaratkan konsistensi, bukan negosiasi.

Argumentasi-argumentasi tekstual yang dimunculkan di dalam situs terlihat mengonstruksi pemaknaan ‘rasionalitas’ dan tingkat ‘intelektualitas’ FPI. Hal ini menepis stereotip ‘ke-irasionalan’ dan ‘kedangkalan’ pemikiran dan aksi FPI di ruang publik Indonesia.

Analisis terhadap topik perusakan patung dan penentangan penayangan film “?” di dalam pernyataan sikap FPI, artikel dan komentar di dalam ketiga situs berita *online*, menunjukkan bahwa objek interpretasi merupakan situs pergulatan penafsiran dan kuasa, baik itu di ranah *offline* maupun di ruang maya. Dalam hal ini, materialitas produk budaya, baik itu bahan maupun lokasi penempatannya, tidak bisa dipisahkan dari pembebanan makna dan wacana yang mengitarinya.

Dalam artikel-artikel di beberapa situs yang dianalisis, tampak bahwa relasi kuasa antara FPI dan gerakan-gerakan Islam radikal dengan pemerintah mengindikasikan kemampuan FPI untuk menegosiasikan, dan bahkan mendominasi, posisi serta kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai bentuk-bentuk artikulasi identitas budaya di ruang publik menjadi representasi dari relasi kuasa tersebut. Relasi kuasa yang berlangsung di ranah *offline* juga memengaruhi situs berita *online* dalam menghadirkan konstruksi realitas di ruang maya.

Namun demikian, ruang maya memberikan peluang situs berita *online* untuk menyediakan ruang bagi partisipasi publik. Ruang komentar, dalam hal ini, merupakan ruang yang memberikan peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam pergulatan wacana yang terjadi baik itu dalam ranah *offline* maupun *online*. Ruang maya memberikan ‘kebebasan’ bagi publik untuk mengklaim ruang interpretasi realitas yang berlangsung di ranah *offline*.

Klaim-klaim FPI dan gerakan Islam radikal terhadap ruang publik, identitas budaya maupun agama, ditafsirkan ulang. Penafsiran ulang ini mengindikasikan resistensi publik terhadap klaim-klaim tersebut. Ruang maya juga memberikan ruang bagi publik untuk menyuarakan kritik-kritik terhadap ‘ketidakmampuan’ pemerintah untuk mengatasi gerakan-gerakan Islam radikal.

Penelitian terhadap aktifitas *online* FPI memberikan informasi-informasi penting mengenai persepsi dan konstruksi ideologis yang melatari aktifitas-aktifitas *offline* FPI. Namun demikian, penelitian yang saya lakukan masih terbatas pada tataran representasi identitas sehingga kompleksitas wacana yang termunculkan masih perlu diperluas pada tataran lain, misalnya pada tataran regulasi dan produksi.

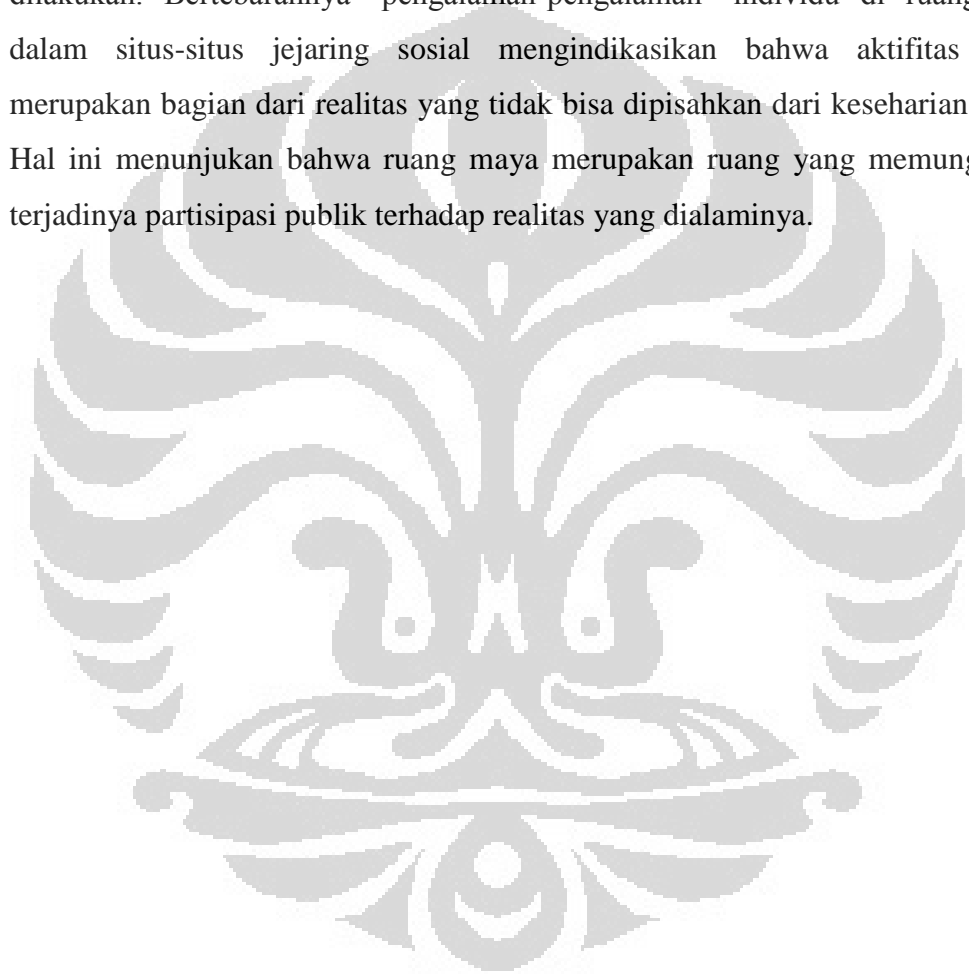
Hal penting yang belum digali lebih jauh dalam analisis saya adalah sentralitas Habieb Rizieq dalam aktifitas *online* dan *offline* FPI. Idealisasi dan ketokohan sosok ini, perlu ditelaah lebih mendalam untuk menganalisis dinamika wacana yang berkembang di sekitar aksi-aksi FPI. Selain itu, sikap FPI terhadap pemeluk agama lain perlu juga ditelaah lebih jauh. Berbeda dengan reaksi perlawanan FPI terhadap keberadaan kelompok-kelompok liberal (SEPILIS) yang terlihat begitu kuat diartikulasikan, reaksi terhadap pemeluk agama lain terlihat begitu dinegosiasikan melalui penggunaan dan pemilihan kata-kata yang terkesan penuh dengan kehati-hatian. Hal ini menyisakan pertanyaan lain terhadap pemaknaan FPI sebagai kelompok Islam radikal.

Hal penting lain yang belum dibahas adalah penggunaan *emoticon* dan nama layar (*screen name*) dalam komentar-komentar. Fungsi *emoticon* dalam memberikan ekspresi dan argumentasi visual terhadap komentar perlu ditelaah lebih jauh. Komentar-komentar yang saya pergunakan sebagai data analisis menunjukkan kecenderungan penggunaan karakter-karakter *emoticon* tersebut untuk mengekspresikan pendapat, sehingga mengindikasikan pentingnya memasukkan karakter-karakter ini dalam penafsiran komentar. Variasi-variasi nama layar perlu dilakukan penelaahan lebih jauh. Nama-nama layar tersebut terindikasikan digunakan sebagai elemen visual dan tekstual untuk menunjukkan keberposisian komentar.

Penelitian yang saya lakukan masih terbatas pada situs resmi FPI, sehingga penelitian terhadap situs-situs kelompok Islam radikal lainnya perlu juga diteliti. Keberadaan situs-situs berita *online* Islam, seperti eramuslim.com, arrahmah.com, ataupun voa-islam, perlu juga diteliti sehingga kompleksitas gerakan-gerakan Islam radikal di ruang publik Indonesia bisa terpetakan.

Namun demikian, saya berpendapat bahwa penelitian terhadap aktifitas-aktifitas kelompok Islam radikal perlu juga memasukkan penelitian-penelitian terhadap aktifitas-aktifitas kelompok Islam liberal. Hal ini perlu dilakukan karena perdebatan-perdebatan di ranah *offline* dan *online* melibatkan pertentangan antara kedua kelompok ini, sehingga bisa dilihat juga konstruksi-konstruksi ideologis yang melatari pertentangan antara kedua kelompok ini.

Penelitian-penelitian terhadap aktifitas publik di ruang maya perlu juga dilakukan. Bertebarannya ‘pengalaman-pengalaman’ individu di ruang maya dalam situs-situs jejaring sosial mengindikasikan bahwa aktifitas *online* merupakan bagian dari realitas yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian publik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang maya merupakan ruang yang memungkinkan terjadinya partisipasi publik terhadap realitas yang dialaminya.



DAFTAR REFERENSI

- Agarwal, N., Lim, M., & Wigand, R. T. (2011). Collective Action Theory Meets the Blogosphere : A New Methodology. *Communications in Computer and Information Science*, 136(3), 224-239.
- Althusser, Louis. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. *Lenin and Philosophy, and Other Essays* (pp. 127-188). (Ben Brewster, Trans). London: New Left Books.
- Anderson, Benedict. (1986). *Imagined Communities*. London: Verso.
- Appadurai, A. (2002). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In J. Xavier & R. Rosaldo (Eds.), *The Anthropology of Globalization* (pp. 46-64). Massachusetts: Blackwell.
- Bailey, Julius H. (2010). Fearing Hate. *Journal for the study of Radicalism* 4.1: 55-73.
- Barker, Chris, and Darius Galasinski. (2001). *Cultural Studies and Discourse Analysis*. London: Sage Publications.
- Barthes, Roland. (1972). *Mythologies*. Trans. Annette Lavers. Harper Collins.
- Bourdieu, P. (2009). Social Space And Symbolic Power. *Sociological Theory*, 7(1), 14-25.
- Brauchler, Birgit. (2004). Islamic Radicalism Online : The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace. *The Australian Journal of Anthropology* 15.3: 267-285.
- . (2003). Cyberidentities at war : Religion , Identity , and the Internet in the Moluccan Conflict. *Indonesia* 75.April: 123-151.
- Castells, Manuels. (2010). *The Power of Identity*. Blackwell.
- . (2004). *The Network Society: A Cross Cultural Perspective* . Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Du Gay. (1999). *Doing Cultural Studies*. Open University.
- Eagleton, Terry. (2009). Culture and Barbarism. *Commonwealth*. Mar 27.
- (2005). *Holy Terror*. New York: Oxford University Press.

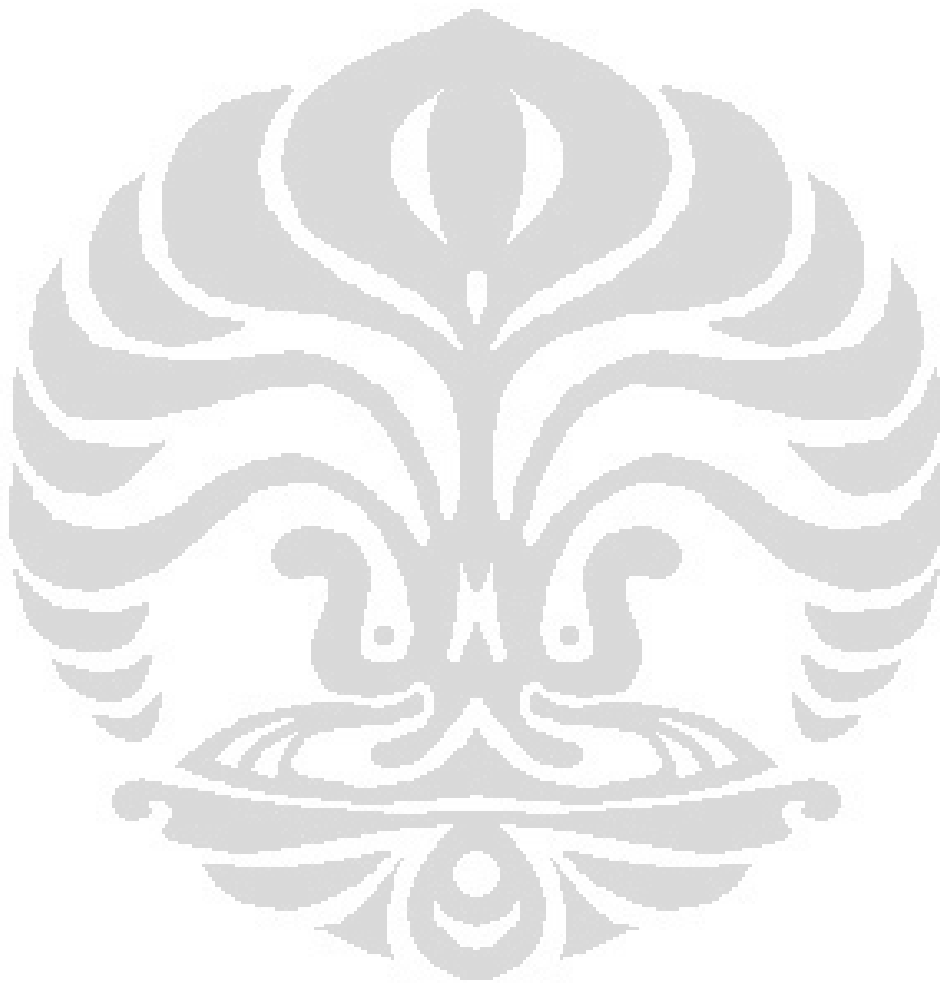
- Eickelman, Dale F, and Jon W Anderson, eds. (2003). *New Media in The Muslim World*. Second. Bloomington: Indiana University Press.
- Fealy, Greg. (2004). Islamic Radicalism in Indonesia : The Faltering Revival ?. *Southeast Asian Affairs*: 104-121.
- Foucault, M. (2004). *The Archaeology of Knowledge*. Routledge.
- Fung, Anthony Y. H. (2002) Identity politics, resistance and new media technologies: A Foucauldian approach to the study of the HKnet. *New Media & Society* 4.2: 185-204.
- FPI. (2011, 29 Agustus). STOP FILM Perusak Aqidah!. *Fpi.or.id*. <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=461> (diakses pada 10 Maret 2012).
- . (2011, 17 Oktober). Sikap Fpi Terhadap Pembuatan Patung Di Indonesia. *Fpi.or.id*. <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=477> (diakses pada 10 Maret 2012).
- . (2008, 4 Agustus). Maklumat FPI tentang SEPILIS. *Fpi.or.id*. <http://fpi.or.id/index.php?p=detail&nid=73> (diakses pada 10 Maret 2012).
- . Perspektif Organisasi. *Fpi.or.id*. <http://fpi.or.id/index.php?p=tentangfpi&mid=1> (diakses pada 10 Maret 2012).
- Gere, Charlie. (2008). *Digital Culture*. Second Edition. London: Reaktion Books.
- Hall, Stuart.(1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Open University.
- . (1990). Cultural Identity and Diaspora. J. Rutherford, Ed . *Identity: Community, Culture, Difference* (p. 222-237). London: Lawrence&Wishart Limited.
- Harvey, David. (1992). *Condition of Postmodernity*. Oxford.
- Hasan, Noorhaidi. (2009). The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of Indonesian Public Sphere. *Contemporary Islam* 3: 229-250.
- Hassan, Robert. (2004). *Media, Politics and the Network Society*. Open University Press.
- Hayles, N Katherine. (2004). Print Is Flat , Code Is Deep : The Importance of Media-Specific Analysis. *Poetics Today* 25.1: 67-90.
- . (2002). *Writing Machines*. Cambridge and London: MIT Press.
doi:10.1162/leon.2003.36.5.407a

- Hefner, Robert W. (2003). Eickelman, Dale F, and Jon W Anderson, eds. *New Media in The Muslim World*. Second. Bloomington: Indiana University Press.
- Indarini, Nurvita. (2011, 18 September). Pasca Insiden Patung, Polisi Siaga di Purwakarta. *Detik.com*.
<http://news.detik.com/read/2011/09/18/180317/1725035/10/pasca-insiden-patung-polisi-siaga-di-purwakarta> (diakses pada 8 Maret 2012).
- Kellner, Douglas. (2003). *Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern*. Routledge.
- Kristanti, Elin Yunita. (2010, 2 Juli). Dari Gruduk Waria Sampai Komunis. *Vivanews.com*. <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/161960-anti-maksiat-cara-fpi> (diakses pada 12 Maret 2012).
- Lim, M. (2002). Cyber-civic Space in Indonesia from Panopticon to Pandemonium?. *IDPR*, 24(4), 383-400.
- . (1998). Cyber-Urban Activism and the Political Change in Indonesia, (October 1996).
- Lyotard, Jean Francois. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Ed. Geoff Bennington & Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- McHoul, Alec, and Wendy Grace. (2002). *A Foucault Primer Discourse, Power and the Subject*. Routledge.
- Martin, David, and M L R Smith. (2005). Greeting from the Cybercaliphate : Some Notes on Homeland Insecurity. *International Affairs* 81.5: 925-950.
- Morley, David, and Kuan-Hsing Chen, eds. (2005). *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies*.
- O’Gorman, Marcel. (2010). Angels in Digital Armor : Technoculture and Terror Management. *Postmodern Culture* 20: 1-12.
- Poster, Mark. (2009). Global Media and Culture. *New Literary History* 39.3-4: 685-703.
- . (2004). The Information Empire. *Comparative Literature Studies* 41.3: 317-334.
- . (2001). *What’s the Matter with the Internet*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- . (2001). ed. *Jean Baudrillard Selected Writing*. Standford: Standford University Press.
- Rivki, Egir. (2011, 27 Agustus). Digeruduk FPI, SCTV Batal Tayangkan Film '?'. <http://metro.vivanews.com/news/read/243297-tayangkan-film-----fpi-siap-geruduk-sctv> (diakses pada 8 Maret 2012).
- Rybas, N. (2008). *Technoculture In Practice : Performing Identity And Difference In Social Network Systems*. East. Bowling Green State University.
- Seleny, Anna. (2012). Tradition , Modernity , and Democracy : The Many Promises of Islam. *Perspectives on Politics* 4.3: 481-494.
- SETARA Institute. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat*. Jakarta.
- Matrix, S. E. (2003). *Cyberfigurations : Constructing cyberculture and virtual subjects in popular media*. Minnesota.
- Thompson, Kenneth. (1997). *Media and Cultural Regulation*. Open University.
- Tempo Interaktif. (2010, 27 Juli). Patung Tiga Mojang Dipotong-potong Besok. *Tempo.co*. <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/27/057266560/Patung-Tiga-Mojang-Dipotong-potong-Besok/3> (diakses pada 8 Maret 2012).
- . (2010, 27 Juli). Patung Tiga Mojang Menjadi Icon Hotel di Jogjakarta. *Tempo.co*. <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/27/057266689/Patung-Tiga-Mojang-Menjadi-Icon-Hotel-di-Jogjakarta> (diakses pada 8 Maret 2012).
- Vivanews. (2011, 26 Agustus). Tayangkan Film '?', FPI Ancam Geruduk SCTV. *Vivanews.com*. <http://metro.vivanews.com/news/read/243297-tayangkan-film-----fpi-siap-geruduk-sctv> (diakses pada 8 Maret 2012).
- Walder, D. (2011). *Postcolonial Nostalgias. Memory*. Routledge.
- Wahid Institute. (2010). *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2010*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Way, Jeffrey. (2011, 21 Mei). Web Development from Scratch: Basic Layout. *Net.tutsplus.com*. <http://net.tutsplus.com/tutorials/html-css-techniques/web-development-from-scratch-basic-layout/> (diakses pada 20 Maret 2012).
- WebDevelopers.com. What Is Website Navigation. http://www.webdevelopersnotes.com/tips/webdesign/web_site_navigation.php3. (diakses pada 30 Maret 2012).

William, Raymond. (1978). *Marxism and Literature*. Oxford University Press, USA.

Woodward, Kathryn. (2002). *Identity and Difference*. Open University.



Tentang FPI

PERSPEKTIF ORGANISASI

"Posisi FPI menjadi semacam Pressure Group di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam"

(Habib Rizieq, Ketua Umum FRONT PEMBELA ISLAM, 2007).

Posisi dan Potensi Islam Perlu Dilihat Dalam Perspektif Yang Benar dan Adil

Memahami ajaran Islam dalam perspektif yang benar adalah prasyarat untuk memahami motif aksi dan reaksi umat Islam terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Islam bukanlah agama yang mengajarkan nilai-nilai permusuhan dan kebencian apalagi anarkisme dan terorisme. Sebaliknya Islam mengajarkan nilai-nilai akhlak yang universal, nilai-nilai baku moral yang kompatibel diaplikasikan bagi seluruh umat manusia. Dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, dinyatakan bahwa keberadaan Islam di muka bumi ini merupakan rahmat (kebaikan) yang bisa dinikmati semua makhluk yang ada di alam semesta ini (rahmatan lil alamin). Nilai-nilai ajaran Islam juga mencakup wilayah kebaikan yang sangat luas, mulai dari petunjuk cara bersosialisasi yang lebih baik, nilai-nilai akhlak yang memuliakan esensi hidup manusia, sistim politik dan hukum yang adil, pola perdagangan yang adil hingga konsep pengelolaan energi dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Kehadiran gerakan Islam terjadi karena adanya ketidakadilan yang dialami umat Islam dan adanya gerakan-gerakan lokal dan global yang mengancam nilai-nilai akidah (keimanan) umat Islam. Upaya pembelaan umat Islam secara terorganisasi merupakan hal mendesak yang dilakukan karena globalisasi yang ada saat ini sudah menjelma menjadi penjajahan gaya baru, melalui upaya-upaya pemaksaan sistim politik, budaya dan sosial ke bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Upaya-upaya pengrusakan dari dalam umat Islam sendiri perlu dihadapi dengan tegas, misalnya upaya pembiasaan makna pluralitas atau upaya liberalisasi ajaran Islam. Islam sangat menghargai adanya pluralitas dalam hubungan sosial antar berbagai bangsa termasuk hubungan sosial antar umat beragama, namun menolak tegas pluralitas agama yaitu upaya-upaya mencari kesamaan prinsip diantara berbagai agama yang ada. Toleransi antar umat beragama hendaknya difokuskan pada upaya-upaya mencari

pola untuk saling menghormati atas perbedaan yang ada tanpa rasa permusuhan, dan ini jelas terkandung dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur'an, dalam surat Al-Kafirun, "*untukmu agamamu, dan untukku agamaku*".

Posisi Tawar Umat Islam Indonesia Harus Diperhitungkan, dan Ini Harus Diwujudkan Dalam Bentuk Perhatian Yang Lebih Besar Terhadap Hak Kolektif Umat Islam

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka sudah sewajarnya posisi tawar umat Islam lebih besar. Posisi tawar yang besar ini diterjemahkan dalam bentuk hak kolektif umat Islam yang lebih signifikan, antara lain hak umat Islam untuk memiliki lingkungan sosial yang bersih dari berbagai 'penyakit masyarakat', seperti bersih dari pornografi, bersih dari perjudian, bersih dari narkoba dan lain-lain. Adalah wajar pula sebagai mayoritas bila umat Islam mewujudkan hak kolektifnya dengan menuntut pemerintah setempat untuk mengadopsi sebagian dari nilai-nilai ajaran Islam (Syariat), tentunya nilai-nilai moral yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan keyakinan umat beragama lainnya.

FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Merupakan Pressure Group Bagi Para Pengelola Negara Agar Berinisiatif Menerapkan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Sosial dan Bernegara.

Harus dipahami bahwa sistem hukum dan politik di Indonesia yang cenderung sekuler secara nyata telah membuat sebagian dari nilai-nilai ajaran Islam tidak terakomodasi dalam perangkat hukum negara. Bahwa seorang pencuri harus dihukum memang telah sejalan dengan sebagian nilai-nilai ajaran Islam, tapi bahwa pelacuran harus dilarang dapat terhadang oleh pasal-pasal hukum yang multi-persepsi. Dalam ruang yang kurang tersentuh pasal-pasal hukum inilah FPI melakukan berbagai pendekatan solusi agar nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan secara lebih komprehensif.

Penyakit masyarakat yang bersifat struktural, misalnya industri pornografi atau perjudian, harus dihadapi secara tegas baik dengan pendekatan hukum maupun tekanan-tekanan politis. Pembiaran terhadap kejahatan sosial semacam ini berpotensi membuahakan berbagai bentuk penyakit

masyarakat yang pada akhirnya akan merusak berbagai sendi nilai-nilai moral dan bahkan akidah umat Islam. Segala bentuk kejahatan sosial yang bersifat struktural adalah ruang gerak yang menjadi prioritas FPI untuk dihadapi secara struktural pula.

Posisi FPI lebih bersifat sebagai anggota masyarakat yang membantu para penegak hukum secara aktif dan pro-aktif melalui informasi, dukungan langsung, tekanan-tekanan (pressure) politis dan tuntutan melalui jalur hukum, dengan agenda agar hukum di negeri ini dijalankan dengan lebih baik.

Semakin baik kualitas hukum dan komitmen penegakan hukum dilakukan di Indonesia, maka semakin berkurang beban FPI dalam memperjuangkan visi-misinya, dan semakin kurang pula keterlibatan FPI dalam mengawasi berbagai pelanggaran hukum.

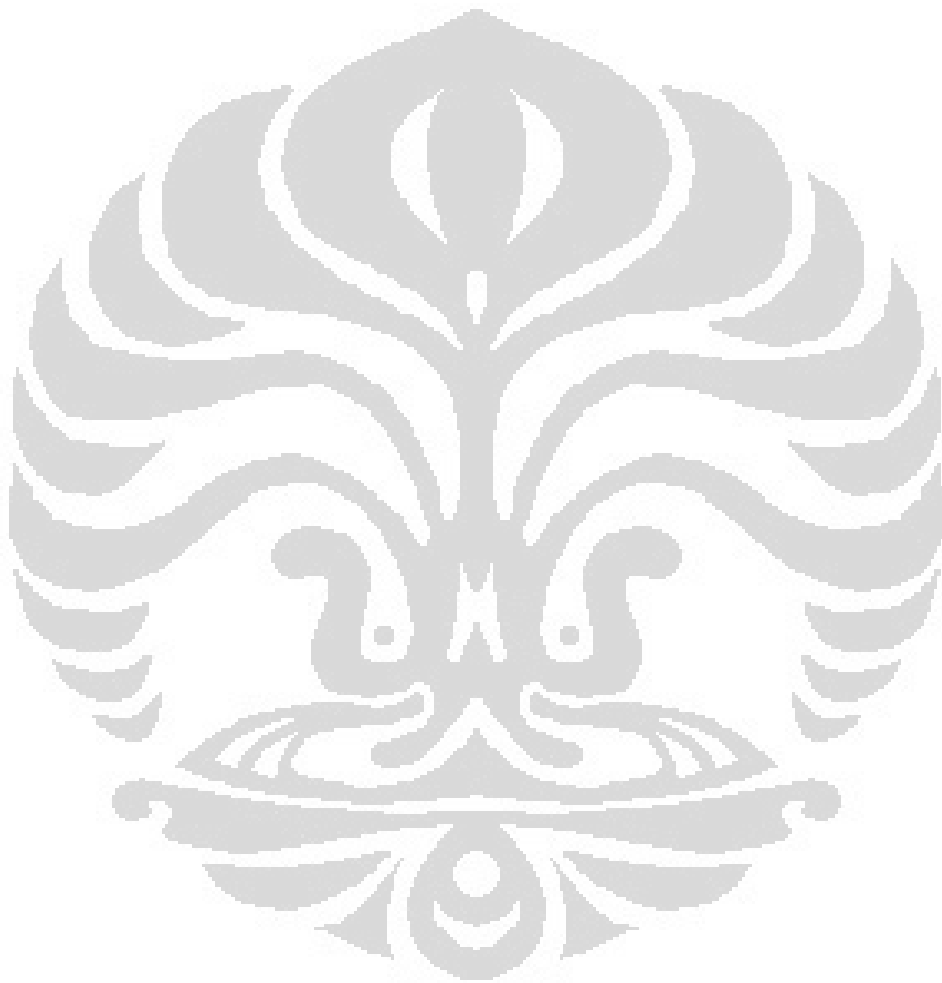
Penegakan Amar Ma'rif Nahi Munkar Adalah Perangkat Gerakan Yang Digunakan FPI Dalam Mewujudkan Nilai-nilai Syariah di Indonesia

Diterapkannya syariat Islam di Indonesia, baik secara substansial maupun formalistis, merupakan visi yang ingin dicapai FPI. Dari berbagai alternatif cara untuk mewujudkan visi tersebut, maka strategi yang dipilih FPI adalah melalui penegakan amar ma'rif nahi munkar, yaitu upaya-upaya sistematis untuk mengajak umat Islam agar menjalankan perintah agamanya secara komprehensif, dan mencegah umat Islam agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan akidah Islamnya. Pendekatan solusi ini dipilih karena (saat FPI didirikan tahun 1998) belum ada ormas Islam yang berkecimpung dibidang amar ma'rif nahi munkar secara konkrit dan tegas. Upaya mengisi kekosongan wilayah perjuangan ini merupakan upaya terorganisir dan sistematis untuk memenuhi kewajiban kolektif umat Islam dalam memberantas kejahatan (kemungkaran). Hal ini berpedoman pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an, surat Ali Imran (3):104 : "*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung*".

Untuk menjaga kemurnian perjuangan FPI, maka FPI tidak terlibat dalam politik praktis atau berpihak secara politik terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia. FPI juga tidak berafiliasi atau bekerjasama secara struktural dengan organisasi manapun baik lokal maupun internasional. Motif untuk memperjuangkan syariat Islam adalah langkah yang sah, sedangkan aksi-

(Lanjutan)

aksi untuk memperjuangkannya diupayakan untuk tetap tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.



A. NASIONAL

SIKAP FPI TERHADAP PEMBUATAN PATUNG DI INDONESIA

SENIN, 17 OKTOBER 2011 | 08:06 WIB



Sehubungan dengan maraknya pembuatan PATUNG HARAM yang diletakkan di tempat umum dan terbuka di berbagai daerah di Indonesia, yang kemudian telah mengundang protes dan reaksi keras umat Islam, sehingga menimbulkan sikap yang pro dan kontra secara nasional, maka Dewan Pimpinan Pusat - Front Pembela Islam di Jakarta memandang perlu untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan tersebut sebagai berikut :

DATA DAN FAKTA :

1. Bahwa pada tahun 2008, Bupati Purwakarta dalam suatu dialog bersama Masdar Farid Mas'udi pernah melecehkan Al-Qur'an dengan menyatakan bahwa seruling Sunda lebih indah daripada ayat Al-Qur'an.
2. Bahwa sejak Bupati Purwakarta merencanakan pembuatan patung Bima tahun 2009 yang akan diletakkan di ruang terbuka secara mencolok di jalan raya umum, para Ulama Purwakarta telah menyampaikan penolakannya kepada Bupati, dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas penduduk Purwakarta dan tidak sesuai juga dengan budaya masyarakat Purwakarta.
3. Bahwa Penolakan Ulama Purwakarta mendapat dukungan dari Wakil Bupati dan DPRD Purwakarta, bukan hanya karena alasan agama, tapi juga karena merupakan pemborosan keuangan daerah, sementara masih banyak program lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat Purwakarta terbengkalai.
4. Bahwa semua penolakan tersebut diabaikan oleh Bupati Purwakarta, dan dia tetap menjalankan program pembuatan patung Bima yang akhirnya memicu

kemarahan masyarakat, sehingga terjadi aksi massa tahun 2010 yang berupaya meruntuhkan patung Bima, tapi sempat dihalau oleh petugas.

5. Bahwa pasca keributan soal patung Bima, ternyata Bupati Purwakarta bukannya sadar dan bersikap arif terhadap aspirasi Ulama dan umat Islam di Purwakarta, justru semakin arogan dengan menggunakan Tiga Kepala Desanya memuja-hijaukan Tokoh Ulama Purwakarta yang sangat disegani umat Islam Purwakarta, KH.Abdullah Joban, mantan Ketua MUI Purwakarta.

6. Bahwa pasca keributan soal patung Bima, ternyata Bupati Purwakarta bukannya sadar dan bersikap arif terhadap aspirasi Ulama dan umat Islam di Purwakarta, justru semakin melecehkan umat Islam dengan membuat tujuh patung lainnya, seperti patung Semar, Gatot Kaca, Kresna, Jaka Tawa, Orang Biasa dan Arjuna di dua tempat. Bahkan rencananya akan dibuat belasan hingga puluhan patung lagi.

7. Bahwa pasca keributan soal patung Bima, ternyata Bupati Purwakarta bukannya sadar dan bersikap arif terhadap aspirasi Ulama dan umat Islam di Purwakarta, justru semakin menantang umat Islam dengan mengerahkan preman dan sebuah organisasi kepemudaan untuk meneror Ulama dan umat Islam di Purwakarta.

8. Bahwa Bupati Purwakarta dalam pembuatan patung selalu beralasan untuk Keindahan seni dan budaya. Padahal, jika untuk keindahan seni dan budaya masyarakat Purwakarta, mestinya Bupati Purwakarta membangun patung yang tidak diharamkan agama Islam, misalnya Patung Manggis di Wanayasa untuk menunjukkan bahwa Wanayasa adalah Kebun Manggisnya Purwakarta, atau Patung Guci Tanah / Keramik di Plered untuk menunjukkan bahwa Plered adalah Pusat Kerajinan Tanah dan Keramiknya Purwakarta, atau Patung Tasbih untuk menunjukkan bahwa Purwakarta adalah Kota Kyai dan Sanyri.

9. Bahwa Bupati Purwakarta dalam pembuatan patung-patung pewayangan selalu beralasan untuk Berda'wah ala Wali Sanga. Padahal, kondisi sosiologis dan psyskologis masyarakat di zaman Wali Sanga memang ada di "Alam Pewayangan", maka masuklah Wali Sanga berda'wah dengan wayang untuk menghijrahkan umat dari "Alam Pewayangan" ke "Alam Islami", dan berhasil. Sedang kini, Bupati Purwakarta berupaya untuk mengembalikan umat Islam di Purwakarta dari "Alam Islami" ke "Alam Pewayangan", yaitu dari "Tauhid" kepada "Syirik", sehingga kini Purwakarta berubah dari "Kota Kyai" menjadi "Kota Berhala".

10. Bahwa sikap arogan Bupati Purwakarta dan penyalah-gunaan wewenangnya telah mengundang kemarahan umat Islam Purwakarta, sehingga terjadi perobohan sejumlah patung di Purwakarta oleh masyarakat pada tanggal 18 September 2011. Karenanya, Bupati Purwakarta harus ditangkap, diperiksa dan ditahan oleh aparat

keamanan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah menciptakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

11. Bahwa perlawanan umat Islam Purwakarta terhadap arogansi Bupati Purwakarta adalah perjuangan mulia untuk membela agama, sehingga wajib untuk dihormati dan dihargai. Karenanya, tidak boleh ada pemanggilan atau pemeriksaan, apalagi penangkapan dan penahanan oleh aparat keamanan terhadap umat Islam Purwakarta yang telah dan sedang terus berjuang membela agamanya.

12. Bahwa Persoalan penolakan patung terjadi juga di berbagai daerah lain, antara lain : patung Naga di Singkawang - Kalimantan Barat, patung Budha di Tanjung Balai -Sumatera Utara dan patung Tiga Mojang di Bekasi - Jawa Barat. Karenanya, pemerintah pusat harus bersikap benar dalam menangani persoalan pembuatan patung-patung semacam itu.

SOROTAN DAN SIKAP :

- 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan jiwa Piagam Jakarta yang berintikan Syariat Islam, wajib menghargai keyakinan umat Islam yang menolak patung, karena diharamkan dalam ajaran Islam.
- 2. Bahwa pada prinsipnya, Umat Islam tidak menolak patung selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam, misalnya bukan patung Manusia / Hewan / Setan / dan yang sejenisnya atau yang menyerupainya,
- 3. Bahwa Umat Islam juga tidak pernah menolak seni dan budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- 4. Bahwa Umat Islam tidak pernah mengganggu patung yang dibuat dan diletakkan pada tempatnya, seperti patung Yesus atau Bunda Maria di dalam Gereja, patung Budha di dalam Vihara, aneka patung di dalam candi, dsb.
- 5. Bahwa adanya patung-patung yang dibuat dan diletakkan bukan pada tempatnya, apalagi di tempat terbuka yang bisa menyinggung suatu agama / suku / kelompok / golongan, tentu merupakan PROVOKASI JAHAT yang harus dilarang oleh negara.
- 6. Bahwa Patung Naga besar dan mencolok yang identik dengan adat China dipajang oleh Walikota berdarah China di tengah Kota Singkawang yang merupakan daerah basis pribumi Melayu, adalah PROVOKASI JAHAT.
- 7. Bahwa Patung Bima yang berasal dari pewayangan zaman Pra Islam dipajang secara mencolok di tengah kota Purwakarta yang dikenal sebagai

(Lanjutan)

Kota Kyai dan Santri dengan kehidupan yang sangat agamis, adalah PROVOKASI JAHAT.

- 8. Bahwa Patung Tiga Mojang dipajang di tengah keramaian Kota Bekasi yang identik dengan Kota Islam dan terkenal dengan Gerakan Islamnya sejak lama, adalah PROVOKASI JAHAT.
- 9. Bahwa Patung porno mana pun dipajang di tempat umum, adalah merupakan pelecehan terhadap moral bangsa dan negara, sekaligus adalah PROVOKASI JAHAT,
- 10. Bahwa Pelestarian Seni dan Budaya di Indonesia tidak boleh bertabrakan dengan norma-norma agama dan adat istiadat masyarakat serta adab kesantunan bangsa Indonesia.
- 11. Bahwa tidak boleh melindungi budaya dengan menghancurkan agama, tapi jagalah agama dengan membenahi budaya.
- 12. Bahwa khusus pembuatan patung-patung di Purwakarta ditengarai ada penyelewangan dana APBD yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, pembukaan lapangan kerja dan pembenahan infrastruktur, namun dihambur-hamburkan untuk patung dengan alasan seni dan budaya. Dan hal ini sudah dilaporkan masyarakat ke KPK sebelum Ramadhan yang lalu.

SERUAN :

1. Menyerukan Pemerintah Indonesia dari Pusat sampai ke Daerah untuk merobohkan semua Patung Haram yang diletakkan di tempat terbuka, dan melarang pembangunan patung-patung haram yang baru.
2. Menyerukan semua anggota masyarakat untuk segera menghentikan pembuatan patung-patung haram untuk menjaga kodusifitas hubungan antar umat beragama.
3. Menyerukan segenap Umat Islam untuk menolak pembuatan patung-patung haram di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jakarta, 1 Dzul Qa'dah 1432 H / 29 September 2011 M.

Dewan Pimpinan Pusat - Front Pembela Islam (FPI)

Sumber :

SELASA, 27 JULI 2010 | 12:31 WIB

Patung Tiga Mojang Dipotong-potong Besok

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Bekasi-Patung tiga mojang di Kota Harapan Indah yang dibongkar Pemerintah Daerah beberapa waktu lalu, akan dipotong-potong menjadi delapan bagian, besok Rabu (28/7).

Direktur Operasional PT Hasana Damai Putra Fredyanto, mengatakan pemotongan dilakukan oleh pemahatnya sendiri Nyoman Nuarta. "Nyoman dibantu tujuh anakbuahnya yang juga pemahat," kata Fredyanto hari ini.

Patung tiga mojang terpaksa dipotong-potong karena akan dikemas dan diungsikan ke daerah lain. Patung tersebut dibongkar atas perintah Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, dengan alasan keamanan di Kota Bekasi tidak kondusif. Mochtar berulang kali mendapat tekanan dari Ormas Islam, meminta patung yang diisukan Bunda Marya itu dibongkar.

Menurut Fredyanto, peralatan memotong patung tiga mojang telah didatangkan dari Bandung. Seperti, sitalin, blender, dan oksigen. Patung yang terbuat dari perunggu senilai Rp 5 miliar itu akan dikemas ke dalam kotak kayu supaya aman.

Pembeli patung tiga mojang belum diputuskan. Alasannya, nilai estetika tiga mojang tidak bisa ditakar dengan uang. Kandidat kuat pemakai patung tiga mojang adalah hotel berbintang lima grup PT Hasana Damai Putra, yang akan di bangun di kawasan ringroad Jogjakarta. "Patung tiga mojang bisa menjadi icon hotel itu," katanya.

HAMLUDDIN

SELASA, 27 JULI 2010 | 16:23 WIB

Patung Tiga Mojang Menjadi Icon Hotel di Jogjakarta

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Bekasi--Patung tiga mojang yang mengeksplorasi budaya masyarakat Priangan, akan menjadi icon hotel bintang lima di Yogyakarta. Patung dengan tiga sosok dara atau perempuan memakai kamben itu, terpaksa diungsikan ke luar kota karena ditolak masyarakat yang budayanya terwakili dalam karya pemahat Nyoman Nuarta itu, yaitu, masyarakat Bekasi, Jawa Barat.

Pemilik patung PT Hasana Damai Putra (HDP), akan memajang tiga mojang di halaman hotel megah yang akan dibangun di kawasan ring road Yogyakarta. Hotel tersebut masih milik PT HDP. "Karya seni tidak bisa dinilai dengan uang," kata Fredy Yanto, Direktur Operasional PT Hasana Damai Putra, kepada Tempo mengenai banyaknya peminat yang ingin membeli patung tersebut.

Artinya, patung yang terbuat dari tembaga asal Jepang dipadu kuningan asal Jerman itu tidak dilego ke orang lain. Sekalipun telah banyak pihak menyatakan minatnya membeli patung setinggi 17 meter itu. Di antaranya, pengusaha asal Australia dan Italia. "Tiga mojang akan menjadi icon hotel kami di Jogjakarta.

Sebelum diungsikan, tiga mojang lebih dulu dipotong-potong menjadi delapan bagian. Sebab, sulit mengangkut patung sebesar itu menggunakan kendaraan apapun. Setelah dipotong-potong, bagian-bagian patung akan dikemas dalam kotak kayu lalu diangkut ke Yogyakarta.

Menurut Fredy Yanto, pemotongan akan dilakukan oleh pemahatnya Nyoman Nuarta karena dia yang mengetahui bagian-bagian patung yang layak dipotong sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nyoman akan dibantu tujuh pemahat lainnya, pemotongan dilakukan besok Rabu (28/7), mulai pukul 09.00.

HAMLUDDIN

Pasca Insiden Patung, Polisi Siaga di Purwakarta

Nurvita Iendarini - detikNews
Minggu, 18/09/2011 18:03 WIB

Jakarta Setidaknya 3 patung di Purwakarta, Jawa Barat dirusak dan dirobohkan massa. Untuk mengantisipasi kerusuhan, polisi dibantu Satpol PP bersiaga di sejumlah titik di kota yang mendapat julukan Kota Santri ini.

"Setahu saya ada 3 patung yang dirobohkan dan dibakar oleh warga, yakni patung Semar, patung Gatotkaca dan patung Bima," kata warga Purwakarta, Tedy, saat dihubungi detikcom, Minggu (18/9/2011).

Patung-patung yang dirusak massa ukurannya cukup besar, ada yang berukuran sekitar 2,5 meter dan juga berukuran 5 meter. Massa menggunakan tali panjang untuk menggulingkan patung tokoh-tokoh pewayangan itu.

"Saya melintas di daerah-daerah yang ada patung yang sudah rusak itu sekitar pukul 15.00 WIB. Masih banyak warga yang melihat dan polisi dibantu Satpol PP berjaga-jaga di sekitar patung rusak. Banyak juga warga yang memfoto-foto," tutur Tedy.

Patung-patung yang telah tersungkur ke tanah itu terlihat hangus. Sebab massa sempat membakarnya. Tedy mengaku tidak tahu pasti siapa yang merusak patung-patung itu. Dia menduga warga Purwakarta sendiri yang melakukan lantaran tidak puas dengan kebijakan Bupati Purwakarta yang telah membangun aneka patung.

Tedy menambahkan polisi juga berjaga-jaga di sekitar patung yang masih tegak berdiri. Namun polisi tidak melengkapi diri dengan senjata.

"Patung Bima di Jalan Baru adalah patung yang paling besar. Patung itu hanya bisa dirobohkan setengah badan, mungkin karena sangat besar," imbuhnya.

Menurut Tedy, pembangunan patung itu tidak sesuai dengan aspirasi warga. Sebab tidak ada sosialisasi dari pemkab sebelum pembangunan patung dilakukan.

"Nggak ada penjelasan tentang maksud tujuan, niat dari pembangunan patung. Katanya pembangunan juga mengambil uang dari APBD. Ini kan mahal, jadi warga banyak yang tidak setuju dengan keberadaan patung. Pengrusakan patung juga bukan kali ini saja," terang Tedy.

(vit/fay)

A. PERLAWANAN KEGIATAN SESAT

STOP FILM Perusak Aqidah!

SENIN, 29 AGUSTUS 2011 | 19:42 WIB



Salah satu film perusak aqidah adalah Film “?” yang disutradarai oleh HANUNG BRAMANTYO dan diproduksi oleh ERICK TOHIR pimpinan MAHAKA PICTURE dan MAHAKA MEDIA yang menerbitkan HARIAN REPUBLIKA. Film “?” diiklankan seperempat halaman berwarna di Republika hari Kamis 7 April 2011 dengan tulisan besar di tengah iklan : “Masih pentingkah kita berbeda ?” Dan dalam deretan sponsor tertera logo tulisan “Republika”. Sehari sebelumnya, dalam Wawancara Eksklusif Republika yang menghabiskan satu halaman penuh, Hanung Bramantyo mempropagandakan film “?” dan menolak stempel pluralis mau pun liberalis untuk filmnya tersebut, dengan dalih “maksud” yang ada dalam hati dan benaknya tidak seperti yang “dipahami” orang lain.

Dalam kesempatan lain, sang sutradara menyebutkan hal-hal positif dalam filmnya untuk “menjustifikasi” hal-hal negatif dalam film tersebut yang disorot dan diprotes keras oleh masyarakat. Sang sutradara lupa atau pura-pura lupa bahwa pokok persoalannya bukan terletak pada hal-hal yang sudah positif, tapi justru terletak pada hal-hal negatif yang diprotes umat Islam. Lagi pula, walau dalam film tersebut ada berjuta kebaikan, namun jika dengan sengaja diselipkan suatu propaganda kesesatan, maka tetap sesat dan tetap akan jadi persoalan. Bahkan berjuta kebaikannya akan dipahami sebagai kamuflase untuk menutupi kesesatannya, sekaligus untuk dijadikan alasan justifikasi atas kesesatan tersebut.

Masyarakat awam adalah tingkatan kelompok orang yang lugu dan polos dengan pola pikir yang sangat sederhana. Mereka hanya “memahami” dari apa yang mereka dengar, lihat, tonton dan saksikan dari film tersebut, bukan “menafsirkan” apa yang dimaksud sang sutradara atau produsernya. Film “?” telah menyajikan sejumlah statement dan agenda yang memberi kesan kepada masyarakat awam sebagai berikut :

- 1. Dalam film “?” ada adegan pendeta ditusuk, gereja dibom, restoran Cina diserang secara anarkis oleh sekelompok masyarakat muslim di Hari Lebaran, dan sekelompok pemuda muslim bersarung dan berpeci mencerca seorang Cina yang dibalas dengan bahasa Jawa yang artinya “Dasar Teroris Anjing”.

Kesan untuk masyarakat awam bahwasanya orang Islam itu bengis, biadab dan jahat. Walau pun dalam adegan penusukan pendeta dan pengeboman gereja tidak jelas pelaku dan motifnya, namun dengan rentetan adegan lainnya tersebut mengarahkan kesan kepada umat Islam.

- 2. Dalam film “?” ada cerita tentang Rika yang semula muslimah, kemudian murtad masuk nashrani karena kecewa suami berpolygami. Rika pun berdalih bahwa kemurtadannya bukan berarti membenci atau pun mengkhianati Tuhan. Sepanjang cerita Rika ditampilkan sebagai sosok yang ideal, toleran, arif dan bijak. Ibu dan anak Rika yang semula menentang kemurtadan Rika, akhirnya bisa menerima. Dalam cerita ini ada narasi : “...semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke arah yang sama; mencari satu hal yang sama, dengan satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan.”

Kesan untuk masyarakat awam bahwasanya :

- a. Syariat polygami itu buruk karena merusak rumah-tangga dan menyebabkan orang murtad.
 - b. Murtad itu bukan mengkhianati Tuhan, sehingga tidak mengapa orang murtad.
 - c. Rika murtad tapi ideal, toleran, arif dan bijak, sehingga orang murtad pantas untuk diterima secara baik.
 - d. Sikap Ibu dan anak Rika yang menentang kemurtadan Rika adalah sikap “tidak toleran”, sehingga akhirnya dikalahkan oleh sikap “toleran” dengan menerima kemurtadan Rika.
 - e. Semua agama benar dan sama menuju Tuhan yang satu. (-Pluralisme-).
- 3. Dalam film “?” ada cerita tentang Surya yang bermain drama pada Hari Raya Paskah di gereja dengan peran menjadi Yesus. Sebelum pentas, Surya latihan Yesus disalib di dalam masjid, lalu direstui oleh Ustadz yang mengajar di masjid tersebut. Saat pentas di gereja pun banyak orang berpenampilan muslimin dan muslimat yang ikut berpartisipasi menonton dan membagikan bingkisan Paskah kepada jemaat gereja.

Kesan untuk masyarakat awam bahwasanya :

- a. Orang Islam main drama di gereja dan berperan sebagai Yesus tidak mengapa.

- b. Latihan drama Yesus disalib dalam masjid juga tidak mengapa.
- c. Orang Islam ke gereja untuk ikut merayakan Paskah pun tidak mengapa.
- d. Islam ke gereja , Yesus dan Salib ke Masjid sama saja. (-Pluralisme).
 - 4. Dalam film “?” ada cerita tentang Menuk, seorang wanita muslimah berjilbab, yang kerja di restoran Cina yang menjual dan menyajikan Babi. Saat shalat Menuk melaksanakan shalat di tempat kerjanya, dan saat tugas Menuk menghadirkan Babi dengan nyaman tanpa ada sikap galau atau pun riskan.

Kesan untuk masyarakat awam bahwasanya menjadi seorang muslim tidak harus menjadi halangan untuk menjual / memotong / menghadirkan Babi. Bahkan ada kesan untuk mengajak masyarakat untuk menghalalkan Babi. Walau pun pemilik restoran menyatakan dalam film tersebut bahwa alat masak untuk Babi harus dipisah dengan alat masak untuk Udang, Cumi dan Ayam, tapi ia juga menyatakan bahwa Daging Babi itu “lebih gurih”, tidak perlu bumbu apa pun seperti memasak Udang, Cumi dan Ayam.

- 5. Dalam film “?” ada cerita tentang Tan Kat Sun pemilik restoran Cina penjual Babi, yang toleran terhadap karyawan muslimnya dengan mempersilahkan shalat, namun akhirnya mati pasca penyerangan restoran Cinanya oleh sekelompok orang Islam. Diceritakan juga bahwa restoran Cina penjual Babi tersebut di bulan puasa ramadhan merugi karena sepi pengunjung.

Kesan untuk masyarakat awam bahwa orang non muslim sangat toleran terhadap umat Islam, tapi tidak sebaliknya. Dan juga mengesankan bahwa pelanggan restoran Cina penjual Babi tersebut adalah umat Islam, sehingga ketika umat Islam sedang puasa Ramadhan maka restoran menjadi sepi pengunjung.

Selain itu semua, masih ada lagi adegan Asmaul Husna dibaca dengan nada sinis dan melecehkan oleh pendeta di dalam gereja. Lalu ibu kost berjilbab yang judes dan bakhil.

Berdasarkan itu semua maka Front Pembela Islam mengingatkan segenap umat Islam :

1. Bahwa agama yang benar adalah Islam, selain Islam tidak benar.
2. Bahwa Islam sangat menghargai perbedaan agama (Pluralitas), tapi menolak pencampur-adukan agama (Pluralisme).
3. Bahwa Islam menolak segala bentuk penodaan terhadap agama apa pun.
4. Bahwa “Murtad” bukan bagian kebebasan beragama, tapi merupakan penodaan agama.
5. Bahwa “Murtad” adalah perbuatan terkutuk dan merupakan dosa besar yang

haram dilakukan oleh umat Islam. Pelakunya wajib bertaubat atau dihukum mati.

6. Bahwa Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) adalah paham sesat dan menyesatkan bukan dari ajaran Islam.
7. Bahwa umat Islam haram mencampur-adukan aqidah dan ibadah dengan agama apa pun, termasuk merayakan hari besar umat beragama di luar Islam.
8. Bahwa Liberal adalah musuh besar Islam dan pembangkangan Liberal terhadap Allah SWT lebih Iblis daripada Iblis.
9. Bahwa umat Islam wajib tunduk dan patuh kepada Hukum Allah SWT.
10. Bahwa umat Islam wajib membela agamanya dari segala bentuk penodaan.

Selanjutnya Front Pembela Islam menyatakan :

- 1. Bahwa Film “?” adalah FILM LIBERAL yang sesat dan menyesatkan, sehingga haram ditonton oleh umat Islam dan harus dilarang pemutarannya oleh pemerintah RI.
- 2. Bahwa Erick Tohir dengan Mahaka Picture dan Mahaka Media serta Republikanya harus menarik film “?” dari peredaran, dan meminta maaf kepada umat Islam, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya. Jika tidak, maka umat Islam diserukan untuk memboikot Erick Tohir dan semua medianya.
- 3. Bahwa Hanung Barmantyo harus menghentikan peredaran film “?”, dan bertaubat kepada Allah SWT, serta menyudahi sikap Liberalnya selama ini yang selalu menyerang Islam. Jika tidak, maka umat Islam diserukan untuk menjadikannya sebagai musuh Islam.
- 4. Bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) tidak boleh meloloskan film apa pun yang merusak aqidah dan akhlaq umat Islam, termasuk film “?”, serta wajib melakukan reformasi kepengurusan agar tidak disusupi atau ditunggangi oleh unsur-unsur Liberal dari kelompok mana pun. Jika tidak, maka bubarkan LSF dan kembalikan wewenang perfilman kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi atau kementerian lain yang berkompeten.
- 5. Bahwa semua anggota masyarakat diserukan untuk tidak membeli / menyewa / memutar / menonton / mensponsori film apa pun yang merusak aqidah dan akhlaq umat Islam, termasuk film “?”, dan diserukan pula kepada segenap anggota masyarakat untuk memboikot semua pihak yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran film yang merusak aqidah dan akhlaq umat Islam, termasuk film “?”.

Akhirnya, Front Pembela Islam menyatakan perang terhadap semua film yang merusak aqidah dan akhlaq umat Islam.

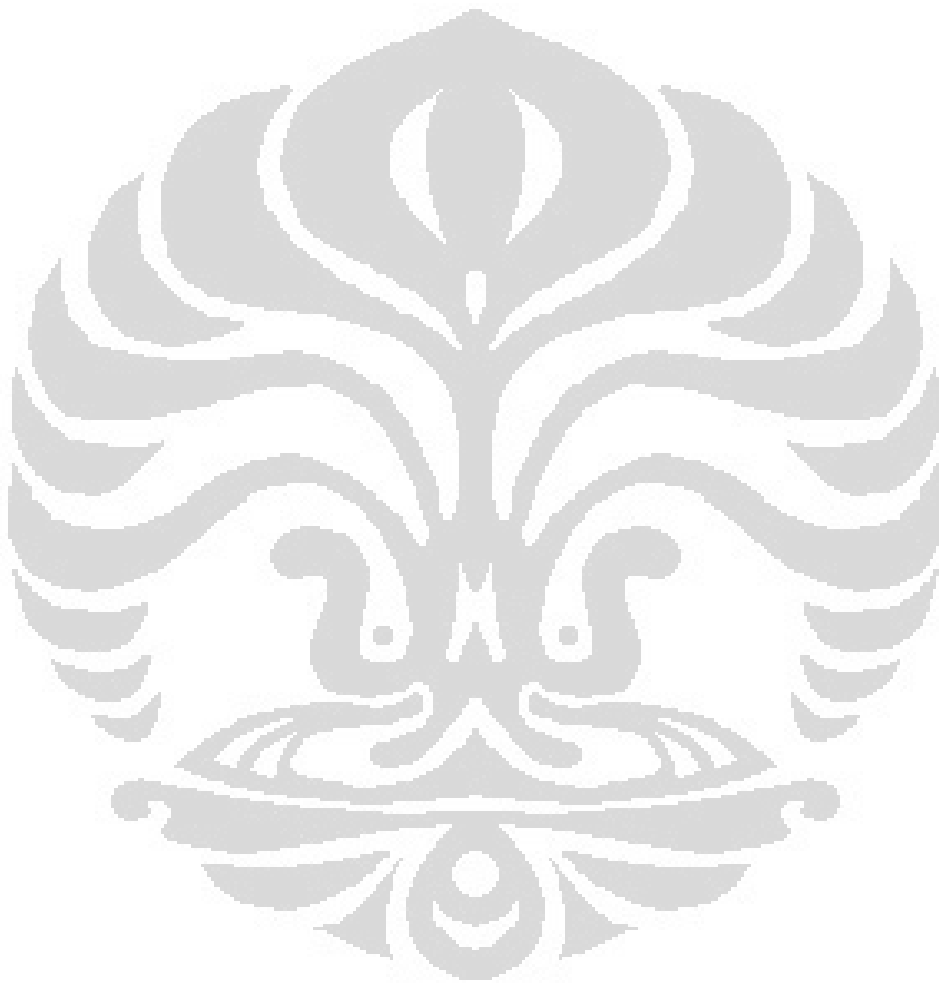
(Lanjutan)

Allahu Akbar ! Allahu Akbar
! Allahu Akbar !

Jakarta, 28 Ramadhan 1432 H / 28 Agustus 2011 M

[slm/fpi]

Sumber :



METRO

Tayangkan Film '?', FPI Ancam Geruduk SCTV

Film ini dinilai FPI merusak moral dan akidah umat Islam.

Jum'at, 26 Agustus 2011, 03:14 Sandy Adam Mahaputra



VIVAnews - Ratusan laskar Front Pembela Islam (FPI) berencana mendatangi kantor stasiun TV Nasional SCTV di Senayan City Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, guna menuntut dibatalkannya rencana penayangan film berjudul “?” (baca: Tanda Tanya).

"Rencananya Sabtu 27 Agustus 2011, kami akan mendatangi kantor SCTV untuk mendesak dibatalkannya penayangan film berjudul Tanda Tanya," kata Ketua DPP Front Pembela Islam DKI Jakarta, Habib Salim Alatas saat berbincang dengan VIVAnews.com, Kamis malam 25 Agustus 2011.

Menurutnya dasar penolakan FPI terhadap film karya Hanung Bramantyo itu, disebabkan adanya fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap film tersebut. "Jelas-jelas sudah diharamkan, tapi masih saja diputar. Ini film merusak moral dan akidah umat Islam," jelas dia.

Ia menegaskan jika pihak SCTV tetap menayangkan film itu, FPI akan melakukan tindak tegas. "Bukan FPI saja, tapi seluruh umat Islam akan ikut marah dan mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang mendukung film ini," ancamnya.

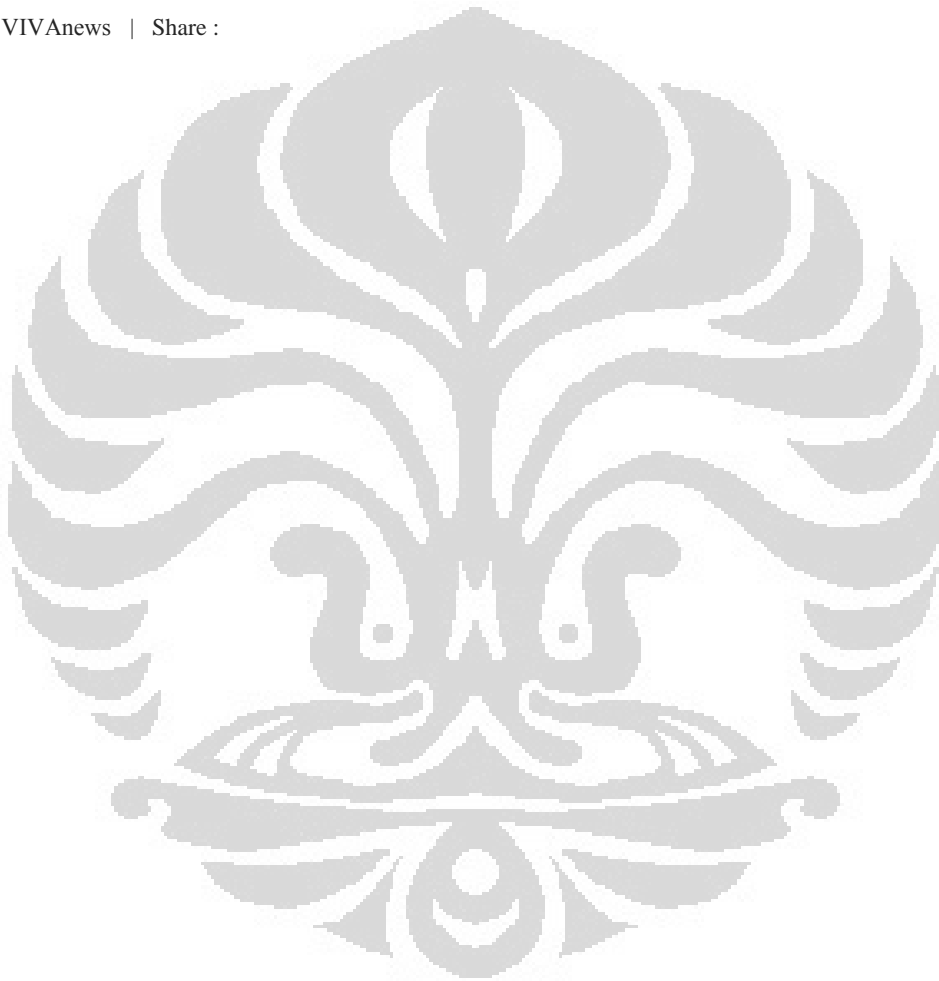
Dirinya menambahkan, FPI tidak akan melakukan sweeping ataupun tindak lainnya, jika

(Lanjutan)

tidak ada hal-hal yang merusak moral dan akidah Islam. "Kami pasti diam ko, kalau tidak ada yang merusak moral dan akidah umat Islam," katanya. Rencananya 1.500 anggota FPI dan ormas Islam di DKI Jakarta akan ikut dalam aksi tersebut.

Sebelumnya, FPI pernah mendatangi kantor Harian Republika di Jalan Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan. Tuntutannya untuk menarik Film "?" produksi Mahaka Pictures, yang merupakan induk perusahaan Republika. Film ini dinilai memicu kontroversi karena membawa faham Pluralisme.

• VIVAnews | Share :



Sabtu, 27/08/2011 18:29 WIB

Digeruduk FPI, SCTV Batal Tayangkan Film '?'

Egir Rivki - detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda



Jakarta Sekitar seratusan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor stasiun televisi SCTV. Mereka mendesak stasiun televisi nasional itu membatalkan penayangan film berjudul '?'.

"Film '?' menggambarkan umat islam itu bengis dan jahat. Ada adegan orang islam merusak restoran China, lalu pendeta ditusuk dan gereja dibom," ujar Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas, dalam orasinya di halaman SCTV Tower, Jl Asia Afrika, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).

Massa FPI yang datang dengan menggunakan sepeda motor itu menggelar orasi selama sekitar 15 menit. Mereka pun akhirnya diterima pihak SCTV. FPI dan SCTV menggelar dialog atas tuntutan tersebut di lantai 19 gedung tersebut. Dialog yang berlangsung dalam suasana tenang itu berakhir 20 menit kemudian.

"Terimakasih atas silaturahmi dari FPI, ini merupakan masukan dan evaluasi bagi kami. Sebagaimana kita telah berkomunikasi, kami nyatakan tidak akan memutar film '?' pada malam takbiran nanti," kata Corprotare Secretary SCTV, Hardijanto Soeroso, di akhir pertemuan.

Usai pertemuan itu FPI pun membubarkan diri. Raut muka mereka menunjukkan rasa puas.

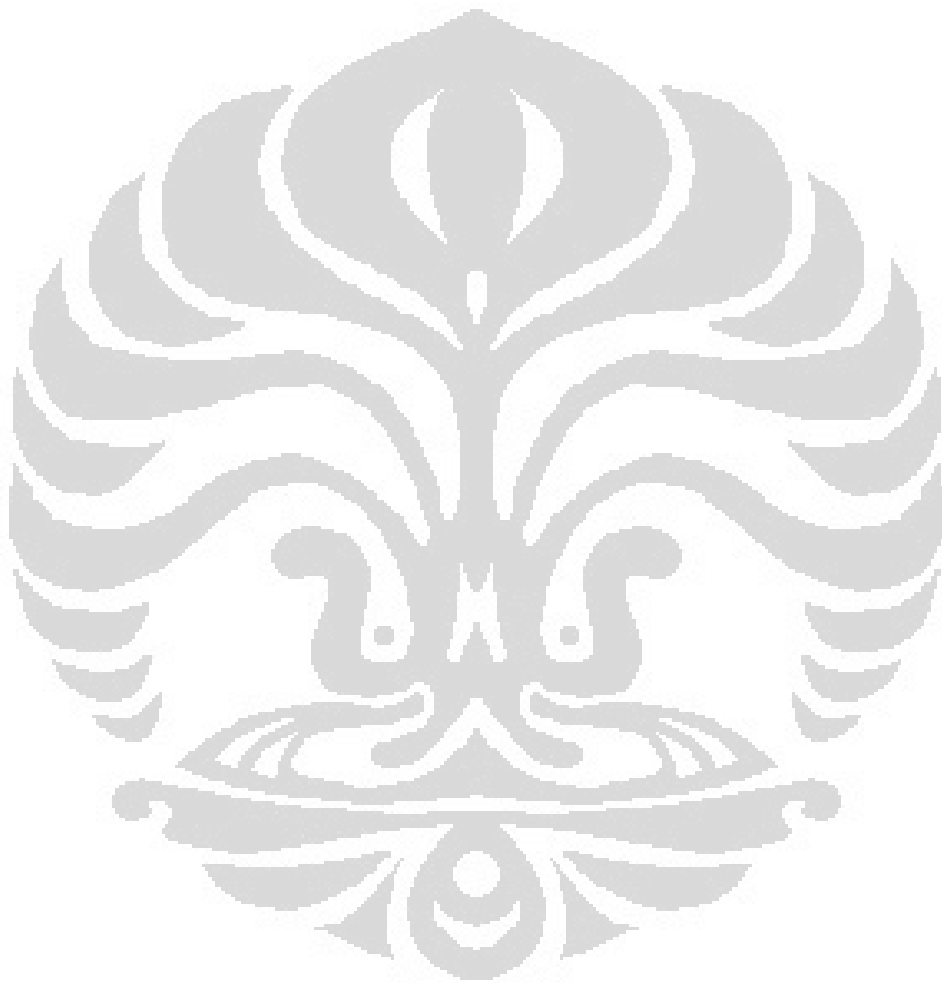
Film besutan sutradara Hanung Bramantyo ini dirilis di bioskop sekitar 7 April 2011 lalu. Sutradara muda ini mengangkat tema toleransi beragama dan film itu sempat mengundang kontroversi saat tayang perdana.

"Saya ingin menunjukkan lewat film ini gambaran beberapa peristiwa yang terjadi. Pada

(Lanjutan)

adegan terakhir film ini nanti David Chalik mengungkap bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Buat saya itulah Islam,” ujar Hanung soal filmnya itu di Radja Ketjil, Gandaria City Mall, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (31/3/2011).

(adi/mad)



TENTANG FPI
VISI & MISI
HUBUNGI KAMI
PENCARIAN
Cari

Pelayan Ummat dan Pembela Agama ~ www.fpi.or.id ~ Website Resmi DPP-FPI

DEPAH
MEDAN JUANG
BERTA JUANG
DAPUR JUANG
SAYAP JUANG
SARAN SAHABAT

HEADLINES

Gramedia Minta Maaf, FPI Tetap Proses Secara Hukum

A. KEBUJUKAN SEBAGI LOKAL - SELASA, 10 JULI 2012 | 00:50 WIB

Kali ini umat Islam kembali terluka dengan beredarnya buku berjudul '5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia' karya Douglas Wilson, yang diluncurkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dalam ...

Info Terkini	Terpopuler
00:50	Gramedia Minta Maaf, FPI Tetap Proses Secara Hukum ...
17:42	Pernyataan Sikap FPI tentang G R A M E D I A ...
02:25	Mengapa SBY Tidak Bubarkan Ahmadiyah ? ...
23:58	Nurul Arifin Diminta Jaga Mulut! ...
10:17	Said Agil vs Salim Selon 'Ronde 2' ...
19:42	Indonesian Charismatic Figure Retorts the Issue of Religious Into ...
13:12	Jusuf Kalla : Tidak ada Intoleransi di Indonesia! ...
12:45	FPI Tasyakuran atas Gagalnya Konser Lady Gaga ...
13:18	Wawasan Kebangsaan: Keserasian Gender (Bag 2-habis) ...
14:46	SAID AGIL vs SALIM SELON! ...
07:05	KH. Hasyim Muzadi Tepis Tuduhan Indonesia Intoleran ...
05:20	Irshad Manji, Lady Gaga dan Logika Setan ...
05:06	Wawasan Kebangsaan: Keserasian Gender ...
04:45	Ballada Aku Punya Hegeri ...
05:23	Malaysia Haramkan Buku Karangan Irshad Manji ...
05:11	Pernyataan Sikap FPI tentang Konser Lady Ga Ga ...
07:09	STOP FILM Perusak Aqidah! ...
04:53	Pesan Singkat Habib Rizieq untuk Kapolri Terkait Irshad Manji & P ...

Dapat dinikmati juga melalui BlackBerry, PDA, iPhone, Android serta nokia Internet Radio, selama 24 jam!

Radio FPI

http://radio.fpi.or.id

Sikap FPI

Sikap FPI tentang laporan Wikileaks

Tribute FPI to Osama

Sikap FPI terhadap Pembakaran Qur'an

Sikap FPI terhadap Majalah Playboy

Video Streaming

Wabah Virus & Anti Virus Lurus

Kuliah Sistematika - BAB 4

Kuliah Sistematika - BAB 3

Kuliah Sistematika - BAB 2

Kuliah Sistematika - BAB 1

Soal Aksi Perusakan

Sayap Juang

Pernyataan Sikap Mujahidah Pem ...

Selengkapnya ...

Saran Sahabat

Selengkapnya ...

Foto Galeri

Umat Islam Aksi Menuntut Pembubaran Ahmadiyah Tiba Di Istana (1/3)

← FOTO SEBELUMNYA FOTO BERIKUTNYA →

Habib Rizieq Menjawab berbagai pertanyaan seputar aksi FPI

KLIK DISINI UNTUK MELIHAT TANYA JAWAB LAINNYA

Jakarta - Indonesia
22 Shaban 1433
July 12, 2012

Help
Download Mobile Azan

Day	Thursday
Subuh	4:51
Fajar	6:04
Dzuhur	11:59
Ashar	3:21
Maghrib	5:53
Ishya	7:02

Free Azan Software
Rekening FPI

Bank Muamalat Indonesia
Atas Nama:
Front Pembela Islam
REK-No. 201.00360.15
BANK MANDIRI SVARIAH
FRONT PEMBELA ISLAM

FPI REK. SECURANDEBAN	000111110
FPI REK. WAKAF BANGKALAN	000111111
FPI REK. WAKAF	000111112
FPI REK. WAKAF	000111113
FPI REK. WAKAF	000111114
FPI REK. WAKAF	000111115
FPI REK. WAKAF	000111116
FPI REK. WAKAF	000111117
FPI REK. WAKAF	000111118
FPI REK. WAKAF	000111119
FPI REK. WAKAF	000111120

Perjuangan FPI

STOP FILM Perusak Aqidah Salah satu film perusak aqidah adalah Film "7" yang disutrad ...

Pernyataan Sikap Mujahidah Pem ...

FPI Islam versi III Salah Kap ...

Masjid Ahmadiyah Disegel Pemko ...

Selengkapnya ...

Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Jalan Pelamburan 3/17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Telp: 021-534-1250.
 Salurkan dana anda untuk mendukung FPI dalam perjuangan penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar melalui Bank Muamalat No. Rekening 301.00360.15 Atas Nama DPP-FPI.
 Copyright © 2009. All Rights Reserved. Comment and Suggestion, send to redaksi@fpi.or.id